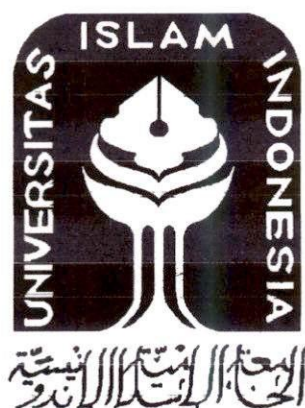


**EKSISTENSI DAN FUNGSI
PENDIDIKAN ISLAM
DALAM SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL**



Oleh:

HERRY SETYOWIBOWO S.Ag

Nim : 07913076

TESIS

Diajukan Kepada Program Pascasarjana

Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh

Gelar Magister Studi Islam

YOGYAKARTA

2009

**EKSISTENSI DAN FUNGSI
PENDIDIKAN ISLAM
DALAM SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL**



Oleh:

HERRY SETYOWIBOWO S.Ag

Nim : 07913076

Pembimbing :

Prof.DR.H. Ustman Abu baker,MA.

TESIS

**Diajukan kepada Program Magister studi Islam
Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia**

**Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam**

YOGYAKARTA

2009



PROGRAM PASCASARJANA FIAI
MAGISTER STUDI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PENGESAHAN

Nomor: 545/PS-MSI/Peng./IV/2009

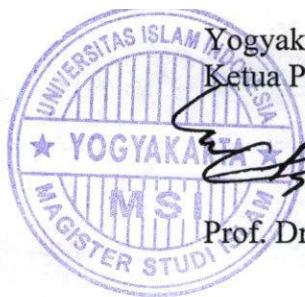
TESIS berjudul : **EKSISTENSI DAN FUNGSI PENDIDIKAN ISLAM DALAM
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL**

Ditulis oleh : Herry Setyowibowo

N. I. M. : 07913076

Konsentrasi : Pendidikan Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister dalam Ilmu
Pendidikan Islam



Yogyakarta, 27 April 2009

Ketua Program

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS



PROGRAM PASCASARJANA FIAI
MAGISTER STUDI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Herry Setyowibowo
Tempat/tgl.lahir : Temanggung, 27-8-1971
N. I. M. : 07913076
Konsentrasi : Pendidikan Islam
Judul Tesis : **EKSISTENSI DAN FUNGSI PENDIDIKAN ISLAM DALAM
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL**

Ketua/Sekretaris: Drs. H. Asmuni, MA

Pembimbing : Prof. Dr. H. Usman Abu Bakar, MA

Penguji : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

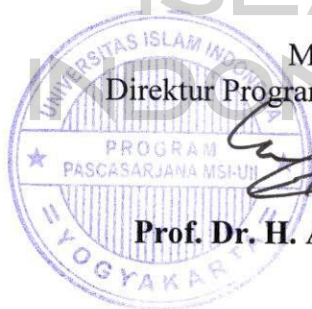
Penguji : Prof. Dr. H. Ahmad Abd. Syakur, MA

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 20 April 2009

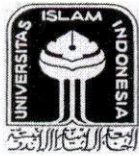
Pukul : 18.00–19.00 WIB

Hasil / Nilai : **87,00 / A**



Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana MSI UII

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS



PROGRAM PASCASARJANA FIAI
MAGISTER STUDI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

NOTA DINAS

No. : 690/PS-MSI/ND/IV/2009

TESIS berjudul : **EKSISTENSI DAN FUNGSI PENDIDIKAN ISLAM DALAM
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL**

Ditulis oleh : Herry Setyowibowo

NIM : 07913076

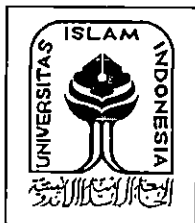
Konsentrasi : Pendidikan Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Magister Studi Islam Program
Pascasarjana (S-2) Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 17 April 2009
Ketua Program,


Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA



PROGRAM PASCASARJANA FIAI
MEGISTER STUDI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl Demangan Baru N0. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fexs 523637

PERSETUJUAN

TESIS berjudul : EKSISTENSI DAN FUNGSI PENDIDIKAN ISLAM DALAM
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

Ditulis oleh : HERRY SETYOWIBOWO S.Ag

NIM : 07913076

Konsentrasi : Pendidikan Islam

Telah dapat disetujui untuk diuji didepan tim Penguji Tesis Magister Studi Islam
(S-2) Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 16 Maret 2009.

Pembimbing

Prof. DR. H. Ustman Abu Bakar, MA

MOTTO

Michel Bonnett

Belajar berarti membuat segala sesuatu
yang kita jawab menjadi khakikat-khakikat
yang selalu menunjukkan dirinya sendiri setiap saat.

Ketika bodoh ingin selalu mengasai orang lain
tapi ketika cerdas maka ingin menguasai dirinya sendiri.

Dan

Manusia terbaik adalah manusia yang berguna bagi orang lain



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

PERSEMBAHAN



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Tesis ini kupersembahkan kepada :

- 1. Bapak dan Ibu yang senantiasa memberikan motivasi menghadapi hidup**
- 2. Istri dan anak-anakku yang selalu menemaniku dalam suka dan duka**
- 3. Teman-teman Seprofesi (Guru Agama Islam Kabupaten Temanggung)**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan
Menteri Kebudayaan RI No.158/1987 dan No.0543b/U/1987
Tertanggal 22 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak	tidak dilambangkan
ب	ba	dilambangkan	-
ت	ta	t	-
ث	sa	s	s (dengan titik di atas)
ج	jim	j	-
ح	ha'	h	h (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	-
د	dal	d	-
ذ	zal	z	z (dengan titik di atas)
ر	ra	r	-
ز	za	z	-
س	sin	s	-
ش	syin	sy	-
ص	ṣad	ṣ	s (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	ta	t	t (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	z (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik ke atas
غ	gāin	g	-
ف	fa	f	-
ق	qaf	q	-
ك	kaf	k	-
ل	lam	l	-
م	mim	m	-
ن	nun	n	-
و	wawu	w	-
ه	ha	h	-
ء	hamza	'	Apostrof
ي	ya'	y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap, contoh:

أَحْمَدِيَّة ditulis *Ahmadiyyah*

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

Bila dimatikan ditulis *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat* dan sebagainya.

جَمَاعَة ditulis *jama'ah*

Bila dihidupkan ditulis *t*, contoh:

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ ditulis *karāmatul-auliā'*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

E. Vokal Panjang

A panjang ditulis *ā*, i panjang ditulis *ī*, u panjang ditulis *ū*, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

F. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati, ditulis *ai*, contoh:

بَيْنَكُمْ ditulis *bainakum*

2. Fathah + wawu mati ditulis *au*, contoh

قَوْلٌ ditulis *qaul*

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan aspostrof (')

أَنْتُمْ ditulis *a'antum*

مُؤَنِّتٌ ditulis *mu'annas*

H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah, contoh:

الْقُرْآنُ ditulis *al-Qur'ān*

الْقِيَاسُ ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاءُ ditulis *al-samā*

الشَّمْسُ ditulis *asy-Syams*

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

J. Kata dalam Rangkaian Frasa dan Kalimat

Ditulis kata perkata, contoh:

ذَوِي الْفُرُوضِ ditulis *zawī al-furūd*

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut,

أَهْلُ السُّنَّةِ ditulis *ahl as-Sunnāh*

شَيْخُ الْإِسْلَامِ ditulis *Syaikh al-Islām* atau *Syaikhul Islām*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada seluruh alam. Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafa'atnya di yaumul qiyamat beserta keluarga, sahabat, tabi'in, dan setiap manusia yang mengikuti ajarannya sampai akhir zaman.

Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “EKSISTENSI DAN FUNGSI PENDIDIKAN ISLAM DALAM SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh derajat Magister Studi Islam Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan tesis ini tak lepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. DR. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec, Selaku Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
2. Bapak Prof. DR. H. Amir Mu'allim, MIS, selaku ketua Program Pasca Sarjana Magister Studi Islam, Universitas Islam Indonesia
3. Bapak Prof. DR. H. Ustman Abu Bakar, MA. selaku pembimbing dalam penelitian dan penulisan tesis.
4. Para Dosen Magister Studi Islam, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, yang telah banyak memberi kontribusi pemikiran dan wawasan ilmu pengetahuan selama penulis studi di lembaga ini.

5. Seluruh staf Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
6. Orang tua, Istri, Anak-anak dan Adik-adikku yang senantiasa mendukung dalam menyelesaikan studi.
7. Kepala sekolah dan teman seprofesi, karena ketika tesis ini disusun penulis bekerja sebagai pengajar SMP Negeri 1 Gemawang Temanggung.
8. Guru agama Islam Kabupaten Temanggung atas Dukungannya
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Akhirnya penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Meskipun demikian dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat dan memberikan khasanah baru dalam ilmu pengetahuan.

Yogyakarta 16 Maret, 2009

Penulis



Herry Setyowibowo, S.Ag

DAFTAR ISI

	Halaman
Judul	i
Pengesahan.....	ii
Tim Penguji Tesis.....	iii
Nota Dinas.....	iv
Persetujuan.....	v
Motto.....	vi
Persembahan.....	vii
Pedoman Transliterasi Arab – Latin	viii
Kata Pengantar	xi
Daftar Isi	xvii
Daftar Gambar dan Tabel.....	xvii
Daftar lampiran.....	xviii
Abstrak.....	xx

BAB I PENDAHULUAN

A. Latarbelakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Kerangka Teori.....	12

F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	21

BAB II FUNGSI, SISTEM DAN PENDIDIKAN ISLAM

A. Fungsi	
1. Fungsi Pendidikan.....	23
2. Fungsi Agama.....	25
3. Teori Fungsional dalam Pendidikan.....	26
B. Sistem	31
C. Pendidikan Islam	35
1. Pengertian	35
2. Tujuan	36
3. Dasar-Dasar Pelaksanaan.....	39
a. Aspek Yuridis.....	39
b. Aspek Normative	42
c. Aspek Psikologis	44
d. Aspek Historis.....	48
4. Fungsi Pendidikan Islam	
a. Sebagai Lembaga.....	50
b. Sebagai Mata pelajaran.....	52
c. Sebagai nilai.....	57

BAB III PENDIDIKAN ISLAM DALAM UNDANG-UNDANG SISTEM

PENDIDIKAN NASIONAL

A.	Kelahiran Undang-Undang SISDIKNAS.....	63
B.	Isi Kandungan Undang-Undang SISDIKNAS.....	68
1.	Pendidikan Islam sebagai Lembaga.....	69
2.	Pendidikan Islam Sebagai proses (mata pelajaran dan nilai).....	79
B.	Nilai-Nilai Islam dalam Undang-Undang SISDIKNAS.....	88

BAB IV PENGEMBANGAN FUNGSI PENDIDIKAN ISLAM

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG SISDIKNAS

A.	Pendidikan Islam Sebagai lembaga.....	93
1.	Pesantren	99
2.	Madrasah.....	114
3.	Sekolah Islam	131
B.	Pendidikan Islam sebagai Proses (mata Pelajaran dan nilai).....	
1.	Pesantren	136
2.	Madrasah.....	139
3.	Sekolah Islam	144
C.	Pendidikan Islam masa datang.....	151
1.	Pesantren	154
2.	Madrasah.....	157
3.	Sekolah Islam	158

BAB V KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

A. Kesimpulan	161
B. Saran.....	164
C. Penutup.....	166

Daftar Kepustakaan

Lampiran - lampiran

Biografi



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

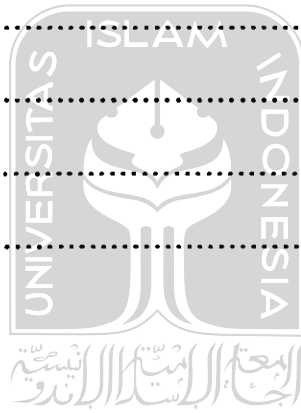
	Halaman
Gambar 1 : Empat sistem tindakan	27
Tabel 2 : Struktur Kurikulum SD/MI	140
Tabel 3 : Mata pelajaran agama pada MI	141
Tabel 4 : Struktur Kurikulum SMP/MTs	141
Tabel 5 : Mata pelajaran agama pada MTs	142
Tabel 6 : Struktur Kurikulum SMA/MA Kelas X	143
Tabel 7 : Mata pelajaran agama pada MA	144

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR LAMPIRAN

Ayat-ayat Al Qur'an

1. Q.s Az Dzariyat 56.....	36
2. Q.s Al Anam ayat 162.....	36
3. Q.s At Tahrim ayat 6.....	42
4. Q.s Al Alaq ayat 1-5.....	42
5. Q.s Al Baqoroh ayat 151.....	55
6. Q,S Ar Rum ayat 30.....	59
7. Q.s Al Hujarot ayat 13.....	61
8. Q.s Al Mulk ayat 30.....	61
9. Q.S Al Anbiya ayat 107.....	62



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

ABSTRAKSI

Eksistensi dan Fungsi Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional Oleh : Herry Setyowibowo S.Ag

Pendidikan Islam di Indonesia berlangsung sejak masuknya Islam di Indonesia, sejarah membuktikan Islam masuk ke Indonesia pada abad 7 M atau 1 H, namun dalam perkembangannya tertinggal dari mainstream pendidikan nasional. Ada dua faktor penyebabnya, faktor internal yaitu faktor yang ada dalam diri pendidikan Islam berupa landasan filosofis, konsep, manajemen dan faktor eksternal (faktor dari luar) berupa politik pendidikan atau kebijakan yang kurang berpihak terhadap pendidikan Islam. Secara umum pendidikan Islam dapat dilihat dalam dua hal Pertama pendidikan Islam sebagai lembaga, kedua pendidikan Islam sebagai proses pembelajaran (mata pelajaran dan nilai). Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang eksistensi pendidikan Islam dan fungsi pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional.

Jenis penelitian ini adalah Library Research untuk mengetahui eksistensi pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional dengan menggunakan content analisis terhadap Undang-Undang Sisdiknas yang berlaku di Indonesia dan Peraturan Pemerintah NO 25 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan keagamaan, untuk mengetahui fungsi pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional menggunakan pendekatan sosiologis dengan teori fungsional.

Dari hasil analisa dapat dikatakan pendidikan Islam secara yuridis formal mendapat pengakuan kuat sejak diberlakukannya undang-undang sisdiknas, menjadi dasar pengembangan pendidikan nasional. Secara kelembagaan terjadi dualisme pengelolaan, penentu kebijakan pendidikan nasional adalah departemen pendidikan nasional, sehingga pesantren dan madrasah yang noabene dikelola departemen agama selalu tertinggal dalam perencanaan maupun pelaksanaan programnya, disisi yang lain pengelolaan pendidikan di daerah diotonomikan sedangkan pesantren dan madrasah masih menjadi kewenangan pemerintah pusat. Pendidikan Islam sebagai proses pembelajaran (mata pelajaran dan nilai) di Pesanten menjadi mata pelajaran pokok, materi yang harus diselesaikan oleh para santri untuk menentukan kenaikan tingkat dan kelulusan, mata pelajaran agama di madrasah tidak lagi menjadi mata pelajaran pokok karena standar kelulusan ditentukan oleh mata pelajaran yang diunaskan sehingga secara kelembagaan madrasah kehilangan jatidirinya, pada sekolah Islam sama dengan madrasah, hal ini berdampak pada sikap siswa, dan orang tua terhadap mata pelajaran agama (Islam) dipandang sebagai mata pelajaran pelengkap. Untuk itu format pendidikan Islam kedepan lebih menekankan pada perbaikan mutu tanpa kehilangan jatidiri keIslamannya. Pesantren sebagai boarding school dikelola dengan manajemen modern tanpa kehilangan cirikhasnya, madrasah dan sekolah Islam hendaknya melangkah pada pendidikan yang integratif dengan kurikulum yang integrative

Kata Kunci : Pendidikan Islam, Undang-Undang System Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah, Pesantren, Madrasah dan sekolah Islam

ABSTRACT

The existence and function of the Islam Education in Indonesia's national Education System

By : Herry Setyowibowo S.Ag

The Islam education in Indonesia has been going on since Islam entered Indonesia. History proves that Islam entered Indonesia in the 6th century or the first year of Hijriyah (Islamic calendar) but it is improving less than the mainstream of national education. There are 2 factors to cause this: internal factor including the philosophy, concept, and management of education, and external factors because of educational policies which are not always in the same side with Islam education. In general, Islam education in Indonesia can be seen from 2 point of views : the first, Islam education as an institution, and the second, Islam education as a subject, a process of transferring knowledge and values. This research is meant to give a description of how Islam education exists in the perspective of laws and the function of the Islam Education in Indonesia's national education system

The study is carried out through library research to know the existence of Islam education in the national education system by using content analysis to the National Education System Acts the Government Regulation no.25 /2007 regulating religion and religiosity education (?), and using sociology approach and theory of functional (?) to know the function of the Islam education in the system of Indonesia's national education.

From the analysis it can be concluded that the existence of Islam education in Indonesia is formally acknowledged by the National Education System Acts. Institutionally there is a dualism in educational management. Policies in education are under the Ministry of National Education. This makes Islamic schools under the control of Ministry of Religion Affairs sometimes late to make and carry out their programs. On the other side, schools are managed under the autonomy of a provincial or municipal government, while Islamic schools are nationally administered.

Islam education as a learning process(transferring knowledge and values) is a compulsory subject in pesantren (traditional Islamic educational institution) and the santri (students) must master it, while in madrasah (modern Islamic schools) religion is not a core subject as the standard of passing grade is based on the result of the national examination. So a madrasah as an Islamic school has lost its identity. Either its students or their parents see religion as a complementary subject. Hence, the form of Islam education in the future should emphasize on improving the quality without ignoring the identity of Islam. Pesantren as a boarding school and its uniqueness should be administered with modern management. Islamic schools should be improved within an integrative curriculum.

Keyword : Islam education, National Education System Acts, the Government Regulation,Ppesantren, Madrasah, Islamic school

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan Islam di Indonesia telah berlangsung sejak masuknya Islam di Indonesia.¹ Menurut penelitian sejarah terbaru masuknya Islam ke Indonesia pada abad ke 7 M atau 1 H, dibawa oleh pedagang dari Arab,² da'wah Islam pada hakekatnya adalah proses pendidikan kepada masyarakat, tujuan dakwa Islam sama dengan pendidikan Islam secara umum yaitu usaha untuk mendidik manusia sehingga dapat tumbuh dan berkembang serta mempunyai potensi atau kemampuan sebagaimana mestinya.³ Ajaran-ajaran Islam harus disampaikan agar difahami, dihayati dan diamalkan, proses penyampaian ajaran inilah yang disebut pendidikan

¹ Haidar Putra Dauly, *Historitas dan Eksistensi Pesantren, Madrasah dan Sekolah*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogyakarta, 2001), hal. 1.

² Zuhairini dkk, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bina aksara, 2006), hal. 13.

Seminar yang membahas tentang masuknya Islam di Indonesia yang diselenggarakan di Medan pada tahun 1963 menyimpulkan sebagai berikut:

1. Menurut sumber bukti terbaru, Islam pertama datang ke Indonesia pada abad ke 7M/1H dibawa pedagang atau mubaligh Arab
2. Daerah yang pertama dimasuki ialah pantai barat pulau Sumatra yaitu didaerah Baros, tempat kelahiran ulama besar bernama Hamzah Fansyuri. Adapun kerajaan yang pertama ialah di Pase
3. Dalam proses pengislaman selanjutnya, orang-orang Islam bangsa Indonesia ikut aktif mengambil bagian yang berperan, dan proses itu berjalan secara damai
4. Kedatangan Islam di Indonesia ikut mencerdaskan rakyat dan membina karakter bangsa. Karakter tersebut dapat dibuktikan pada perlawanan rakyat melawan penjajah bangsa asing. dan terbukti daya tahan tersebut berlangsung cukup lama selama penjajah bercokol di Indonesia.

³ Hery Jauhari Muchtar, *Fiqih Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005), hal. 14.

Islam.⁴ Samapai sekarang antara dakwah dan pendidikan Islam bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan.

Pendidikan Islam secara umum dipahami dalam dua bentuk *Pertama* pendidikan Islam sebagai proses pembelajaran (mata pelajaran dan nilai), *kedua* pendidikan Islam sebagai lembaga (lembaga pendidikan Islam).

Pendidikan Islam sebagai proses pembelajaran secara jelas disebutkan dalam undang-undang bahwa setiap lembaga pendidkn harus mengajarkan pendidikan agama, pendidikan Islam tidak terlepas dari konstitusi itu, dimana ada lembaga pendidikan dan ada siswa yang beragama Islam maka wajib diajarkan pendidikan agama Islam oleh guru yang seagama. Namun demikian dalam masyarakat terjadi ketimpangan budaya dan tidak terimbangi oleh proses pembelajaran, proese pembelajaran masih sangat bertumpu pada *Islamologi* dengan menonjolkan aspek kognitif, ditengah harapan masyarakat mengharapkan pemantapan moral dan budi.

Kemerosotan moral (*dekadensi moral*) yang ditandai dengan banyaknya perilaku menyimpang mengindikasikan bahwa pendidikan Agama hanya mampu menekankan pada akumulasi pengetahuan agama belum mampu membuahkan hasil pada pembentukan kepribadian anak didik (*Pendidikan Karakter*).⁵ Fungsi pendidikan adalah transfer pengetahuan dan nilai (*knowledge and value*), membangun kemanusiaan dengan mengawali apa yang disebut dengan peradabannya. manusia berkebang dengan pendidikan

⁴ Fak Tarbiyah IAIN Walisongo, *PBM PAI di sekolah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hal. 46-48.

⁵ Fak Tarbiyah IAIN Walisongo, *Paradikma Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hal. 179.

sementara hewan berkembang dengan instingnya.⁶ hasil dari proses transformasi itu pada akhirnya terbentuk kepribadian atau karakter yang paripurna artinya manusia yang sukses melaksanakan transfer ilmu dan nilai akan memantulkan sosok manusia yang sistemik dengan segala unsur kemanusiaannya, baik fisik, emosi, intelektual dan lebih-lebih spiritualnya.⁷

Nilai spiritual adalah nilai-nilai agama maka pendidikan agama mempunyai fungsi menjadi pembentuk karakter, atau *karakter building*. Tujuan pendidikan untuk menanamkan keimanan, ketaqwaan kepada Tuhan Yang Esa serta berbudi pekerti luhur hanya dapat ditanamkan lewat agama, tanpa agama tidak akan ada keimanan dan ketaqwaan, maka pendidikan agama sebagai mata pelajaran menjadi penting bila dilihat fungsinya sesuai dengan tujuan pendidikan Nasional.

Munawir Syazali menegaskan bahwa pendidikan agama hendaknya mampu menumbuhkan keyakinan anak didik akan kebenaran ajaran agamanya dan mampu pula menghormati keyakinan orang lain yang meyakini ajaran agama pula.⁸ Pendidikan agama saat ini masih menemui kendala internal dan eksternal, masalah SDM, penguasaan teknologi, kebijakan yang kurang berfihak pada pendidikan agama normativitas pemahaman masyarakat akan

⁶ Murtadha Muthohari, *Perspektif Manusi Dalam Al-Qur'an Tentang Manusia dan Hewan*, (Bandung: Mizan, 1992), hal. 62.

⁷ Abdurrahman, *Meaningful in Learning*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hal. 3.

⁸ Abdurrahman Saleh, *Pendidikan Agama dan Pembentukan Watak Bangsa*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 63

Munawir Syazali adalah mantan menteri Agama pada masa ordebaru, trikerukunan umat beragama menjadi acuan pelaksanaannya antara lain :

1. Kerukunan antar pemeluk dalam agama yang sama
2. Kerukunan antar pemeluk agama
3. Kerukunan antara pemeluk agama dengan pemerintah.

ajaran nilai-nilai universal. Perbedaan normative menggelinding terus dalam masyarakat sementara teknologi melesat bak anak panah yang luput dari perhatian umat Islam.⁹

Kompetensi dasar yang harus dicapai dalam rumusan kurikulum persekolahan dipandang terlalu jauh dari jangkauan siswa karena keterbatasan waktu dan lingkungan yang belum mendukungnya¹⁰, hal ini bisa dilihat dari alokasi waktu dua jam yang diberikan untuk pendidikan Agama (Islam) dalam seminggu pada sekolah-sekolah umum masih kurang dengan beban materi dan kompetensi dasar yang harus dicapai. Pendidikan Agama termasuk pendidikan masih sebatas pada pemberian nuansa keberagamaan belum sampai pada pembentukan watak bangsa, sehingga pendidikan bangsa ini lebih mengurus lapisan terluar kehidupan, belum sampai pada esensi pendidikan,¹¹ A.M Syaifudin dengan tegas menyatakan bahwa Pendidikan agama menjadi mata pelajaran pelengkap yang menempel bagi orientasi pendidikan sekuler¹² Kondisi semacam ini yang mengakibatkan kurang berkarakturnya manusia Indonesia khususnya mereka yang masih berada di bangku pelajar.¹³

⁹ Abdurrahman, *Meningfu.*, hal. 6-7.

¹⁰ Abdurrahman saleh, *Pendidikan.*, hal, 64.

¹¹ Suyata dan Darmiyati Zuchdi . *Pidato Pemberian Gelar DR HC' kepada Ary Ginanjar Agustian.* (Yogyakarta: UNY, 2007), hal. 4.

¹² A.M. Saefudin dalam bukunya 70 tahun H.M Rasjidi, *Kensep Pendidikan Agama: Sebuah Pendekatan Integratif Inofatif*, (Jakarta: Harian Umum Pelita, 1985), hal. 238.

¹³ Abdurrahman, *Meningful.*, hal 7.

Fungsi agama sebagai sumber terpenting kesadaran makna (*Sense of meaning*) bagi umat manusia.¹⁴ Agama menjadi dasar moralitas penganutnya, pendidikan sejatinya merupakan proses pembentukan moral masyarakat, masyarakat yang tampil dengan wajah kemanusiaan dan pemanusiaan yang bermoral.¹⁵ Penanaman moral dan pembentukan karakter atau watak bangsa lebih banyak diperankan pendidikan Agama (Pendidikan Islam).

Keberhasilan pendidikan Islam akan sangat bergantung pada eksplorasi aspek *afektif* dan *psikomotor* artinya nilai-nilai yang ditanamkan itu mempunyai dampak positif dalam perilaku, akan tetapi aspek afektif dan psikomotor ini hampir terbilang sangat langka dalam pendidikan Islam, realita ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam sebagai proses, kecenderungannya lebih banyak memberikan kegagalan mencapai target atau tujuan pendidikan

Di bagian yang lain, keadaan ini menempatkan kita terutama pembuat kebijakan, penyelenggara, dan pelaksana dalam dunia pendidikan telah bersikap inkonsistensi, hal ini dapat dilihat begitu besarnya harapan dan pengaruh terhadap pendidikan (agama) Islam sebagai proses pembelajaran guna mengisi relung hati peserta didik dengan norma-norma ajaran agama (Islam), dengan idialisme tujuan pendidikan nasional, yang ingin menghasilkan manusia Indonesia yang beriman dengan melihat model pelaksanaannya, pencapaian target dan tujuannya, jauh dari apa yang diharapkan

¹⁴ Nurcholis Majid, *Islam Dokterin dan Peradaban*, (Jakarta: Paramadina, 2000), hal.575.

¹⁵ Sudarwan Danim, *Agenda Pembaharuan Sistem Pendidikan*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2006), hal. 84.

Pendidikan Islam sebagai lembaga, sekalipun keberadaannya tidak dapat dipandang sebelah mata dengan lembaga pendidikan pada umumnya, ia tetap berada pada tataran idialisme yang sepesifik, hal ini justru menjadi bumerang dalam situasi masyarakat yang tengah mengalami perubahan yang tidak sebanding dengan kekuatan dan kualitas yang dimiliki.

Pendidikan Islam sebagai lembaga-pun pada umumnya mengalami hambatan pokok seperti politik pendidikan yang cenderung membedakan haknya, persoalan dikotomi ilmu pengetahuan yang belum selesai, sistem dan manajemen yang dinilai berkualitas rendah, dan penilaian masyarakat yang subyektif tidak terkecuali Madrasah yang telah menempatkan diri sebagai pendidikan umum plus. Usaha pembaharuan pendidikan Islam selalu dihambat mulai dari persoalan perundang-undangan, dana dan tenaga ahli (sumber daya manusia).¹⁶

Pendidikan Islam diselenggarakan ditengah masyarakat yang terus tumbuh dan berkembang, tanpa mengetahui karakteristik pertumbuhan dan perkembangan masyarakat dapat keluar dari konteks masyarakatnya, berjalan diawang-awang tidak membumi atau a-historis sehigga output yang dihasilkan tidak sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.¹⁷ Disisi yang lain masih adanya kesan eksklusifisme terhadap pendidikan Islam ditengah kosmopolit yang lebih menuntut pada pendekatan rasional, profesional, dan mampu menjalani bentuk ketergantungan fungsional. Keterangan diatas merupakan cermin dari

¹⁶ Hujair Sanaki , *Paradikma Pendidikan Islam Membangunmasyarakat Indonesia Madani*, (Jogjakarta: Pustaka pelajar. 2003), hal. 9.

¹⁷ Zaenudin Maliki : *Sosiologi Pendidikan*, (Yogyakarta: Gajah Mada Pers. 2007), Hal. Vii.

pendidikan yang belum sesuai dengan tujuannya sehingga terjadi kesenjangan yang terlalu jauh antara idialita dengan realita, antara konseptual dengan kontekstualnya sehingga perlu dikaji tentang eksistensi dan fungsi pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional.

Penelitian ini mengkaji pendidikan Islam sebagai lembaga dan pendidikan Islam sebagai proses (mata pelajaran dan nilai), dengan menggunakan pendekatan *Historis* sosiologis, untuk pendekatan historisnya ditekankan pada (*Pendekatan Sejarah konstitusional*), pendekatan sosiologis dengan menggunakan teori sosial fungsional untuk menelaah fungsi pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional. Unit analisisnya pendidikan Islam sebagai lembaga antara lain; dualisme pengelolaan pendidikan, standarisasi pendidikan nasional, manajemen pendidikan dan pendidikan Islam di era otonomi daerah. Sedangkan pendidikan Islam sebagai mata pelajaran dan nilai tentang fungsi mata pelajaran pendidikan Islam dan nilai dalam sistem pendidikan nasional.

B. Rumusan Masalah

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum dan bukan negara yang berdasarkan pada agama, maka dibutuhkan produk hukum yang mempunyai legalitas kuat dalam melaksanakan pendidikan Agama Islam sehingga dapat berjalan secara sistematis dalam sistem ketata negaraan.¹⁸ Pendidikan Islam mempunyai peranan besar dalam menegakkan kedaulatan negara ini dan misi

¹⁸ Habib Toha dan Abdul Mu'ti, *Proses Belajar Mengajar PAI di Sekolah*, (Yogyakarta: Pustaka Pe lajar, 1998), hal.31.

mencerdaskan kehidupan bangsa telah berlangsung sebanding dengan masuknya Islam ke Indonesia. Meskipun antara kondisi riil dengan idealisme tujuan pendidikan masih jauh dari yang diharapkan.

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah Eksistensi Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional ?
- b. Bagaimanakah Fungsi Pendidikan Islam (sebagai lembaga maupun mata pelajaran dan nilai) dalam Sistem pendidikan Nasional ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Dari pokok masalah tersebut ada beberapa tujuan yang hendak dicapai yaitu:

- a. Untuk mengetahui keberadaan pendidikan Islam dalam sistem pendidikan Nasional, secara eksplisit maupun implisit dalam perspektif undang-undang, mengingat negara Indonesia bukan negara yang berdasarkan pada agama tetapi dengan pemeluk Islam di Indonesia adalah mayoritas, apakah kepercayaan mayoritas ini terakomodir dalam undang-undang atau tidak.
- b. Untuk mengetahui fungsi pendidikan agama Islam dalam sistem pendidikan nasional, apakah peran strategis lembaga pendidikan Islam dan apakah nilai-nilai Islam yang tertuang dalam pendidikan Islam

mempunyai fungsi yang setrategis sehingga dapat mewarnai pendidikan nasional.

2. Manfaat

Sementara itu hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan dalam :

- a. Memberikan sumbangan teoritis dalam wacana sistem pendidikan nasional, bahwa diperlukan undang-undang sebagai dasar pelaksanaan pendidikan agama Islam karena negara Indonesia bukan negara berdasarkan agama. Eksistensi dan fungsi pendidikan Islam menjadi penting mengingat tujuan pendidikan nasional adalah membentuk karakter atau watak mental bangsa, tugas itu lebih banyak diperankan oleh pendidikan agama.
- b. Memberikan sumbangan praktis dalam upaya membangun keseimbangan pendidikan karena fakta menunjukkan masih adanya ketimpangan dalam pendidikan nasional, dari segi kelembagaan dengan dualisme pengelolaan dan belum tertanamnya nilai-nilai agama kedalam output lembaga pendidikan Islam.

D. Telaah Pustaka

Tinjauan kritis terhadap sistem pendidikan nasional tidak dapat dilepaskan dari undang-undang dan peraturan pemerintah pelaksanaanya, terjadinya pergeseran kebijakan pada setiap saat berkaitan dengan peraturan yang dikeluarkan sebagai wujud respon terhadap persoalan pendidikan yang dihadapi. Undang Undang no 20 tahun 2003 tentang sisdiknas mencoba

mengakomodir persoalan-persoalan kontemporer yang berkaitan dengan dunia pendidikan antara lain persoalan desentralisasi, integrasi kurikulum, penghilangan dikotomi pendidikan, perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Haidar Putra Daulay "*Pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional*". Haidar melihat pendidikan Islam sebagai sub sistem dari sistem pendidikan nasional, artinya pendidikan Islam berjalan sesuai dan selaras dengan sistem pendidikan Nasional yang berlaku. Kajian tentang Peran pondok pesanteran dalam menciptakan masyarakat madani, keberadaan pondok pesanteren mempunyai sangat dan berfungsi setrategis dalam menanamkan nilai-nilai menuju masyarakat madani, dan bagaimana pendidikan Islam dalam sekolah yang bercirikan keagamaan, Lebih lanjut Haidar merespon isu-isu kekinian yang berkaitan dengan otonomi daerah, prulalisme dan tantangan serta paradikma baru dalam pendidikan Islam.

Haidar Putra Daulay dalam buku yang lain yang berjudul *Historitas dan Eksistensi Pesantren, Sekolah dan Madrasah*, Haidar membahas sejarah pendidikan Islam sebagai lembaga untuk menunjukkan eksistensinya. Pendidikan Islam sebagai lembaga mengalami banyak perubahan dan perkembangan dari konsep semula dimana secara yuridis semakin mendapat pengakuan, lebih jauh haidar mempunyai pandangan tentang konsep pendidikan Islam yang akan datang sesuai dengan tantangn yang dihadapi.

Abdul Rachman Ahaleh dalam bukunya yang berjudul "*Pendidikan Agama dan Pemabngunan Watak Bangsa*". Pada dasarnya watak atau karakter bangsa ini dibentuk dari pendidikan, materi dan sistem pendidikan seharusnya

mengarahkan pada pembentukan karakter itu , dalam kontek keIndonesiaan watak bangsa itu dibangun berdasarkan nilai-nilai keagamaan artinya bagaimana keberadaan pendidikan agama khususnya pendidikan Islam dalam usaha pembentukan watak bangsa, mengingat bangsa ini adalah bangsa yang beragama maka nilai-nilai agama menjadi landasasn lewat pendidikan, pada akhir pembahasan Abdurrahman mengupas tentang bagaimana watak bangsa ini dapat dibangun dengan mengkaji kurikulum, model dan metode pembelajarannya.

Abdurrahman Asegaf dalam bukunya “politik pendidikan nasional” lebih banyak mengkaji tentang kebijakan pemerintah Indonesia dalam bidang pendidikan Islam dengan menggunakan analisa kebijakan sehingga setresingnya lebih kepada terjadinya pergeseran berkaitan dengan kebijakan pendidikan agama Islam di Indonesia dan kemana arah pergeseran kebijakan itu akan dibawa, tujuan akhir dari kajian Abdurrahman asssegaf ini adalah untuk kepentingan reformasi pendidikan setelah diketahui factor keberhasilan dan kekurangannya.

Surohim dalam Tesisnya “Reformulasi Pendidikan Islam sebagai Konsekuensi Berlakunya UU NO 20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS” memberikan gambaran informasi dan pemikiran tentang implikasi undang-undang No 20 tahun 2003 terhadap sistem pendidikan Islam dengan memberikan kosep dalam usaha mereformulasi pendidikan Islam sebagai akibat diberlakukannya undang-undang tersebut. Reformulasi tersebut dengan

memberikan alternative berupa laboratorium fungsi ganda yaitu dengan peningkatan mutu akademis dan pengembangan usaha bisnis.

Dari beberapa kajian diatas praktis kajian ini berbeda dengan kajian sebelumnya, pembahasannya difokuskan pada kajian histories pendidikan Islam dari perspektif undang-undang, mulai kapan pendidikan Islam secara sah menurut undang-undang diakui dan bagaimana bentuk pengakuannya, dan kajian fungsi atau peran pendidikan Islam dalam Sistem pendidikan nasional.

E. Kerangka Teori

Pendidikan atau tarbiyah berasal dari kata “*rabaa-yarbuu-riban wa rabwah*” yang artinta “berkembang-tumbuh dan subur’ Dalam Al Qur’an kata “*rabwah*” berarti bukit-bukit yang tanahnya subur untuk tanam-tanaman (Qs Al Baqoroh : 265). Dengan demikian maka yang dimaksud “*rabha*” bukan berarti “mengganti” (*tabdil*) dan bukan pula berarti “merubah” (*taghyir*), melainkan menumbuhkan, mengembangkan dan menyuburkan atau lebih tepat (“mengakomodasikan” sifat-sifat dasar “fitrah) seorang anak sejak penciptaannya agar tumbuh subur dan berkembang dengan baik.¹⁹ Dengan demikian yang dimaksud dengan pendidikan Islam adalah : Usaha secara sadar dan terencana menumbuhkan sifat-sifat dasar fitrah seorang anak sejak penciptaannya agar tumbuh subur dan berkembang dengan baik untuk menjalani kehidupannya.

¹⁹ M. Samsi Ali, <http://id.shovong.com/humanities> accessed 11 September 2007.

Daei keretangan diatas dapat diambil pengertian bahwa Pendidikan Islam mempunyai fungsi sebagai suatu usaha terencana untuk menumbuhkan kepekaan berfikir dan bertindak serta mengembangkan sifat-sifat dasar fitrah manusia dengan ilmu pengetahuan berdasarkan nilai-nilai etika Islam.

Dalam undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, Pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan, mengembangkan potensi bangsa agar menjadi bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.²⁰ Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah No 25 tahun 2007 Pendidikan Agama sebagai mata pelajaran berfungsi menanamkan ketauhidan, penanaman akhlaq mulia dan membimbing sebagai manusia Indonesia untuk saling menghargai dan menghormati.²¹ Pendidikan Agama sebagai lembaga berfungsi mempersiapkan output yang paham dan mengamalkan nilai agamanya.²²

Pendidikan Islam dapat dilihat dari dua hal pokok antara lain :

1. Pendidikan Islam sebagai lembaga maka muncul Roudlotul Atfal / Bustanul Atfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah

²⁰ UU No 20 tahun 2003 Bab II Pasal 3

Pendidikan nasional berfungsi “mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi anak didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

²¹ PP No 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan keagamaan Bab II Pasal 2 ayat 2

Pendidikan agama berfungsi membentuk manusia Indonesia yang percaya pada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antarumat beragama

²² PP No 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan keagamaan Bab III Pasal 8 ayat 1

Pendidikan Keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya/ menjadi ahli agama

Aliyah dan sekolah Islam mulai dari tingkat SD, SMP dan SMA atau yang sederajat, lembaga ini pada dasarnya mempunyai fungsi menyiapkan generasi muda untuk memegang peranannya dalam masyarakat pada masa yang akan datang. Peran itu dalam rangka melanjutkan hidup (*survival*) masyarakat itu sendiri

2. Pendidikan Islam sebagai Proses (mata pelajaran dan nilai) mata pelajaran maka muncul mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, fungsinya memindahkan Ilmu pengetahuan (*Transfer of Knowledge*) dengan peran-peran tersebut dari generasi muda. Sebagai nilai (*Transfer of Value*), berfungsi untuk memelihara keutuhan dan kesatuan masyarakat yang menjadi sarat mutlak bagi kelangsungan hidup suatu masyarakat dan peradaban. Dengan nilai-nilai itu berorientasi pada pendidikan beramal di dunia untuk kehidupan akhirat. Fungsi keempat inilah yang menautkan dan menginternalisasi serta menyelaraskan fungsi-fungsi yang lain.²³

Dalam perspektif sosiologis Pendidikan adalah suatu fakta sosial (*Social Fact*),²⁴ Pendidikan pada dasarnya adalah hubungan antara lembaga pendidikan dengan masyarakat²⁵ Pendidikan diselenggarakan di tengah kehidupan masyarakat maka pendidikan harus memperhatikan karakteristik

²³ Haidar Putra Dauli, *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional*. (Kencana Prenada Grup. 2007). hal 15-17. dan Wan Daud Wan M Ibrahim, <http://www.angelfire.com/in/elcom> 98/accesed 31 Mei 2008.

²⁴ Adivikara Sudardja, *Sosiologi Pendidikan, Isu dan Hipotesis antara Pendidikan dalam Hubungannya dengan Masyarakat*, (Jakarta: Depdikbud. 1988), hal. 11-13.

²⁵ Sanapiah Faisal, *Sosiologi Pendidikan*, (Surabaya: Usaha Nasional. t.t.), hal. 25.

masyarakat, masyarakat mempengaruhi proses dan *outcome* pendidikan begitu pula sebaliknya.

Fungsi pendidikan masa kini adalah transmisi kebudayaan dan mempertahankan tatanan sosial yang ada, masa depan dipersiapkan dengan mengajarkan fungsi-fungsi dalam masyarakat masa depan.²⁶ sosiologi pendidikan adalah untuk menganalisa pola interaksi antara sekolah dengan kelompok-kelompok sosial lainnya, analisa terhadap struktur kekuasaan dalam masyarakat beserta imbasnya terhadap sekolah, analisa hubungan antara sistem sekolah dengan sistem sosial masyarakat dan struktur masyarakat beserta pengaruhnya terhadap organisasi sekolah.²⁷ Pendidikan menurut pengamat fungsionalis menjaga ketertiban sosial, menjaga agar masyarakat memenuhi apa yang paling diinginkannya, jangan sampai masyarakat kehilangan untuk eraih keingnannya tersebut, pendidikan harus memainkan perannya mecerdaskan warga masyarakat, karena pendidikan kunci terpenting dalam

Pendidikan Islam sudah berkembang sebanding dengan masuknya Islam ke Indonesia artinya hal ini menunjukkan eksistensinya, maka *outcome* pendidikan Islam sangat dipengaruhi oleh masyarakat dengan nilai-nilai Islamnya, masyarakat memberi masukan terhadap pendidikan sebaliknya masyarakat juga pengguna output pendidikan.

Pendidikan Islam merupakan subsistem dari sistem pendidikan nasional, sistem merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan saling berinteraksi, , setiap

²⁶ Zaenudin, *Reformasi Pendidikan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 26.

²⁷ Adiwikara, *Sosiologi*, hal. 11-13.

subsistem mempunyai fungsi yang berbeda-beda bila salah satu dari sub sistem itu tidak berfungsi maka dipastikan akan terjadi kepincangan atau ketidak seimbangan dalam sistem itu sehingga sulit tercapainya tujuan. Pendidikan Islam sebagai sistem harus dapat berinteraksi menyebabkan keadaan menjadi seimbang, interrelasi atau saling berhubungan dan saling bergantung interpendensi dengan sub sistem yang lain.

Penelitian ini dalam skala makro, tujuan analisisnya adalah mencari hukum-hukum universal (generalisasi) dan bukan untuk menelusuri keunikan (partikularitas) fenomena, sehingga unit analisisnya berupa sistem pendidikan, bukan individu tetapi kelompok. Dengan demikian temuan yang diperoleh bukan untuk tujuan memahami kesadaran individu melainkan untuk kepentingan semua orang dalam sistem disemua batas waktu dan semua batas ruang (*All times and all places*).

Untuk menganalisa fungsi pendidikan Islam dalam sistem pendidikan Nasional teori yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah teori Fungsional, Teori fungsional menekankan kepada keseimbangan sebuah sistem sosial, pendidikan Islam merupakan bagian sistem sosial yang tidak terpisahkan dari pendidikan nasional, ketika perlu dikaji apa fungsi pendidikan Islam tersebut dan bagaimana kondisi riilnya, jika pendidikan Islam tidak berfungsi maka pendidikan nasionalpun secara umum tidak akan dapat berjalan dengan baik karena dalam sebuah sistem antara subsistem saling berkaitan

Dalam terori fungsional Tolcat person menekankan fungsi sebuah sistem, suatu sistem berfungsi manakala berfungsinya sistem tindakannya. sistem akan berfungsi dengan baik apabila mempunyai empat syarat yang dikenal dengan AGII,

Pertama Adaptation (adaptasi), sistem dapat beradaptasi sehingga mampu merubah lingkungan eksternal yang gawat untuk disesuaikan dengan kebutuhannya. *Kedua Goal Attainment* (Pencapaian tujuan) sistem harus mempunyai tujuan karena tujuan itu pada akhirnya inheren dan menjadi sistem kepribadiannya, *Ketiga Integration* (Integrasi) Sistem harus mampu berintegrasi dengan mengatur unsur-unsur yang ada sehingga terjadi proses interaksi dengan baik maka dibutuhkan koordinasi yang baik antar unsur-unsur yang ada dan *Keempat Latency* (pemeliharaan pola) Sistem berusaha untuk melestarikan pola atau karakter yang telah terbentuk dalam sistem itu sehingga karakter tersebut mampu bertahan dan dapat berjalan establis.²⁸

Karena penelitian ini dalam skala makro, maka tujuan analisisnya adalah mencari hukum-hukum universal (*generalisasi*) dan bukan untuk menelusuri keunikan (*partikularitas*) fenomena, sehingga unit analisisnya berupa sistem pendidikan, bukan individu tetapi kelompok tujuannya adalah mencari equilibrium atau stabilitas. Suatu sistem atau subsistem akan berfungsi bila punya kemampuan untuk bersdaptasi, berintegrasi dan memelihara pola prilaku yang dikembangkan, hal ini dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sehingga tujuan itu dicapai ketika sub-sub sistem

²⁸ Georgr Ritzer-Duglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, alih bahasa Alimanudin, edisi 6, (Jakarta: Kencana Pradana Media Grup. 2004). hal. 130-133

tersebut mempunyai fungsi, bila terjadi salah satu tidak berfungsi maka sistem itu akan terganggu kinerjanya.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini dibagi menjadi dua metode, *pertama* Eksistensi pendidikan Islam dikaji menggunakan metode penelitian sejarah untuk mengetahui eksistensi pendidikan Islam dalam perspektif sejarah dengan menggunakan pendekatan sejarah konstitusional dengan menggunakan *contens analisis* (analisis isi). Untuk mengkaji Fungsi pendidikan Islam menggunakan pendekatan sosiologis dengan menggunakan analisa teori structural fungsional .

1. Pendekatan

Dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatanyaitu :

- a. ***Pendekatan Historis sosiologis***, lebih spesifiknya adalah *Pendekatan Sejarah konstitusional* yaitu pendekatan sejarah pendidikan Islam dalam perspektif undang-undang. dengan menggali sumber sejarah yang berhubungan dengan konstitusi, dengan metode *content analisis* yaitu dengan menganalisa isi dari undang-undang dan kebijakan pemerintah sehingga dapat diketahui filsafat hidup, dasar pemikiran pembangunan bangsa dalam pendidikan, serta sistem pendidikan yang digunakan. Termasuk pendekatan konstitusional

adalah membicarakan Undang-undang, Tap MPR, Peraturan Pemerintah, Keputusan pemerintah dan lainnya.²⁹

Disamping itu digunakan analisa konsep yaitu analisa kalimat atau istilah - istilah yang memiliki gagasan atau konsep.³⁰ Analisa ini digunakan dalam rangka mengadakan pendalaman dan penjabaran *Interpretatif normatif* terhadap pokok-pokok pikiran yang ada dalam undang undang Sisdiknas sehingga diperoleh gambaran eksistensi dan fungsi pendidikan Islam dalam Unadang-undang sisdiknas

- b. *Pendekatan Sosiologis* pendekatan ini digunakan untuk mengetahui fungsi pendidikan Islam dengan menggunakan teori fungsional setruktural untuk menganalisis apakah pendidikan Islam secara factual fungsional atau tidak. Menurut sosiologi pendidikan bahwa pendidikan adalah fakta sosial maka sosiologi pendidikan juga menganalisa pola interaksi antara sekolah dengan kelompok sosial lain dalam masyarakat.³¹

2. Tekhnis pengumpulan Sumber

Sumber untuk mengetahui eksistensi pendidikan Islam dalam perspektif undang-undang dengan kajian pustaka, yang sumbernya berupa bahan-bahan kepustakaan, baik bahan-bahan kepustakaan yang termasuk sumber primer (Undang Undang sistem pendidikan Nasional dan Peraturan

²⁹ Kuntowijoyo. *Metedolog...* hal. 178.

³⁰ Imam Barnadib. *Filsafat Pendidikan, Sistem dan Metode*. (Yogyakarta: Andi Offset, 1994), hal. 90.

³¹ Zaenudin. *Reformas...* hal. 25.

Pemerintah), sumber sekunder (karya-karya yang membahas pendidikan Islam kaitannya dengan perundang undangan dan peraturan pemerintah). Dalam mengumpulkan sumber, digunakan metode kepustakaan dengan menghimpun bahan-bahan pustaka yang relevan dengan pokok bahasan, tahap menghimpun bahan-bahan pustaka ini adalah proses “*Bibliografi Kerja* “.³² Tahap kedua adalah menelusuri sumber yang relevan kemudian diklasifikasikan secara sistematis, tahap ini disebut tahap “*Bibliografi Fungsional*”.

Sumber yang kedua adalah isu-isu yang berkembang dalam masyarakat atau fenomena yang terjadi, cakupan populasinya sangat luas dan tidak mungkin semua dijadikan sumber data sehingga diperlukan penarikan sampel yang mewakili yaitu dengan metode survey langsung dalam masyarakat. Dalam penelitian ini dibatasi pada fenomena yang melatarbelakangi lahirnya undang-undang no 20 tahun 2003 tentang sisdiknas dan isu yang berkembang dalam masyarakat dengan disahkannya undang-undang tersebut

3. Tekhnis pengolahan sumber dan analisa Sumber

Sumber yang ada diklasifikasikan menjadi dua bagian yaitu :

Pertama sumber yang berkaitan dengan pendidikan Islam di Indonesia dalam perspektif undang undang sumber ini digunakan untuk mengkaji eksistensi pendidikan Islam dalam perspektif undang-undanaag diantaranya dengan konten analisa yaitu menganalisa teks yang ada dalam undang-

³² Winarno Surachmad, *Peper Skripsi, Tesisi dan Disertasi: Cara Memecahkan , Cara Menulis dan Cara Meneliti*. (Bandung: Tarsito. 1971), hal. 50-51.

undang yang berhubungan erat dengan keberadaan pendidikan Islam baik sebagai lembaga, mata pelajaran maupun nilai-nilai.

Kedua sumber yang berhubungan dengan fungsi pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional, dengan melihat fenomena dalam masyarakat, fenomena tersebut diupayakan menemukan hubungan kausal dan atau korelasi antar fenomena, fenomena tidak didekati secara normatif melainkan secara kategori dengan tujuan membangun ilmu dan bukan tujuan praksis. Analisa struktural fungsional berusaha menemukan hukum-hukum universal (*generalisasi*), bukan partikularitas maka metode survey menjadi penting untuk menemukan fenomena atau isu general yang terjadi dalam masyarakat

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bab satu Pendahuluan sebagai gambaran utuh tesis yang meliputi; Latar belakang masalah, dari latar belakang tersebut dapat dirumuskan masalah, Tujuan penelitian, kerangka teori, Metode penelitian dan sistematika pembahasan

Bab dua mengkaji teori yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu tentang fungsi meliputi fungsi sosial pendidikan, fungsi sosial agama, teori fungsional dalam pendidikan, kemudian sistem meliputi sistem pendidikan nasional dan sistem pendidikan Islam dan pendidikan Islam meliputi, pengertian pendidikan Islam, tujuan pendidikan Islam, dasar-dasar

pelaksanaan pendidikan Islam dan fungsi pendidikan Islam sebagai lembaga, sebagai mata pelajaran dan nilai

Bab tiga tentang Analisa Pendidikan Islam dalam perspektif undang-undang meliputi ; Sejarah dan latar belakang lahirnya UUSPN, Pendidikan Islam sebagai lembaga, sebagai mata pelajaran dan nilai

Bab empat tentang Analisa Fungsi Pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional meliputi fungsi pendidikan Islam sebagai lembaga, Pendidikan Islam sebagai mata pelajaran dan pendidikan Islam sebagai nilai

Bab lima Penutup yang meliputi Kesimpulan dan Saran



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB II

FUNGSI, SISTEM DAN PENDIDIKAN ISLAM

A. Fungsi

Fungsi berasal dari bahasa Inggris *Function*, menurut kamus bahasa Inggris-Indonesia artinya adalah kegunaan, pekerjaan³³ Sebuah Fungsi adalah kumpulan ke arah pemenuhan kebutuhan tertentu atau kebutuhan sistem,³⁴ sesuatu dikatakan berfungsi bila dapat memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan atau kebutuhan yang diharapkan oleh unsur-unsur yang ada dalam sebuah sistem

1) Fungsi pendidikan

Fungsi Pendidikan menurut **Durkhem** adalah alat untuk mengembangkan kesadaran diri sendiri dan kesadaran sosial menjadi suatu panduan yang stabil, disiplin dan utuh secara bermakna.³⁵

Pendidikan merupakan fakta sosial yang tidak terbantahkan., Dalam kelompok manapun terjadi proses pendidikan terlebih dalam masyarakat modern pendidikan menjadi faktor penting yang dapat mensejahterakan manusia, dengan pendidikan manusia mempersiapkan dirinya untuk menghadapi kehidupan karena pendidikan merupakan kegiatan untuk

³³ Jhon M. Echilis dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, cetakan ke 24. (Jakarta: Gramedia. 2000), hal. 260.

³⁴ George Ritser, *Sosiologi*, hal. 121.

³⁵ Sanapiah Faisal, *Sociologi Pendidikan*, (Surabaya: Usaha Nasional, t.t.), hal. 27-28.

2) Fungsi Agama

Fungsi sosial agama menurut Durkheim adalah mendukung dan melestarikan masyarakat yang telah ada, masyarakat yang ada adalah masyarakat yang mempunyai nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan dipegang sebagai pedoman hidupnya sehingga agama berfungsi sebagai persatuan dan solidaritas sosial. Pendapat *Yinger* yang paling penting adalah bahwa semua orang memerlukan nilai-nilai mutlak untuk pegangan hidupnya dan nilai-nilai itu merupakan jawaban terhadap persoalan-persoalan terakhir mengenai hidup dan mati. Agama dapat memberikan jawaban terhadap hidup dan mati sementara pengetahuan empiric dan perkembangan sains dan teknologi tidak dapat menjawabnya.

Yinger dalam bukunya *Sociology Looks at Religion* senada dengan pendapat Durkheim mengamati sifat-sifat khas yang dimiliki oleh kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Dengan berpegang kepada kepercayaan dan sifat-sifat khas tersebut menumbuhkan berbagai kepuasan karena memberi bobot lebih besar kepada individu-individu yang mengikutinya. *Berger* dalam bukunya *The Social Reality of Religion* dan *Luckmann* dalam bukunya *The Invisible Religion* bahwa manusia, karena kecerdasan, sifat sosial dan kemampuannya menggunakan bahasa, tidak pernah puas dengan pengalaman kasar, melainkan berusaha menemukan

"sistem makna" daripadanya .Sistem makna tergantung pada struktur rasionalitasnya.³⁷

Dari pendapat beberapa tokoh tersebut dapat diambil pemahaman bahwa fungsi agama adalah melestarikan tradisi masyarakat yang telah berlangsung dengan potensi kemanusiaan ingin memiliki atau menemukan makna dalam kehidupan, sehingga mempunyai tujuan hidup yang ingin dicapai.

3) Teori Fungsional dalam pendidikan

Struktural fungsional mengarahkan fokus kajian pendidikan terhadap urusan nilai-nilai dan budaya, sosialisasi, stratifikasi, perubahan, pelembagaan, konflik dan kohesi sosial, aksi dan interaksi serta pola-pola relasi, idialnya dituangkan dalam kurikulum formal namun dalam prakteknya sering dilakukan dengan cara indoktrinasi nilai dan norma masyarakat. Dengan demikian pendidikan diperankan sebagai penjaga nilai-nilai sosial dan institusi penegak tertib sosial³⁸

Pendidikan adalah fakta sosial yaitu sesuatu yang berbeda dengan ide, diluar perasaan, susana psikologis, serta pikiran individu. Saling ketergantungan dalam etintas kelompok bukan individu. Sistem Pendidikan harus turut serta dalam mempertahankan tertib dan kohesi sosial diantara elemen-elemen masyarakat. Perspektif ini pada dasarnya untuk mencapai ekuilibrium atau keseimbangan. Dalam sistem pendidikan

³⁷ Betty R Scharf, *The Sociological Study or Reieigion, (Sosiologi Agama)*, alih bahasa Machnun Husain, (Jakarta: Pranada Media, 2004), Hal. 107-115.

³⁸ Zaenudin Maliki, *Sosiolog..*, Hal. 44.

Islampun harus diupayakan harmoni, masing –masing elemen menjalankan fungsi menjalankan peran dan masing-masing memberi sumbangan untuk terciptanya harmoni dalam sistem pendidikan, diantaranya dengan menumbuhkan sistem kontrol untuk menciptakan stabilitas.

Cakupan penelitian ini skala makro, tujuan analisisnya adalah mencari hukum-hukum universal (*generalisasi*) dan bukan untuk menelusuri keunikan (*partikularitas*) fenomena, sehingga unit analisisnya berupa sistem pendidikan, bukan individu tetapi kelompok tujuannya adalah mencari equilibrium atau stabilitas.

Teori Fungsional Talcott Parsons menyatakan bahwa suatu sistem dikatakan berfungsi apabila memenuhi empat fungsi penting yang dikenal dengan AGIL, antara lain :

- a. *Adaptation* (adaptasi) yaitu sistem harus menyesuaikan diri dengan lingkungan, sistem dapat beradaptasi dengan lingkungannya yang menjamin kelangsungan hidup masyarakat tersebut lebih lama, *Organisasi Perilaku* adalah sistem tindakan yang melaksanakan fungsi Adaptasi dengan menyesuaikan diri dengan dan mengubah lingkungan eksternal.
- b. *Goal Attainment* (Pencapaian tujuan) Sebuah sistem harus mendefinisikan pencapaian tujuannya, *Sistem Kepribadian* melaksanakan fungsi pencapaian tujuan dengan menetapkan tujuan sistem dan memobilisasi sumber daya yang ada untuk mencapainya.

- c. *Integration* (Integrasi) sistem harus mengatur hubungan antar bagian-bagiannya, Sistem harus mengatur hubungan ketiga fungsi penting lainnya. *Sistem Sosial* menanggulangi fungsi integrasi dengan mengendalikan bagian-bagian yang menjadi komponennya. dalam sistem sosial ini ada aktor sistem sosial yang menjadi penting bagi persons adalah proses Internalisasi dan sosialisasi, yaitu bagaimana caranya mengalihkan norma dan nilai sistem social kepada actor didalam sistem social itu dengan tujuan norma dan nilai sistem social ini menjadi bagian kesadaran actor yang pada akhirnya actor mengabdikan dirinya kepada kepentingan sistem sebagai satu kesatuan., Norma dan nilai yang dipelajari ketika masa kanak-kanak cenderung tidak berubah dan dengan sedikit penguatan cenderung berlaku seumur hidup. Akhirnya persons berkesimpulan terpenting-pentingnya struktur lebih penting kultur bagi sistem sosial, sehingga sistem kultur berada dipuncak tindakan sistem tindakan persons.
- d. *Latency* (pemeliharaan pola) sistem harus melengkapi, memelihara dan memperbaiki baik motivasi maupun pola-pola kultur lainnya, *Sistem Kultur* melaksanakan fungsi pemeliharaan pola dengan mengendalikan actor seperangkat norma yang memotivasi mereka untuk bertindak. Kultur sebagai kekuatan utama yang mengikuti berbagai unsur dunia social, kultur menengahi interaksi antar actor, menginteraksikan kepribadian, menyatukan sistem social. Dalam sistem sosial, sistem

diwujudkan dalam norma dan nilai dan dalam sistem kepribadian diinternalisasikan oleh actor.

Inti pemikiran Persons ditentukan dalam empat sistem tindakannya dengan skema :

I	L
Sistem Kultural	Sistem Sosial
Organisme Prilaku	Sistem Kepribadian
A	G

Gambar 2.1 : Empat sistem tindakan

Perubahan dan dinamisasi menurut Persons adalah perubahan social dibentuk oleh biologi dengan mengemukakan “*perubahan paradigma evolusioner*” Komponen utamanya adalah “deferensiasi” Masyarakat tersusun dari sekumpulan subsistem yang berbeda berdasarkan strukturnya maupun berdasarkan makna fungsionalnya bagi masyarakat yang lebih luas, ketika masyarakat berubah sistem baru terdeferensiasi, subsistem baru itu dituntut lebih berkemampuan menyesuaikan diri dibanding sistem yang lama jadi aspek utamanya adalah kemampuan menyesuaikan diri.³⁹

³⁹ George Ritzer, *Sosiologi*, hal. 133.

Karena proses deferensiasi menghasilkan sistem yang makin berkembang dan seimbang, setiap instruktur yang baru terdeferensiasi tentu menyesuaikan kapasitas menyesuaikan diri yang meningkat untuk melaksanakan fungsi oleh struktur yang lebih menyebar sebelumnya, proses ini dapat dikatakan sebagai aspek peningkatan kemampuan menyesuaikan diri dari lingkungan evolusinya

Proses deferensiasi menimbulkan sekumpulan masalah integrasi baru bagi masyarakat, ketika subsistem-subsistem berkembang biak masyarakat berhadapan dengan masalah-masalah yang baru mengkoordinasikan operasi unut-unit yang baru yang baru muncul itu. Masyarakat yang mengalami evolusi tentu akan berubah dari sistem yang askripsi ke sistem berdasarkan prestasi.

Sistem nilai dari masyarakat sebagai satu kesatuan pasti mengalami perubahan serentak dengan perubahan struktur dan fungsi sosial yang tumbuh semakin terdeferensiasi, tetapi sistem baru itu semakin bervariasi maka semakin sulit bagi sistem nilai untuk mencakupnya, sehingga dibutuhkan sistem nilai yang dapat menggariskan ketentuan-ketentuan umum pada tingkat yang lebih tinggi untuk melegitimasi keanekaragaman tujuan dan fungsi yang semakin luas dari sub unit masyarakat. Menurut Parsons evolusi masyarakat dengan bertahap tetapi menghindari dari evolusi menurut garis lurus.⁴⁰

Sistem pendidikan nasional merupakan tatanan yang berada dalam sistem sosial masyarakat, subsistem pendidikan nasional diantaranya adalah pendidikan Islam, mempunyai nilai-nilai yang harus diinternalisasikan dalam setiap aktor sehingga secara sadar melekat dalam dirinya, agar sistem tersebut berfungsi maka harus bisa beradaptasi, mempunyai tujuan, integrasi nilai dan pemeliharaan pola, demikian juga dengan pendidikan

⁴⁰ Georg Ritzer-Duglas J. Goodman, *Teori*, hal. 115-135.

Islam tidak lepas dari sistem pendidikan nasional yang harus mempunyai kemampuan empat fungsi sistem tersebut.

B. Sistem

Sistem bersal dari bahasa *Yunani*, *system* yang berarti hubungan fungsional yang teratur antar unit-unit atau komponen-komponen.⁴¹ Dengan demikian sistem berarti himpunan komponen-komponen yang saling terkait yang berfungsi untuk mencapai suatu tujuan.

Sistem terdiri atas bagian-bagian (dapat disebut subsisten atau komponen) yang masing-masing mempunyai fungsi tertentu dalam bagian itu, terdapat interrelasi, interaksi dan interdependensi dalam menuju suatu tujuan, sehingga jika salah satu bagian tidak berfungsi, keseluruhan sistem akan terganggu kerjanya.⁴²

Sistem merupakan kebulatan dan keseluruhan mengandung makna atau sifat (*Wolism*), maksudnya adalah sistem merupakan satu-kesatuan yang bulat bukan hanya sekedar kumpulan dari bagian-bagiannya. Satu prinsip dari sistem pendidikan Islam adalah dengan menggunakan metode pendekatan holistik, menyeluruh bagi manusia yang meliputi dimensi jasmani dan ruhani dan sesuai dengan fitrahnya yang meliputi semua aspek kehidupan manusia baik yang dapat dijangkau oleh akal maupun yang hanya dapat dijangkau oleh hati.

⁴¹ Tohari Musnamar, *Bimbingan dan Wawanwuruk Sebagai Suatu System*, (Yogyakarta: Cendia Sarana Informatik, 1985), Hal 38.

⁴² Sunarwan, *Pendekatan System Dalam Pendidikan*, (Surakarta: Sebelas Maret University Pers, 2001), hal. 4.

Pada umumnya ciri-ciri suatu sistem adalah bertujuan mempunyai batas, terbuka, tersusun dari subsistem ada saling keterkaitan atau saling ketergantungan, merupakan satu kebulatan yang utuh, melakukan kegiatan transformasi, ada mekanisme kontrol ada kemampuan untuk mengatur dan menyesuaikan dirinya sendiri.⁴³ Sistem terbuka adalah sistem yang berhubungan dengan lingkungannya, komponen-komponennya dibiarkan mengadakan hubungan keluar dari batas sistem, sedangkan sistem tertutup adalah sistem yang terisolasi dari segala pengaruh diluar sistem itu sendiri, dari pengaruh sistem yang lebih besar atau lebih luas atau dari lingkungannya. Baik sistem terbuka maupun sistem tertutup dimungkinkan mempunyai komponen statis dan komponen dinamis⁴⁴.

Pendidikan Islam sebagai subsistem pendidikan nasional merupakan sistem yang dinamis karena terdapat interrelasi, interaksi dan interpendensi menuju tujuan yang sama, bila pendidikan Islam tidak berfungsi maksimal maka secara keseluruhan sistem pendidikan nasional akan terganggu kerjanya.

Pada kenyataannya tidak ada sistem yang benar-benar tertutup, mengingat komponen-komponennya selalu dipengaruhi berbagai kekuatan yang berada di lingkungannya, karena itulah maka sistem pada dasarnya bersifat terbuka maka keterbukaan merupakan ciri khas sistem. Lingkungan menjadi input dari sistem disamping itu lingkungan menjadi pemakai keluaran sistem.⁴⁵ Sistem

⁴³ Ridwan Nasir, *Mencari Format Pendidikan Islam Ideal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hal. 27-28.

⁴⁴ Sunarwan, *Pendekatan*, hal. 19.

⁴⁵ Ridwan Nasir, *Mencari*, hal. 31.

yang terbuka pada dasarnya lebih mampu merespon secara selektif terhadap lingkungan yang lebih luas dan bervariasi. Sistem mekanik cenderung tertutup sedangkan sistem organik cenderung terbuka. Sistem sosiokultur adalah yang paling terbuka⁴⁶ Sistem pendidikan merupakan jenis sistem mekanik yang telah terseruktur dan mengfungsikan bagian-bagian dengan baik. Jadi lingkungan merupakan sumber bahan yang akan dipergunakan oleh sistem disamping itu juga menjadi pemakai hasil keluaran sistem. Sesuai dengan dinamika perkembangan sistem pendidikan itu selalu dikonsepsikan-ulang dan diinterpretasikan kembali pada setiap periode historis ruhaniah dan pada setiap orde politik tertentu.⁴⁷

Dalam sebuah sistem dibutuhkan unsur-unsur dalam persepsi dan pemahaman untuk menuju sebuah kesatuan komitmen sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka koordinasi dan pengorganisasian menjadi penting perannya dalam sistem mekanik yang telah terseruktur dan melembaga.

Pendidikan yang diharapkan adalah pendidikan yang teratur, rapi, berdaya guna dan berhasil guna, maka pendidikan Islam di negeri kita pun perlu diorganisasikan dan di kelola secara rapi, efektif dan efisien melalui sistem dan metode yang tepat guna dan berhasil guna pula. Sejalan dengan pola pikir tersebut di atas, GBHN terutama TAP/MPR/11/1988, telah menetapkan bahwa manusia Indonesia yang berkualitas tinggi melalui berbagai bidang

⁴⁶ George Ritzer dan Douglas, *Teori*, hal .239-240.

⁴⁷ Kartini Karto, *Tinjauan Politik Mengenai Sistem Pendidikan Nasional* , (Jakarta: Pradnya Pramita 1977), hal 13.

pembangunan yang salah satu sektornya adalah pendidikan sistem dan metode pendidikan Islam yang seharusnya.

1. Sistem adalah suatu keseluruhan yang terdiri dari komponen-komponen yang masing-masing bekerja sendiri dalam fungsinya. Karena itu sistem pendidikan adalah satu keseluruhan yang terpadu dari semua satuan dan kegiatan pendidikan yang berkaitan satu dengan yang lainnya untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan.
2. Faktor atau unsur yang di sistematisasikan adalah proses kegiatan kependidikan dalam upaya mencapai tujuannya. Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui proses kegiatan bimbingan, pengajaran dan/atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang.⁴⁸

Sistem pendidikan Islam secara makro merupakan pengorganisasian proses kegiatan kependidikan yang berdasarkan ajaran Islam dan pendekatan sistematis, sehingga dalam pelaksanaan operasionalnya terdiri dari berbagai sub sistem dari jenjang pendidikan prasekolah, dasar, menengah atau perguruan tinggi yang memiliki vertikalitas dalam kualitas ilmu pengetahuan dan teknologian yang makin optimal, setiap tingkat, keimanan dan ketaqwaan, Allah akan meninggikan derajat lebih tinggi orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Dari keterangan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, Sedangkan

⁴⁸ Dilema Pendidikan Islam di Indonesia :<http://wydpress.wordpress.com/> 10 f 2008 pada 6:11 am (Pendidikan Islam) Tags: Pendidikan

sistem Pendidikan Islam adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan Islam.

C. Pendidikan Islam

1. Pengertian Pendidikan Islam

Ahmad D. Marimba mengajukan definisi pendidikan sebagai berikut :

“Pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani si terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama”.⁴⁹

DR. Ali Asraf dalam bukunya “*Crisis in muslim Education*” (Krisis dalam pendidikan Islam) Pendidikan Islam adalah :

“pendidikan yang melatih sensibilitas murid-murid sedemikian rupa, sehingga dalam perilaku mereka terhadap kehidupan, langkah-langkah dan keputusan begitupula terhadap pendekatan terhadap semua ilmu pengetahuan mereka diatur oleh nilai-nilai etika Islam yang sangat dalam dirasakan.”⁵⁰

Dari keterangan diatas dapat diambil pengertian bahwa Pendidikan Islam merupakan usaha terencana untuk menumbuhkan, mengembangkan sifat-sifat dasar fitrah manusia dengan ilmu pengetahuan disertai dengan penanaman nilai-nilai etika Islam. Usaha merealisasikan pendidikan tersebut dalam konteks keIndonesiaan tidak dapat lepas dari sistem pendidikan yang dipakai di Indonesia yang kita kenal dengan sistem

⁴⁹ A.D. Marimba, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Bandung : Alma'arif, 1980), cet ke-4. hal. 19

⁵⁰ Ali Asraf, *Horison Baru pendidikan Islam* (Jakarta;Pustaka Firdaus 1984)..hal 23.

pendidikan nasional, dimana sistem tersebut berlaku secara menyeluruh di Indonesia.

2. Tujuan Pendidikan Islam

Tujuan pendidikan Islam tidak akan pernah lepas dari nilai-nilai Islam karena pada dasarnya nilai-nilai itulah yang khaq dan akan dituju, tetapi butuh sebuah pemahaman konsep tentang tujuan pendidikan Islam tersebut.

Tujuan pendidikan merupakan masalah inti dalam pendidikan, dan saripati dari seluruh renungan pedagogik. Pentahapan tujuan dalam pendidikan Islam

a. Tujuan tertinggi atau terakhir

Tujuan ini bersifat mutlak dan tidak berubah karena sesuai dengan konsep ilahiyah yang mengandung kebenaran mutlak dan universal, tujuan ini pada dasarnya sesuai dengan tujuan hidup manusia yang *pertama* yaitu menjadi manusia yang bertaqwa tujuan ini semata-mata sama dengan tugas penciptaan manusia yaitu beribadah kepadaNya (Q.S Az Zariyat 56). Tidak ada perbedaan dalam ibadah karena pada dasarnya esensi ibadah adalah pendekatan diri kepada Allah dan kata kunci perbuatan ibadah adalah niat dan I'tikad (Q.S Al Anam 162). *Kedua* Mengantar anak didik menjadi *Kholfatullah fil ardl* (wakil Tuhan dimuka Bumi), yang mampu mainakmurkannya dan membudayakan alam sekitar yang mampu menata alam berdasar nilai-nilai insaniyah dan ilahiyah. *Ketiga* Memperoleh kebahagiaan dan

kesejahteraan di dunia dan di akherat tujuan ini merupakan cita-cita setiap muslim. Tujuan tertinggi ini menjadi tataran konsep ideal sekaligus menjadi motivator dan memberikan makna teologis dalam pendidikan.

b. Tujuan Umum

Tujuan umum memberikan arah yang pencapaiannya dapat diukur karena menyangkut perubahan sikap, prilaku dan kepribadian subjek didik, sehingga mampu menghadirkan dirinya sebagai subjek yang utuh. Tujuan umum ini dalam rangka “*self realization*” atau realisasi diri seperti yang tertuang dalam konferensi pendidikan Islam pertama di Mekah:

“pendidikan harus diarahkan mencapai pertumbuhan keseimbangan kepribadian manusia menyeluruh, melalui latihan jiwa, intelek, rasio, perasaan, dan penghayatan. Karena itu pendidikan harus mempersiapkan pertumbuhan manusia dalam segala aspeknya spiritual, intelektual, imajinatif, jasmani, ilmiah, linguistik, baik individu maupun kolektif dan mendorong kesemuanya itu untuk mencapai kebaikan dan kesempurnaan semua itu didasari motivasi ibadah karena tujuan akhir pendidikan muslim terletak pada merealisasikan pengabdian dan kemanusiaan.”⁵¹

Tujuan umum adalah tujuan yang akan dicapai dalam kegiatan pendidikan, baik dengan pengajaran maupun dengan cara yang lain, meliputi semua aspek kemanusiaan yang meliputi, sikap, tingkah laku, penampilan, kebiasaan dan pandangan. Tujuan umum pendidikan Islam harus selalu dikaitkan dengan tujuan pendidikan nasional negara

⁵¹ Ali Asraf, *Horison*., hlm 107.

tempat pendidikan Islam itu dilaksanakan dan harus selalu dikaitkan dengan institusi atau lembaga yang menyelenggarakan pendidikan.⁵²

c. Tujuan Khusus

Tujuan ini bersifat operasional dan relatif, sehingga setiap saat dapat berubah-ubah sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan, pengkhususan tujuan itu didasarkan kepada :

- 1) Kultur dan cita-cita bangsa dimana pendidikan diselenggarakan
- 2) Minat, bakat dan kesanggupan subyek didik
- 3) Tuntutan situasi dan kondisi pada kurun waktu tertentu.⁵³

Dalam pandangan umum tujuan pendidikan Islam adalah menuju manusia yang bertaqwa dan berkeadilan, Allah memerintahkan manusia untuk dapat hidup dengan penuh ketaatan dan ketaqwaan kepada-Nya, Taqwa yaitu menjalankan perintahnya berbasis dari amalan-amalan primer (*fadhail*) dan menjauhi larangannya. Amalan yang dilakukan oleh manusia berbasis pada ilmu yang dimilikinya, dengan demikian posisi ilmu dalam aqidah Islamiyah menjadi sangat integral karena tidak ada ketaqwaan yang khaqiqi jika tidak ada ilmu. Keadilan adalah manusia yang mengetahui posisi dirinya sendiri dan segala wujud yang ada dalam tatanan tingkat wujud.

Manusia yang beradab adalah manusia yang mampu memposisikan diri sendiri dalam suatu sistem yang terdiri dari tingkatan (*maqamat*) dan level (*maratib*) , seseorang yang telah memahami menyadari dan mengerti akan

⁵² Zakiah Darajat, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi aksara, 2006), hal. 30.

⁵³ Ahmadi, *Idiologi Pendidikan Islam*; (Yogyakarta ; Pustaka pelajar 2007) hlm. 90-103.

posisinya dalam tingkatan alam semesta ini, akan sampai pada pemahaman posisinya sebagai seorang hamba Tuhan dan Tuhan sebagai tuannya. Oleh karena itulah orang yang berilmu dan beradab akan mengerti dan menyadari kekuasaan ketuhanan dan posisinya (*Rubbubiyyah*) serta keahliannya kepadanya (*Ubudiyyah*)⁵⁴

Menurut Zakiah Darajat tujuan operasional ini adalah tujuan-tujuan praktis yang akan dicapai dengan sejumlah kegiatan pendidikan tertentu yaitu suatu unit kegiatan pendidikan dengan bahan-bahan yang sudah dipersiapkan dan diperkirakan akan mencapai tujuan tertentu.⁵⁵

3. Dasar Pelaksanaan Pendidikan Islam

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum dan bukan negara yang berdasarkan pada agama.⁵⁶ Dasar-Dasar pelaksanaan menjadi penting mengingat Pendidikan Islam bukan hanya sebagai mata pelajaran di sekolah umum yang wajib diajarkan akan tetapi pendidikan Islam sebagai lembaga sudah begitu mengakar dalam masyarakat Indonesia. Ada beberapa aspek yang mendasari pendidikan Islam dapat dilaksanakan baik sebagai nilai-nilai mata pelajaran maupun sebagai lembaga pendidikan antara lain :

a. Aspek Yuridis

Dasar Yuridis adalah dasar pelaksanaan pendidikan agama yang berasal dari peraturan perundang-undangan atau peraturan pemerintah yang secara langsung atau tidak langsung dapat dijadikan pegangan

⁵⁴ Ismail Fajrie Alattas, *Risalah Konsep Ilmu dalam Islam*, (Jakarta: Diwan, 2006), hlm. 262-263.

⁵⁵ *Ibid.*, hal 32

⁵⁶ Habib Toha dan Abdul Mu'ti, *Proses*, hlm. 31.

dalam melaksanakan pendidikan agama, disekolah-sekolah atau lembaga-lembaga pendidikan formal, Pendidikan Islam merupakan bagian dari pendidikan secara umum.

1) Dasar Ideal

Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia mengandung makna bahwa segala peraturan yang diberlakukan di Republik ini tidak bertentangan dengan pancasila karena pancasila merupakan sendi-sendi kehidupan bangsa. Sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung pengertian bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragama dan percaya akan keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa menuntut adanya pemahaman akan kehendaknya, untuk memahami kehendaknya itu diperlukan pendidikan agama dengan kata lain tanpa pendidikan agama akan sulit untuk merealisasikan sila pertama dalam pancasila tersebut.⁵⁷

2) Dasar Konstitusional

a) UUD Negara RI Tahun 45

Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 45 dalam BAB XI pasal 29 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa :

Ayat (1) Negara berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa
Ayat (2) Negara menjamin tiap-tiap penduduk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut Agama dan Kepercayaan Masing-Masing.⁵⁸

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 20

⁵⁸ UUD 45 Pasal 29 ayat 1 dan 2.

Dari Undang-undang tersebut mengandung pengertian sejalan dengan Pancasila bahwa keberagamaan seseorang dijamin dalam Undang-Undang termasuk menjalankan keagamaannya, keberlangsungan keagamaan dilakukan lewat pendidikan.

b) Undang-Undang Tentang Pendidikan

Undang-Undang yang mengatur tentang Pendidikan Nasional yang berlaku di Negara Republik Indonesia ada 3 yaitu :

- (1) UU No 4 Tahun 1950 Tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran Di Sekolah untuk seluruh Indonesia.
- (2) UU No 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- (3) UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem pendidikan Nasional

3) Dasar Operasional

Dasar operasional adalah dasar yang mengatur secara operasional bagaimana pelaksanaan undang-undang yang disahkan itu di lembaga-lembaga pendidikan yang ada, dalam hal ini adalah peraturan pemerintah atau peraturan menteri. Pada masa otonomi daerah keputusan yang dibuat oleh pemerintah daerah atau yang dikenal dengan peraturan daerah (PERDA)⁵⁹ juga menjadi landasan operasional pelaksanaan di suatu daerah.

⁵⁹ Perda adalah: Peraturan daerah yang dibuat oleh kepala daerah bersama-sama dengan DPRD.

b. Aspek Normatif

Yang dimaksud dasar normatif adalah dasar yang bersumber dari ajaran Agama Islam yang tertera dalam al Qur'an dan nabi Muhammad adalah sumber aslinya⁶⁰, melaksanakan pendidikan agama merupakan perintah dari Tuhan dan merupakan ibadah kepada-Nya.

Allah memerintah kepada hamba-Nya untuk mendidik dirinya dan keluarganya agar terhindar dari api neraka (Qs At Tahrim ayat 6), dengan pendidikan manusia dapat memahami ajaran, perintah maupun larangan Allah. manusia supaya selamat dan bahagia dunia dan akhirat harus menggunakan jasmani, akal, nafsu dan hati nurani seharusnya focus oriented ke jalan Allah semata.⁶¹ menurut Muhaimin, dipandang sudah representatif dalam mengkaji dan memahami proses kejadian manusia dalam Al Qur'an.⁶²

Wahyu pertama kali turun adalah perintah membaca mengandung maksud bahwa manusia punya potensi yang besar untuk belajar karena fitrah manusia didesain oleh Allah untuk itu (Q.S al Alaq 1-5). Perintah itu didahului dengan rasa taqorub kepada Allah sebagai zat yang maha kuasa atas manusia kemudian Allah menjelaskan agar tentang asal-usul manusia diciptakan, dengan melihat asal-usulnya itu diharapkan manusia sadar akan keberadaannya dengan potensi kekholidahann yang

⁶⁰ Sutrisno, Izzati Ratuman, *Kajian terhadap Metode, Epistemology dan Sistem Pendidikan*, (Jogja: Pustaka pelajar, 2006), hlm. 4.

⁶¹ Hery Jauhari Muchtar, *Fiqh Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosda Karya, t.t.), hal. 7 – 11.

⁶² Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Islam: Upaya Mengefektifkan Pendidikan Sekolah*, cet. II, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hal. 3

diberikan Allah menimbulkan ketundukan kepadaNya. Tugas manusia sebagai *kholifatullah* dimaknai manusia wakil Tuhan dimuka bumi.⁶³

Ali Sariat dalam bukunya *Islam dan kemanusiaan* mengatakan bahwa *Insan* berbeda dengan *basyar* dalam konteks tanggung jawab lebih tepat sebagai insyan yaitu makhluk yang aneh penuh teka teki mempunyai karakteristik yang luar biasa yang bisa menyebabkan masing-masing anggota manusia mencapai tingkat kemanusiaan (*Insaniat*) tertentu. Insyan mempunyai tiga karakteristik 1. kesadaran diri⁶⁴ 2. kemampuan untuk memilih⁶⁵ 3. kemampuan untuk mencipta.⁶⁶ Apabila tiga karakteristik itu telah melekat dan inheren dalam manusia maka tidak ubahnya tingkat kekholidahan telah disandangnya⁶⁷

Hadis nabi yang menyatakan sampaikan olehmu walaupun satu ayat⁶⁸, ada kewajiban sosial yang harus ditunaikan bagi orang yang mempunyai ilmu pengetahuan kewajiban itu adalah mengajarkan ilmu yang dimiliki kepada orang lain. Hadist nabi riwayat Baihaqi

⁶³ Jamaludin Darwis, *Dinamika Pendidikan Islam*, (Jakarta: Rasail, 2006), hal. 55.

⁶⁴ Insan adalah makhluk yang sadar, yakni satu-satunya makhluk didunia yang mempunyai kesadaran diri. "merasa kualitas dan tabiat dirinya sendiri, merasa kualitas tabiat dab alam semesta, dan merasakan hubungan antara dirinya dengan alam semesta.

⁶⁵ Manusia adalah makhluk yang memilih, satu-satunya makhluk yang tidak saja mampu melawan tabiat dan hukum yang menguasainya, tetapi juga bisa memberontak terhadap kebutuhan-kebutuhan nuraninya, fisik dan psikologinya sendiri, ia dapat memilih sesuatu yang secara naluri tidak dibutuhkan dan tidak dipaksakan oleh fisik. Inilah aspek yang paling mulia dari insyaniat atau pmanusiaan.

⁶⁶ Manusia adalah makhluk yang dapat mencipta. Kreativitas manusia muncul ketika kebutuhan berubah sampai pada titik dimana apa yang mercka inginkan tidak ada lagi didunia ini, hlm ini mengindikasikan bahwa manusia adalah makhluk pencipta.

⁶⁷ Carles Kuzman, *Wacana Pemikiran Liberal*, (Jakarta: Paramadina, 2001), hal. 303.

⁶⁸ Imam Malik, *Al Muwatho'* Juz 2 (Libanon: Dar al fikrit .t.t), hal. 96.

mengatakan bahwa setiap anak dilahirkan suci, orang tuanyalah yang bertanggung jawab akan beragama apa selanjutnya. Menjadi urgen peran orang tua dalam mendidik anak khususnya dalam hal keimanan menjadi tanggung jawab orangtua apabila anak tidak dididik dan dikenalkan kepada sang pencipta yaitu Allah SWT. Salah satu konsep Islam adalah menetapkan Pendidikan berlangsung selama hidup (*long life education*).⁶⁹

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan hakekat pendidikan Islam adalah pendidikan yang berwawasan semesta, berwawasan kehidupan yang utuh dan multi dimensional, yang meliputi wawasan tentang Tuhan, manusia dan alam secara integratif.⁷⁰ Hakekat pendidikan Islam menurut Hasim Amir sebagaimana diikuti Malik Fajar juga berarti pendidikan yang idialistik, yakni pendidikan yang integralistik , humanistic, pragmatic dan berakar budaya kuat.⁷¹

c. Aspek Psikologis

Pada umumnya agama seseorang ditentukan oleh pendidikannya, pengalaman dan latihan-latihan yang dilalui sejak masa kecilnya.⁷² *Sigmun Freud* berpendapat bahwa : Anak-anak sejak kecil percaya kepada dzat yang maha kuasa, bahkan pada tahun-tahun awal dalam hidupnya punya anggapan orang taunya adalah TuhanNya karena orang

⁶⁹ Ismail Raji Al Faruqi : *Tauhid* (Bandung: Pustaka 1988). hal 104

⁷⁰ Malik Fajar, *Reorientasi Pendidikan Islam.*, (Jakarta, Fajar Dunia. 1988), hal. 34.

⁷¹ Jusuf Amir Faisal, *Reformasi Pendidikan Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hal.. 37

⁷² Zakiyah Darajat, *Ilmu Jiwa Agama*, (Jakarta: Bulan Bintang. 1979), hlm. 48.

tuannya yang melindungi, sumber kasih sayang, sumber keadilan, tempat mereka bergantung dan tempat meminta segala keinginannya, tetapi dalam perkembangannya anak semakin sadar ternyata orang tuanya mempunyai kelemahan-kelemahan bahkan sering membuat kesalahan-kesalahan maka timbullah keragu-raguan dalam jiwanya. Disinilah letak pentingnya orang tua dalam menyadarkan dan memberi pemahaman bahwa manusia adalah makhluk yang tidak pernah dapat lepas dari salah sedangkan Tuhan Allah adalah zat yang tidak pernah berbuat salah.

Doroty Wilsen mengemukakan pendapatnya berdasarkan penyelidikannya bahwa anak usia 3 tahun telah ada kesadaran akan adanya Tuhan, pada saat itu anak berada dalam Absolut Niveu dimana anak sadar akan adanya Tuhan Yang Maha Kuasa, Lingkungan hidupnya akan berpengaruh besar pada perkembangan jiwanya.

G.G Young berpendapat bahwa agama merupakan *naturaliter relegiosa* artinya bahwa dalam jiwa manusia sudah ada pembawaan beragama.

Zakiyah Darodjat mengatakan pengenalan Tuhan menurut dimulai dari bahasa, dari kata-kata orang yang ada dalam lingkungannya, yang pada awalnya diterima dengan acuh tak acuh, tetapi ketika orang dewasa merasa kagum dan takut kepada Tuhan mulailah ia merasa ragu tentang sesuatu yang gaib itu kemudian dia akan ikut membaca dan mengulang-ulang kata-kata yang diucapkan oleh orang-orang yang ada

dalam lingkungannya itu.⁷³ Anak pada usia 3 atau 4 tahun sudah mengenal Tuhan dengan bahasa maka selanjutnya dia akan banyak bertanya tentang Tuhan siapa yang membuat Alam dan sebagainya.⁷⁴ Pengenalan Tuhan pada anak dimulai dari pengaruh lingkungan, sejauh mana lingkungan memberikan pengalaman baik melalui perkataan, perbuatan, sikap, emosi atau ekspresi apapun tentang keberadaan Tuhan akan diserap langsung oleh seorang anak. Sekolah menjadi penting perannya dalam mengenalkan Tuhan mengingat sekolah merupakan sebuah lembaga yang didesain dengan terencana memberikan muatan-muatan tertentu.

Jean Piaget dalam teorinya “stadium perkembangan kognitif” menyatakan bahwa pada stadium operasional formal umur 11 tahun anak sudah dapat diajak untuk berfikir secara logis masalah abstrak dan menguji hipotesis secara sistematis, misalnya tentang eksistensi Tuhan.⁷⁵

Kebutuhan akan agama dengan merasakan akan kebutuhan dalam jiwanya selalu ada zat yang maha kuasa, tempat bergantung dan tempat memohon pertolongan, dalam hidup selalu ada yang diminta kenyataan ini menjadi sifat dasar manusia baik yang hidup pada masa primitif maupun pada masa modern. Kebutuhan akan ruhaninya yang

⁷³ *Ibid.*, hlm. 48.

⁷⁴ Habib Toha dan Abdul Mu'ti, *Proses.*, hlm. 30-32.

⁷⁵ Rita L. Atikson dan Richard C. Atiksen, Edward E. Smith, Derly J. Bem, *Introduction of psychology*, (Pengantar Psikologi) Jilid 1, alih bahasa Wijaya Kusuma. (Batam: Ineraksara t.t.), hlm. 146.

dapat menenangkan dikala sedang gundah gulana dan kegelisahan yang lainnya karena manusia diciptakan Allah dengan sifat berkeluh kesah.⁷⁶

A. Yusuf Ali dalam bukunya "*The Holy Qur'an* " tentang cahaya Allah menyatakan "*the human soul has five faculties or spirits*" mengandung tiga unsur antara lain; Pertama bersifat fisik yang dapat diketahui dengan panca indra, yaitu potensi sensual dengan melihat objek visual, Kedua "*the intellegential spirit*" suatu potensi yang bersifat abstrak yaitu suatu potensi untuk memahami sesuatu yang bersifat abstrak yaitu suatu potensi untuk memahami sesuatu secara rasional yang diresapi oleh jendela sensori, dan kemudian diproses dalam imajinasi yang bersumber pada kekuatan akal. Ketiga "*the transcendental prhopetic spirit*" suatu kemampuan untuk meyakini akan nilai nilai ketuhanan.⁷⁷

Manusia adalah makhluk yang mempunyai insting keberagamaan, insting keberagamaan itulah yang disebut dengan fitrah, al fitrah bersumber dari Allah dipandang dari sudut kapasitas hubungan dengan Allah, dari al fitrah inilah maka manusia tunduk sebagai Abdullah. Bila ditinjau dari bahasa al ftrah adalah suatu kecenderungan bawaan manusia.⁷⁸

⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 23.

⁷⁷ Abdurrahman Saleh. *Dinamika.* hlm. 59.

⁷⁸ Baharudin, *Paradigma Psikologi Islam*, (Jogjakarta: Pustaka pelajar, 2007), hal. 146-148.

d. Aspek Historis

Ditinjau dari sejarahnya, pendidikan Islam di Indonesia sudah berjalan sebelum republik ini ada, pendidikan Islam di Indonesia umurnya sebanding dengan masuknya Islam ke Indonesia. Islam mudah diterima karena ajarannya tidak memberatkan dan dapat berinteraksi dengan budaya setempat sehingga berkembang dengan pesat. Pertama Islam dianjurkan kepada raja-raja sesuai dengan perbuatan nabi dengan harapan bila rajanya telah memeluk Islam maka rakyatnya akan memeluk Islam pula, para pedagang pandai bergaul dengan penduduk negeri sehingga mereka disayangi dan dihormati oleh penduduk negeri.⁷⁹

Pada awal perkembangannya pendidikan Islam berlangsung secara informal, yang dipentingkan pada tahap awal adalah pengenalan nilai-nilai Islam, kemudian secara kelembagaan pendidikan Islam diawali di masjid-masjid dan surau-surau dan akhirnya berdiri pesantren-pesantren, meunasah, dayah, rangkang.⁸⁰

Pada masa penjajahan Belanda secara politis memojokkan pendidikan Islam. Disisi lain Belanda mempunyai kepentingan dalam menyebarkan agama Kristen (*missionarisasi*) maka tidak mengherankan apabila pendidikan Islam pada masa penjajahan Belanda secara politis dikebiri dan disingkirkan. akan tetapi justru ruh Islam yang melekat

⁷⁹ Muhammad Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1979), hal. 12.

⁸⁰ Haidar Putra Dauliy, *Pendidikan*, hlm.5.

dalam jiwa menjadi kekuatan moril yang ampuh dalam menentang kekuatan penjajah. Ajaran Islam yang *sufistik, egalitarian* (tidak membedakan diskriminasi kasta) sangat berbeda dengan misi belanda.⁸¹

Pada bulan Oktober 1945 para ulama jawa memproklamasikan *perang jihad fisabilillah* terhadap Belanda/Sekutu. Hal ini memberikan fatwa kepastian hukum terhadap perjuangan umat Islam.⁸²

Pada masa penjajah Jepang pendidikan Islam dibiarkan berjalan dengan politik balas budinya, Pendidikan Islam diharapkan menjadi elemen masyarakat yang mendukung pemerintah Jepang dalam usaha menguasai Asia raya,⁸³

Pada masa kemerdekaan persoalan agama yang selama ini terbengkalai termasuk pendidikan Islam mulai mendapat perhatian, bertepatan dengan berpindahnya pemerintahan RI dari Jakarta ke Yogyakarta diumumkan berdirinya Departemen Agama pada tanggal 13 Januari 1946.⁸⁴

Pada masa pemerintahan orde baru pendidikan Islam secara kuantitatif mengalami kemajuan akan tetapi pemberdayaan

⁸¹ Fak Tarbiyah IAIN Walisongo, *Paradikma*., hlm. 55.

⁸² Muhammad Yunus, *Sejarah*., hal. 153.

Isi Fatwa tersebut antara lain:

1. Kemerdekaan Indonesia (17-8-45) wajib dipertahankan
2. Pemerintah RI adalah pemerintah yang sah dan wajib dibela dan disklamatkan
3. Musuh/musuh RI Belanda/Sekutu pasti akan menjajah kembalibangsa Indonesia.Karena itu kita Wajib mengangkat senjata untuk menghadapi mereka.
4. Kewajiban-Kewajiban tersebut adalah Jihad Fisabilillah

⁸³ Zuhairini dkk, *Sejarah*., hlm. 135.

⁸⁴ A.M. Saefudin: *Konsep Pendidikan Agama : Sebuah Pendekatan Integratif Inofatif*, (Jakarta: Harian Umum Pelita, 1985), hlm. 34.

masyarakat tidak pernah terjadi, hal ini dikarenakan pemerintahan orde baru secara yuridis formal mengakui keberadaan pendidikan Islam akan tetapi tidak memberikan ruang yang cukup dalam menanamkan ideologi Islam. Pemerintahan orde baru secara sistematis telah mempersiapkan visi dan misi utamanya adalah melestarikan kekuasaan dengan berbagai cara dan metode. Akibatnya pendidikan dijadikan salah satu instrument untuk menciptakan (*safety net*) bagi pelestarian kekuasaan, sedang visi dan misi pelestarian kekuasaan itu melahirkan kebijakan pendidikan yang bersifat straight jacket.⁸⁵

Pada masa sekarang diharapkan tidak terjadi perlakuan yang tidak adil secara kelembagaan dan dapat berfungsinya pendidikan Islam sebagai mata pelajaran yang berfungsi memberi pengikat nilai-nilai moral dan spiritual kepada peserta didik.

4. Fungsi pendidikan Islam

a. Pendidikan Islam Sebagai Lembaga

Menurut PP No 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan keagamaan bab III pasal 8 menyatakan Pendidikan Keagamaan (Pendidikan Islam sebagai lembaga) dalam hal ini adalah pesantren dan diniyah berfungsi :

⁸⁵ Imam Barnadib, *Paradigma Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Safiria Insan Press, 2003), hlm. 8.

Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya/ menjadi ahli agama⁸⁶

Jadi fungsi lembaga pendidikan Islam (pesantren dan diniyah) adalah mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya atau menjadi ahli agama

Sedangkan fungsi lembaga pendidikan Islam (Madrasah dan Sekolah Islam) , seperti tertuang dalam Undang-Undang sisdiknas pada BAB II Pasal 3 antara lain :

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.⁸⁷

Mengembangkan kemampuan berorientasi pada individu adalah usaha mengembangkan semua potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik dalam rangka mempersiapkan hidupnya sebagai manusia yang beriman dan bertaqwa mempunyai kepribadian yang terpuji dan dapat berinteraksi dengan masyarakat lain

John Gardner Menteri Kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan Amerika serikat pada masa presiden J.F. Kennedy mengatakan “ *No Nation can achieve greatness unless it beleves in something, and unless that something has moral dimensions to sustain a great zivilisation*” (

⁸⁶ PP No 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan keagamaan. Hal 13.

⁸⁷ UU No20 tahun 2003 tentang Sisdiknas. hal 8

Tidak ada bangsa yang mencapai kebesaran jika tidak bangsa itu percaya kepada sesuatu, dan tidak sesuatu yang dipercayai itu mempunyai dimesni moral guna menopang peradaban yang besar). Dan kepercayaan kepada “sesuatu” itulah “agama”.⁸⁸

Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai sasaran pendidikan nasional pada khakekatnya adalah transformasi budaya, yaitu suatu proses transformasi dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern dan maju dan masyarakat tradisional feodalistik menuju masyarakat yang maju dan demokratis serta berkeadoilan social.⁸⁹

b. Pendidikan Islam Sebagai Mata Pelajaran

Fungsi pendidikan agama Menurut PP No 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan keagamaan bab II pasal 2 :

Pendidikan agama berfungsi membentuk manusia Indonesia yang percaya pada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlaq mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan intern dan antarumat beragama⁹⁰

Fungsi pendidikan Islam adalah usaha mengembangkan kesadaran diri dan sosial didasarkan pada nilai-nilai Islam dan nilai-nilai masyarakat yang telah ada. Nilai-nilai inilah yang menurut *Yinger* disebut nilai-nilai khas dan nilai khas ini dipegang karena memberi

⁸⁸ Nurcholis Majid: *Islam Doktrin*. Hal Xxiii.

⁸⁹ Soedijono, *Landasan dan Arah Pendidikan Nasional*, (Jakarta : Kompas 2008), hlm. I

⁹⁰ UU No20 tahun 2003 tentang Sisdiknas hal. 7.

bobot sehingga memberikan kepuasan.. Maka fungsi pendidikan Islam pada dasarnya adalah internalisasi nilai-nilai Islam yang diyakini khaq kebenarannya melalui proses penidikan.

- a. Menyiapkan generasi muda untuk memegang perananny dalam masyarakat pada masa yang akan datang. Peran itu dalam rangka melanjutkan hidup (*survival*) masyarakat itu sendiri.
- b. Memindahkan Ilmu pengetahuan (*Transfer of Knowaldge*) dengan peran-peran tersebut dari generasi muda.
- c. Memindahkan nilai-nilai (*Transfer of Villiu*), untuk memelihara keutuhan dan kesatuan masyarakat yang menjadi sarat mutlak bagi kalangsungan hidup suatu masyarakat dan peradaban⁹¹

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi pendidikan Islam adalah penanaman nilai-nilai Islam sehingga berorientasi pada pendidikan beramal didunia untuk kehidupan akherat. Fungsi keempat inilah yang menautkan dan menginternalisasi serta menyelaraskan fungsi-fungsi yang lain.

Dari konsep fungsi pendidikan Islam sebagai mata pelajaran ini ada beberapa hal antara lain :

- 1) Menanamkan *Ketauhidan*
- 2) Menanamkan *Akhlaq mulia*
- 3) Menanamkan nilai *Rakhmatan lil alamin*

Maka kurikulum yang beralaku dengan memperhatikan antara lain :

⁹¹ Wan Daud Wan M Ibrahim, <http://www.Angelfire.Com/artikel/acces>. 31 Mei 2008.

- 1) Peningkatan Iman dan Taqwa
- 2) Peningkatan akhlaq mulia
- 3) Potensi kecerdasan dan minat peserta didik
- 4) Keragaman dan potensi daerah serta lingkungan
- 5) Tuntutan pembangunan Daerah dan Nasional
- 6) Tuntutan dunia kerja
- 7) Perkembangan dunia ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
- 8) Agama
- 9) Dinamika perkembangan global
- 10) Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan⁹²

Hierarki ilmu pengetahuan menurut DR. Ali Asraf tidak setiap cabang ilmu pengetahuan memiliki status yang sama maka diperlukan hierarki Ilmu pengetahuan:

- 1) Pengetahuan Spiritual
- 2) Pengetahuan Moral
- 3) Pengetahuan Intelektual
- 4) Pengetahuan yang mengontrol imajinasi manusia
- 5) Pengetahuan yang mengontrol anggota tubuh.⁹³

Pendidikan spiritual, mempunyai fungsi membentuk karakter dan watak manusia, artinya nilai-nilai yang ditanamkan akan membentuk akhlaq atau perilaku yang disandarkan kepada kepatuhan mutlak akan ketentuan moral Tuhannya. Menurut Syafi'i Ma'arif pendidikan Islam bukan hanya proses penanaman nilai moral untuk membentengi diri dari eksese negatif globalisasi akan tetapi lebih dari itu yaitu bagaimana nilai-nilai moral dalam pendidikan Islam mampu mengambil peran dalam konteks pembebasan dunia dari segala kehimpitan kebodohan, kemiskinan, keterbelakangan sosial, budaya dan ekonomi.⁹⁴ Artinya pendidikan adalah usaha mencerdaskan kehidupan bangsa dengan

⁹² UU Sisdiknas pasal 36 ayat 3.

⁹³ Al asraf, *Horison*., hal. 4.

⁹⁴ Abdurahman, *Meningful*., Hal. 15.

mengembangkan segala potensinya berdasarkan keimanan, ketaqwaan sehingga menjadi manusia yang berbudipekerti luhur berguna untuk dirinya dan masyarakat

Pendidikan Islam adalah “ Usaha yang lebih khusus ditekankan untuk mengembangkan fitrah keberagamaan (*relegiusitas*) subyek didik agar lebih mampu memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam” maka dapat diambil pengertian fungsi pendidikan Islam adalah sebagai jalur pengintegrasian wawasan agama dengan bidang-bidang studi (pendidikan) yang lain⁹⁵. Menurut Ibnu Khaldun pendidikan dilaksanakan sejak masih kecil dengan memperhatikan faktor bawaan dan tabiat anak-anak dalam pendidikan.⁹⁶

Fungsi pendidikan juga dilihat dari perubahan fenomena peradaban manusia yang terjadi dan tumbuh dalam masyarakat dengan asumsi bahwa pertumbuhan peradaban manusia juga dipengaruhi dan berkembang melalui dunia pendidikan.

Fungsi pendidikan Islam menurut (Q.S. al Baqoroh ;151) antara lain

- 1) Membacakan ayat-ayat Allah
- 2) Menyucikan diri (Tazkiyah an nafsh)
- 3) Mengajarkan al Kitab
- 4) Mengajarkan Hikmah

⁹⁵ Akhmadi, *Idiologi*, hal. 29.

⁹⁶ Busyairi Majidi, *Konsep Pendidikan Menurut Para Filosof Muslim*, (Yogyakarta : Al Amin Pres, 1997), hal. 18.

5) Mengajarkan ilmu pengetahuan.

Dengan membaca ayat-ayat Allah maka wawasan manusia semakin luas dan mendalam, sehingga sampai pada kesadaran diri akan zat yang maha pencipta. Menyucikan diri merupakan efek langsung dari pembacaan ayat-ayat Allah setelah menangkap gejala-gejalanya dan hukum-hukumNya yang dimaksud adalah menjauhkan diri dari syirik dan berakhlakul karimah. Mengajarkan al Kitab adalah al Qur'an yang masih harus digali lebih mendalam karena masih bersifat mujmal, maka perlu penjelasan dari Rasulullah yang disebut dengan hikmah. Rasulullah juga mengajarkan ilmu pengetahuan yang belum diketahui oleh manusia sebelumnya dan adalah kenyataan bahwa ilmu pengetahuan masih banyak yang belum terungkap.

Secara garis besar Prof. Ahmadi menyebutkan bahwa fungsi pendidikan Islam antara lain :

- 1) Mengembangkan wawasan yang tepat dan benar mengenai jati diri manusia, alam sekitarnya dan mengenai kebesaran Ilahi, sehingga tumbuh kemampuan membaca (menganalisa) fenomena alam dan kehidupan, serta memahami hukum-hukum alam yang terkandung didalamnya. Dengan kemampuan ini akan menumbuhkan kreatifitas dan produktifitas sebagai implementasi identifikasi diri pada Tuhan sang pencipta
- 2) Membebaskan manusia dari segala anasir yang merendahkan martabat manusia (*Fitrah Manusia*), baik yang dating dari dalam dirinya maupun yang dating dari luar. Yang dating dari dalam dirinya antara lain Kejumudan, taklid, kultus individu, khurofat yang terberat adalah syirik, terhadap anasir dari dalam ini manusia hendaknya melakukan terus penyucian diri (*tazkiah an nafs*) sedangkan yang dating dari luar dapat berupa cultural maupun structural yang dapat memasung kebebasan manusia dalam mengembangkan realisasi dan aktualisasi diri, Untuk meminimalisirnya perlu upaya sistematis dan strategis dari seluruh elemen masyarakat terutama pemerintah. Dengan semakin

minimnya anasir-anasir itu maka akan semakin terbuka jalan untuk optimalisasi realisasi diri dan aktualisasi diri sehingga menuntun individu dan masyarakat lebih arif dan bertanggungjawab.

- 3) Mengembangkan Ilmu pengetahuan untuk menopang dan memajukan kehidupan baik individu maupun social. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan menurut sinyal yang diberikan al Qur'an sebagaimana tersebut dalam butiran pertama diatas, hendaknya dengan mengetahui fenomena alam dan kehidupan dengan pendekatan empiric, sehingga mengetahui hukum-hukumnya.⁹⁷

Dari pointer ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam berfungsi secara multi dimensial artinya fungsi pendidikan Islam mempunyai dimensi Ilahiyah sebagai manusia yang selalu trensenden pada Allah dengan memabaskan manusia dari ketertundukan kepada selain Allah dan sadar sebagai mahluk, sehingga menumbuhkan fenomena Ibadah sebagai bentuk ketundukan kepada ilahiyah, dimensi sosial yang bertanggung jawab kepada individu maupun kehidupan social didasari pemahaman akan ilmu pengetahuan.

c. Pendidikan Islam Sebagai Nilai

Hakekat pendidikan Islam adalah penanaman nilai-nilai Iman - Islam dan Ikhsan maka dengan bertitik tolak dari prinsip Iman - Islam -Ikhsan atau akidah - Ibadah - akhlaq untuk menuju suatu sasaran kemuliaan manusia dan budaya yang diridloi oleh Allah SWT, setidaknya mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 2) Individualisasi nilai dan ajaran Islam demi terbentuknya derajat manusia muttaqin dalam bersikap, berpikir dan berperilaku
- 3) Sosialisasi nilai-nilai dan ajaran Islam demi terbentuknya umat Islam

⁹⁷ Akhmad, *Idiologi*, hal. 37-38.

- 4) Rekayasa kultur Islam demi terbentuknya perkembangan peradaban Islam
- 5) Menemukan, mengembangkan, serta memelihara ilmu, teknologi, dan ketrampilan demi terbentuknya pere manajer dan manusia professional
- 6) Mengembangkan intelektual muslim yang mampu mengemencari, mengembangkan, serta memelihara ilmu dan teknologi.
- 7) Pengembangan pendidikan yang berkelanjutan dalam bidang ekonomi, fisika, kimia, arsitektur, seni musik, seni budaya, politik, olah raga, kesehatan dan lainnya.
- 8) Pengembangan kualitas muslim dan warga negarasebagai anggota dan Pembina masyarakat yang berkualitas kompetitif.⁹⁸

Nilai dasar adalah pandangan hidup yang melandasi seluruh aktifitas pendidikan, landasan hidup seluruh aktifitas Islam tidak lepas dari landasan normative al Qur'an dan sunah nabi yang mengandung kebenaran mutlak yang bersifat transendental, universal dan eternal (*abadi*), sehingga selalu diyakini selalu sesuai dengan situasi dan kondisi manusia, karena keduanya memang telah didesain khusus oleh Allah untuk umat manusia, sehingga bila ditinjau dari perspektif apapun akan sesuai dengan fitrah dan kodrat manusia.

Nilai-nilai dasar Pendidikan Islam antara lain :

1) Nilai Tauhid

Dalam pendidikan Islam ada nilai dasar yang telah ada dengan sendirinya (*Nilai Intrisik*) nilai ini ada dengan sendirinya bukan sebagai prasarat atas nilai yang lain Nilai intrisik dan fundamen dalam Islam adalah nilai tauhid atau keimanan.⁹⁹ Tauhid menjadi nilai instrisik yang tidak dapat dirubah dalam kondisi apapun, tidak

⁹⁸ Jusuf Amir Faisal, *Reformasi* hal. 95.

⁹⁹ Ahmadi, *Idiologi*, hlm. 83.

juga dapat berubah menjadi nilai instrumen karena kedudukannya paling tinggi. Bahkan Ismail Raji al Faruqi dalam bukunya "*Tauhid*" menyatakan bahwa tauhid menjadi pandangan dunia, semua aspek kehidupan manusia selalu didasarkan dan berpulang kepada tauhid "*Inna lillaahi waanna ilaihi roojunna*". Semuanya dari Allah sang maha Tauhid dan akan kembali kepada Allah.¹⁰⁰

Dalam buku yang lain "*Islamisasi Ilmu Pengetahuan*" mengformulasikan disiplin ilmu dibawah kerangka Islam berarti membawa teori, metode, prinsip-prinsip dan tujuan tunduk kepada esensi Islam yaitu Tauhid, yang meliputi lima prinsip keesaan 1. Keesaan Allah, (2) Kesatuan alam semesta, (3) Kesatuan kebenaran dan pengetahuan, (4) Kesatuan hidup, dan (5) Kesatuan umat manusia.¹⁰¹

Semua ajaran nilai Islam berpulang pada ajaran tauhid, ajaran tauhid bukan untuk Tuhan akan tetapi tauhid untuk manusia, semua amal yang dilakukan manusia dan dipersembahkan pada Tuhan bukan untuk Tuhan akan tetapi kembali pada manusia, ajaran yang teosentris itu memang sesuai dengan fitrah manusia (Q.S ar Rum 30).

Tauhid merupakan fondasi seluruh bangunan Islam, pandangan hidup tauhid bukan hanya pengakuan akan keesaan Allah tapi menyangkut kesatuan penciptaan (*Unity of Creation*), kesatuan

¹⁰⁰ Ismail Raji al Faruqi, *Tauhid*, hal. v.

¹⁰¹ *Ibid.*, hal. 84.

kemanusiaan (*Unity of mankind*), kesatuan tuntunan hidup (*Unity of guidance*) kesatuan tujuan dan kesatuan ketuhanan (*Unity of Godhead*), Bila ditarik dalam kehidupan social maka tauhid tidak mengakui adanya kelas sosial, keturunan dan latar belakang geografis.¹⁰²

2) Nilai Kemanusiaan

Humanisme yang berasal dari bahasa latin "*Humanitas*" secara kebahasaan, menunjuk kepada *human nature, feeling dan kindness* (kebaikan hati).¹⁰³ Dan Istilah ini dalam bidang filsafat sering diartikan sebagai : Suatu paham yang berkeyakinan bahwa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia adalah yang paling utama atau paling pokok.¹⁰⁴

Menurut *Dyakarya*, pendidikan itu adalah memanusiakan manusia muda. Pengangkatan manusia muda ke taraf mendidik, yaitu proses seseorang mengembangkan kemampuan, sikap, dan tingkah laku lainnya di dalam masyarakat tempat mereka hidup, ataupun proses social yang terjadi pada orang yang dihadapkan pada pengaruh lingkungan yang terpilih dan terkontrol (khususnya yang datang dari sekolah), sehingga mereka dapat memperoleh

¹⁰² Amin Rais. *Cakrawala Islam*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 1998), hal. 19.

¹⁰³ Saifudin Azwar. *Sikap Manusia, Teori dan Pengukurannya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hal. 9.

¹⁰⁴ Abdullah Hadzik. *Rekonsiliasi Psikologi Sufistik dan Humanistik*, (Semarang: Rasail, 2005), hal. 43.

perkembangan kemampuan sosial dan kemampuan individu yang optimum.¹⁰⁵

Sedangkan menurut Crow and Crow, pendidikan tidak hanya dipandang sebagai sarana untuk persiapan hidup yang akan datang, tetapi juga untuk kehidupan sekarang yang dialami individu dalam perkembangannya menuju ke tingkat kedewasaannya.¹⁰⁶

Dalam Islam manusia diakui harkat dan martabatnya, hak-hak asasi seseorang harus diharga dan dilindungi dengan tidak melanggar hak-hak orang lain karena setiap orang mempunyai hak dan kewajiban yang sama yang membedakan seseorang dengan yang lainnya adalah ketaqwaannya (Q.S al Hujurat ; 13). Implikasi dalam pendidikan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam pendidikan dengan memberikan nilai-nilai kemanusiaan sebagai makhluk Allah yang diakui sebagai makhluk paling sempurna baik secara jasmani maupun rohani , secara fisiologis maupun secara psikologis.

3) Nilai Keseimbangan

Tauhid mengajarkan prinsip keseimbangan, Allah memberikan pengetahuan kepada manusia bahwa alam diciptakan oleh Allah dalam keseimbangan (Q.S al Mulk ;30). Keseimbangan alam inilah

¹⁰⁵ Nanang Fatah, *Landasan Manajemen Pendidikan*, cet. VII, (Bandung: Remaja Roddakarya, 2004), hal. 4.

¹⁰⁶ LD Crow, *A Introduction to Education*, dicetak bersama, hal. 4.

yang dapat melangsungkan kehidupan dunia, apabila keseimbangan itu telah tiada maka alam ini akan rusak.

Keseimbangan ekosistem yang dapat melestarikan kehidupan dan penghidupan. Pendidikan harus dapat berorientasi pada terwujudnya keseimbangan tatanan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia, manusia dengan sesama makhluk dan manusia dengan alam, prinsip keseimbangan itu antar lain:

- a) Keseimbangan antara kehidupan dunia dan akherat
 - b) Keseimbangan antara jasmanidan rohani
 - c) Keseimbangan individu dan social
 - d) Keseimbangan antara ilmu dan Amal.¹⁰⁷
- 4) Nilai *Rahmatan Li al- alamin*

Rosulullah sang pendidik diutus kedunia untuk menjadi rahmat bagi semua alam. dengan keberadaan rosulullah alam ini mendapatkan rahmad, keteraturan alam, terpeliharanya alam menjadi tujuan utama diutusnya rasulullah. Manusia sebagai kholifah dimuka bumi mempunyai kemampuan penuh yang telah didisain oleh Allah untuk menjadi pemimpin dunia dengan bekal segala potensi yang telah Allah berikan kepada manusia.

Pendidikan merupakan usaha memanusiakan manusia sesuai dengan kodrat kemanusiaannya dengan mengasah segala potensi kemanusiaan itu maka keberadaan manusia dimuka bumi menjadi rahmad bagi semua alam bukan hanya bagi sesama manusia (Q.S. Al Anbiya;107).

¹⁰⁷ Akhmadi, *Idiologi*, hal. 89.

BAB III

PENDIDIKAN ISLAM DALAM

UNDANG-UNDANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

A. Kelahiran Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional

Konstitusi yang dimaksud adalah undang-undang setelah proklamasi, Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 adalah implementasi dari amanat Undang-Undang Dasar 1945 pada Bab XIII tentang pendidikan dan kebudayaan Pasal 13 yang mengamanatkan bahwa: Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.¹⁰²

Undang-Undang Nomor 54 tahun 1950 sebagai Undang-Undang pertama yang mengatur pendidikan nasional tidak memberikan tempat bagi pendidikan keagamaan. Pendidikan agama yang saat itu diistilahkan dengan pengajaran agama. Undang-undang ini cenderung bersikap liberal dengan menyerahkan keikutsertaan siswa dalam pengajaran kepada keinginan dan persetujuan orang tua.

Undang-undang ini mengamanatkan tersusunnya undang-undang tersendiri yang mengatur tentang pendidikan agama. Secara sederhana

¹⁰² Situs Resmi MPR/DPR, *Pendidikan dan Kebudayaan Pasal 13*, / <http://www.mpr.go.id/artikel/> accessed 11 April 2008

sikap pemerintah saat itu dapat disimpulkan sebagai tidak memihak dan tidak menunjukkan concern yang tinggi terhadap pendidikan agama.

Berangkat dari kenyataan itu maka, isu pendidikan agama ramai dibicarakan dan diperdebatkan. Akumulasi perdebatan ini memberikan pengaruh terhadap Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 sebagai Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional “jilid dua” yang disahkan pada tanggal 27 Maret 1989. Dalam Undang-Undang yang muncul 39 tahun kemudian dari Undang-Undang pertama ini, pendidikan keagamaan dan pendidikan agama mulai mendapat tempat yang cukup signifikan dibandingkan dengan sebelumnya. Pendidikan keagamaan diakui sebagai salah satu jalur pendidikan sekolah.¹⁰⁹ Pendidikan agama menjadi mata pelajaran wajib dalam setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan.¹¹⁰ Lebih dari itu, Undang-Undang ini menjadikan keimanan dan ketakwaan sebagai tujuan pendidikan nasional¹¹¹ Keimanan dan ketakwaan adalah terminologi yang sangat identik dan akrab dengan pendidikan agama dan keagamaan.

Sembilan tahun setelah Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 diundangkan, pendidikan nasional mendapat banyak kritik, bahkan hujatan. Dikarenakan sudah tidak sesuai lagi dengan perkebangan bangsa saat itu, bahkan UUD 1945 pun yang memayungi lahirnya setiap Undang-Undang pendidikan, tak mampu menahan dari desakan amandemen sehingga pada tanggal 18 Agustus 2000 MPR memutuskan berlakunya UUD hasil empat kali

¹⁰⁹ UU No 2 Tahun 1989 Pasal 11 ayat 1 dan 6, dan pasal 15 ayat 2

¹¹⁰ UU No 2 Tahun 1989 Pasal 39 ayat 2

¹¹¹ UU No 2 Tahun 1989 Pasal 4

amandemen tersebut. UUD hasil amandemen ini mengamanatkan agar pemerintah menyusun sebuah sistem pendidikan nasional.¹¹² Demi memenuhi amanat tersebut, desakan masyarakat serta tuntutan reformasi pendidikan bergulir, maka pada tanggal 8 Juli 2003 diundangkanlah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada masa inilah pendidikan agama dan keagamaan mendapatkan angin segar dan ruang gerak yang leluasa yang setidaknya ditegaskan dan diisyaratkan dalam 12 point dari Undang-Undang tersebut, yaitu pada 1) konsideran “menimbang”, 2) Bab 1 tentang Ketentuan Umum, 3) Pasal 3 tentang fungsi pendidikan nasional, 4) Pasal 12 ayat 1 a tentang hak peserta didik, 5) Pasal 17 ayat 2 tentang bentuk Pendidikan Dasar, 6) Pasal 18 ayat 3 tentang bentuk Pendidikan Menengah, 7) Pasal 26 ayat 4 tentang bentuk satuan pendidikan nonformal, Pasal 30 tentang Pendidikan Keagamaan, 9) Pasal 36 ayat 3 tentang aspek kurikulum, 10) Pasal 37 ayat 1 tentang kurikulum pendidikan dasar, 11) Pasal 37 ayat 2 tentang kurikulum pendidikan tinggi, dan 12) Pasal 38 ayat 2 tentang koordinasi dan supervisi Departemen Agama.¹¹³

Lahirnya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 tidak semudah pada perkiraan semula, ternyata harus melalui perdebatan sengit. Bahkan unjuk rasa sampai ancaman disintegrasi ikut mewarnai proses

¹¹² Selengkapnya amanat UUD itu berbunyi. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Lihat UUD 1945 Bab XIII tentang Pendidikan dan Kebudayaan Pasal 13, naskah didownload pada tanggal 11 April 2008 dari www.mpr.go.id (situs resmi Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia)

¹¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

lahirnya Undang-Undang ini. Singkat kata, Undang-Undang ini menjelang kelahirannya ada dalam situasi yang dilematis.¹¹⁴ Kritik tajam terhadap Undang-Undang ini (saat itu masih RUU) dapat dicatat antara lain berkaitan dengan tujuan pendidikan nasional yang dirumuskan terlalu ditekankan pada kesalehan beragama dan mengabaikan tujuan pendidikan nasional yang universal dan komprehensif; bersifat diskriminatif dan mengabaikan keberadaan serta kepentingan agama/kepercayaan lain di luar lima agama yang selama ini diakui resmi oleh negara; visi pendidikan agama yang ditawarkan tidak mendorong semangat pluralisme, serta memberi peluang intervensi berlebihan negara pada pelaksanaan pendidikan dan menghalangi partisipasi serta otonomi masyarakat, khususnya lembaga-lembaga pendidikan; campur-tangan pemerintah terlalu besar pada masalah agama; dan kentalnya nuansa politik yang mebidani lahirnya Undang-Undang tersebut. Demikianlah kritik yang mengemuka dari kelompok yang menolak Undang-Undang tersebut.¹¹⁵

Sementara pada sisi lain, Undang-Undang ini dimaksudkan sebagai jawaban legal formal terhadap krisis pendidikan yang telah menggurita dalam tubuh bangsa Indonesia. Dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2003, Megawati Sukarno Putri, Presien RI saat itu misalnya menegaskan, kegagalan dan kurang berhasilan yang terjadi selama ini merupakan

¹¹⁴ Trisno sutanto, *Dilema RUU Sisdiknas*, <http://www.Politik Indonesia net/-artikel/accesed> 10 April 2008.

¹¹⁵ Yumarna, *UU Sisdiknas (Pertarungan Dua Kekuatan)*, <http://www.pondokrenungan.com/-artikel/accesed> 10 April 2008. Johar MS, *Kontroversi RUU Sisdiknas*, <http://www.Pintunet.com/-artikel/accesed> 10 April 2008. Indra J Piliang, *Beredar Dua Versi RUU Sisdiknas*, <http://www.Suarapembaharuan.com/-artikel/accesed> 10 April 2008.

cerminan dari kegagalan dalam membentuk mental dan karakter sebagai bangsa yang sedang membangun. Semua itu bagaikan bermuara pada kesimpulan tentang tipisnya etika kita dalam membina kehidupan berbangsa dan bernegara.¹¹⁶ Kalau disimak ujung dari semua itu seakan-akan berhenti pada ungkapan tentang gagalnya sistem pendidikan nasional kita. Kesadaran akan adanya kegagalan dalam dunia pendidikan ini ditandai dengan tuntutan reformasi yang beriringan dengan tuntutan reformasi pada bidang kehidupan lainnya. Bahkan di kawasan Asia, Indonesia di nilai sebagai negara yang paling ketinggalan (*least well-educated country*) dalam pendidikan baik dari budgeting, out put, maupun manjerial.¹¹⁷

Terdapat banyak isu reformasi pendidikan yang diusung saat itu. Sedikitnya isu-isu sentral reformasi pendidikan ini bermuara pada empat hal, yaitu :

- 1) Pendidikan agama sebagai basis pendidikan nasional
- 2) Pemerataan kesempatan pendidikan
- 3) Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan
- 4) Efisiensi manajemen pendidikan.

Keempat hal pokok ini tidak lagi bisa dijawab oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Namun menjelang disahkannya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 sebagai pengganti UU

¹¹⁶ PDI-P:Revisi RUU Sisdiknas. http://www.suarapembaharuan.com/-artikel/accesed_10_April_2008.

¹¹⁷ By Bill Guerin. *Indonesia behind the learning curve*, http://www.atimes.com/-artikel/accesed_10_April_2008.

Keempat hal pokok ini tidak lagi bisa dijawab oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Namun menjelang disahkannya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 sebagai pengganti UU Sisdiknas sebelumnya seperti ramai diberitakan oleh media massa.¹¹² seluruh persoalan pendidikan yang rumit didiskusikan oleh para pakar pendidikan selama kurang lebih dua tahun itu, semuanya tenggelam ditelan polemik pasal-pasal “yang berpihak” terhadap pendidikan agama. Bahkan polemik ini sudah jauh melampaui diskusi-diskusi kependidikan, tetapi merambah masuk ke dalam ranah politik dan sentimen agama.¹¹³

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, terutama Islam telah menjadi konteks tersendiri yang memotivasi, mewarnai dan memperkaya UU Sisdiknas, sekaligus menjadikan Undang-Undang ini dianggap kontroversial. Dari konteks ini dapat dilihat posisi pendidikan agama dan pendidikan keagamaan dalam UU Sisdiknas Nomor 2 tahun 2003 memiliki urgensi dan signifikansi besar.

B. Isi Dan Kandungan Undang-Undang Tentang Pendidikan Islam

Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar 1945 pada Bab XIII tentang Pendidikan dan

¹¹² Untuk melacak dan memetakan perdebatan seputar kentalnya nuansa agama (religiusitas) dalam UU Sisdiknas yang baru dapat ditelusuri dalam dokumentasi surat kabar nasional seperti Kompas, Repeublika, Media Indonesia, Suara Pembaruan, atau Pikiran Rakyat. Untuk informasi selengkapnya akses dan search pada www.kompas.com, www.republika.co.id, www.pikiran-rakyat.com, www.suarapembaruan.com, www.mediaindonesia.com

¹¹³ Muhamad Khlmid Fathoni, *Pendidikan Islam dan Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Dirjen Kelembagaan Agama Islam Depag RI, 2005), hal. 1-2.

Kebudayaan Pasal 13 yang mengamanatkan pemerintah untuk mengusahakan sistem pendidikan nasional.¹²⁰

1. Pendidikan Islam sebagai lembaga

Pendidikan Islam Sebagai lembaga di Indonesia tidak pernah terlepas dari tiga hal yaitu Pesantren, Madrasah dan sekolah Islam. Apabila dilihat dari kelembagaannya, Pendidikan Islam pertama dilaksanakan dengan model pesantren, model pendidikan ini merupakan metamorfosa dari model pendidikan agama hindu dan budha¹²¹ ciri yang menonjol dalam model pendidikan ini adalah adanya kyai dan santri yang tinggal dalam kompleks yang sama (pondok) disamping sebagai guru kiai sebagai simbol otoritas agama.

Pendidikan Islam pada masa penjajah Belanda tidak terlepas dari tekanan yang dilancarkan lewat sikap pemerintah Belanda dengan sikapnya yang bertujuan ingin melanggengkan kekuasaan lewat politik *divide etempera* terasuk dalam dunia pendidikan.¹²² Belanda membuat beberapa aturan bagi pembukaan sekolah dan pendidikan Islam pada khususnya. Tahun 1882 Pemerintah Belanda membentuk *Priesterraden* yaitu lembaga khusus yang mengawasi kehidupan beragama dan pendidikan Islam, dari nasehat badan ini maka keluar peraturan baru *Guru*

¹²⁰ Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang

¹²¹ Khabib Toha dan Abdul Mukl, *PBM PAI*, hal. viii.

¹²² Abdurrahman Assagaf. *Politik*, .hal. 40.

*Ordonantie*¹²³ isinya orang Islam yang ingin memberikan pengajaran dan pengajian harus terlebih dahulu meminta izin pada pemerintah Belanda.

Pada tahun 1925 keluar peraturan yang lebih ketat terhadap PAI Tidak setiap orang (kiyai) boleh memberika pelajaran atau pengajian sebelum terlebih dahulu mendapat ijin dari *Guru Orgondotie*. Pada tahun 1932 keluar peraturan yang memberi wewenang memberantas atau penutup madrasah atau sekolah yang tidak ada iziya atau memberikan pelajaran yang tidak disukai oleh pemerintah Belanda.¹²⁴ Belanda mendirikan sekolah umum dengan mengacu pada mata pelajaran umum saja, maka terjadi dikotomi antara model pesantren dan sekolah umum. Ada tiga ciri pokok yang membedakannya antara lain :

- a. Kurikulum; pendidikan pesantren hanya mempelajari Ilmu agama, sekolah umum hanya mempelajari ilmu umum
- b. Metodologi pesantren berkiblat ke Arab yang identik dengan Islam , sekolah umum berkiblat ke barat yang sering diidebtikan dengan Kristen
- c. Penyelenggara pesantren orang pribumi sekolah umum diselenggarakan oleh penjajah

¹²³ Diantara Isi Guru Ordonantie adalah

1. Setiap guru agama harus dapat menunjukkan bukti tanda terima pemberitahuannya
2. Ia harus mengisi daftar murid dandaftar pelajaran yang sewaktu-waktu dapat diperiksa oleh pejabat yang berwenang
3. Pengawasan dinilai perlu untuk memelihara ketertiban umum
4. Bukti kelayakan bias dicabut, bila terbukti guru tersebut memperbanyak mencari murid dengan maksud yang bias dinilai mencari uang
5. Guru agama dapat dihukum maksimum dan didenda maksimum f.200 bila masih mengajar dicabut haknya.

¹²⁴ *Ibid.*, hal. 40-41. Zuhairini, *Sejarah.*, hal. 148-150.

Dualisme model pendidikan yang cenderung konserfatif mendorong gerakan reformasi pendidikan secara kelembagaan dengan menggabungkan kurikulum sekolah umum dengan kurikulum pesantren, maka lahirlah Madrasah diniyah di padang panjang yang didirikan oleh *Zaenuddin lebai el Yunusi*, *Syeh Hamka* mendirikan madrasah Sumatra Thowalib *KH. Ahmad Dahlan* Mendirikan Muhammadiyah.

Dengan demikian pada masa penjajahan Belanda telah ada tiga lembaga pendidikan Islam yang eksis diantaranta; Pesantren, Madrasah dan sekolah Islam. Pesantren merupakan Lembaga pendidikan Islam yang hanya mengkaji tentang ilmu-ilmu keislaman, Madrasah merupakan penggabungan dari materi ilmu-ilmu keislaman dengan pengetahuan umum akan tetapi lebih banyak materi pengetahuan agamanya sedangkan sekolah Islam penggabungan materi agama dengan materi pengetahuan umum akan tetapi lebih banyak materi pengetahuan umumnya.

Misi Belanda menyebarkan agama Kristen begitu kuatnya terbukti dengan kebijakan Gubernur jendral di Jakarta *Van den Boss* yang menyatakan sekolah-sekolah greja dianggap dan diperlakukan seperti sekolah pemerintah, departemen yang mengurus pendidikan dijadikan satu dan tiap karisidenan didirikan sekolah agama kristen¹²⁵ Belanda ingin melanggengkan kekuasaan lewat politik *divide etimpera* terasuk didalamnya dalam dunia pendidikan,¹²⁶ Peraturan pemerintah yang pertama kali memuat keberadaan pendidikan Islam harus diajarkan

¹²⁵ Zuhairini, *Sejarah*, hal. 148.

¹²⁶ Abdurrahman Assagaf, *Politik*, hal. 40.

disekolah adalah UU RI no 4 tahun 1950 menyebutkan bahwa :
 “Disekolah-sekolah negri diadakan pelajaran-pelajaran Agama orang tua
 murid menetapkan apakah anaknya akan mengikuti pelajaran tersebut
 ataukah tidak.”¹²⁷

Eksistensi pendidikan Islam dalam UU No 4 tahun 1950 sebagai lembaga pendidikan sangatlah lemah mengingat tidak ada dasar hukum yang menyebutkan bahwa lembaga Pendidikan Islam diakui secara yuridis formal dan dapat menjamin eksistensi lembaga tersebut. Eksistensi pendidikan Islam sebagai lembaga mulai kokoh dengan peraturan menteri Agama No 1/46 tentang bantuan pada madrasah yang memuat ketentuan ; jenjang pendidikan Madrasah yaitu Madrasah Rendah (Sekarang Madrasah Ibtidaiyah) 6 tahun, Madrasah Lanjutan Pertama (sekarang Madrasah Tsanawiyah) 3 tahun, Madrasah lanjutan atas (sekarang Madrasah Aliyah) 3 tahun.

Dalam UU No 2 tahun 1989 lembaga pendidikan Islam yang dulunya dikenal dengan Perguruan Agama Islam berubah nama antara lain :

- a. Roudlat al athfal / Bustan al Atfal (Taman kanak-kanak Islam),
 Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan madrasah Aliyah
 sebagai jalur pendidikan formal
- b. Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyyah sebagai lembaga non
 formal

Eksistensi pendidikan Islam dalam UU No 2 tahun 1989 antara lain :

¹²⁷ Khabib Toha dan Abdul Mukti , *Proses.*, hal. Xii.

- a. Pada Bab IV pasal 10 dan 11 dapat disimpulkan bahwa kelompok pertama dinamakan jalur “Pendidikan Sekolah” kecuali tingkat taman kanak-kanak termasuk dalam “jalur pendidikan luar sekolah”.
- b. Madrasah kedudukan sama dengan sekolah umum, berdasarkan PP. No 28/1990 sebagai pelaksana UU No 2 Tahun 1989 ditegaskan oleh Kep. Mendikbud nomor 0487/U/1989 dan 0489/U/1992, kedudukan madrasah Ibtidaiyah adalah sebanding dengan SD, Madrasah Tsanawiyah sebanding dengan SLTP, Madrasah Aliyah sebanding dengan SMU berciri khas Islam yang diselenggarakan oleh DEPAG. Dengan prasyarat MI wajib memberikan bahan kajian sekurang-kurangnya sama dengan SD, MTS wajib memberikan bahan kajian sekurang-kurangnya sama dengan SLTP dan MA wajib memberikan bahan kajian sekurang-kurangnya sama dengan SMU berdasarkan Kep. Mendikbud No. 0487/1992 pasal 2, No 054/U/1993 pasal 20. dan No 0489/1992 pasal 20.¹²⁸
- c. Pendidikan sekolah merupakan pendidikan yang diselenggarakan melalui prasarana yang dilembagakan hal ini dijelaskan dalam penjelasan UU No 2 tahun 1989 tentang sisdiknas bab IV pasal 10 ayat (1).¹²⁹

¹²⁸ Fak Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang. *Dinamika Pesantren dan Madrasah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2002)..., hal 255.

¹²⁹ Pendidikan sekolah merupakan pendidikan yang diselenggarakan melalui prasarana yang dilembagakan. Pendidikan luar sekolah adalah pendidikan yang diselenggarakan diluar sekolah baik yang dilembagakan maupun tidak

Ciri-ciri yang membedakan pendidikan luar sekolah dengan pendidikan sekolah adalah keluwesan pendidikan luar sekolah berkenaan dengan waktu dan lama belajar, usia peserta didik, isi pelajaran, cara penyelenggaraan pelajaran dan cara penilaian hasil belajar

Berdasarkan ciri-ciri diatas maka Pondok pesantren dan Madrasah diniyah dikategorikan “Jalur pendidikan luar sekolah.”

Dalam UU No 20 tahun 2003 tentang sisdiknas memposisikan pendidikan agama dan keagamaan bagaikan mendapatkan angin segar dan ruang gerak yang leluasa yang setidaknya ditegaskan dan diisyaratkan dalam 12 point dari Undang-Undang tersebut, yaitu pada 1) konsideran “menimbang”, 2) Bab I tentang Ketentuan Umum, 3) Pasal 3 tentang fungsi pendidikan nasional, 4) Pasal 12 ayat 1 a tentang hak peserta didik, 5) Pasal 17 ayat 2 tentang bentuk Pendidikan Dasar, 6) Pasal 18 ayat 3 tentang bentuk Pendidikan Menengah, 7) Pasal 26 ayat 4 tentang bentuk satuan pendidikan nonformal, Pasal 30 tentang Pendidikan Keagamaan, 9) Pasal 36 ayat 3 tentang aspek kurikulum, 10) Pasal 37 ayat 1 tentang kurikulum pendidikan dasar, 11) Pasal 37 ayat 2 tentang kurikulum pendidikan tinggi, dan 12) Pasal 38 ayat 2 tentang koordinasi dan supervisi Departemen Agama.¹³⁰

¹³⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

1. Lembaga Pendidikan Formal
 - a. Pendidikan dasar (pasal 17) ayat 2 : Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan bentuk lain yang sederajat
 - b. Pendidikan Menengah (Pasal 18) ayat 3 : Pendidikan Menengah berbentuk sekolah menengah atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) dan bentuk lain yang sederajat.
 - c. Pendidikan Tinggi (pasal 20) ayat 1 : Pendidikan tinggi berbentuk Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, atau Universitas.
2. Lembaga Pendidikan Nonformal (Pasal 26). Ayat 4
Suatu pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan masyarakat, dan majlis taklim serta satuan pendidikan yang sejenis
3. Lembaga pendidikan Informal (Pasal 27). ayat 1
Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.
4. Pendidikan Usia dini (Pasal 28) ayat 3

Pendidikan Islam sebagai lembaga secara eksplisit disebutkan dalam pasal diatas bahwa Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) sebagai bentuk pendidikan dasar. [20] Begitu juga tentang Pendidikan Menengah yang diatur dalam pasal 18, Madrasah Aliyah (MA) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) diakui eksistensinya secara gamblang. Pengakuan terhadap MI, MTs dan MA yang merupakan model umum dan standar untuk pendidikan Islam¹³¹, lagi-lagi memperlihatkan keberpihakan UU Sisdiknas terhadap pendidikan agama (baca : Islam). Hal ini berbeda dengan UU Sisdiknas Nomor 2 Tahun 1989 yang tidak menyebutkan lembaga-lembaga pendidikan Islam tersebut sebagai bentuk pendidikan dasar. Pengakuan terhadapnya hanya diakui melalui Peraturan Pemerintah dengan memposisikan tersebut sebagai lembaga padanan bagi sekolah umum. MI adalah SD berciri khas Islam, MTs adalah SMP berciri khas Islam, dan MA adalah SMA berciri khas Islam.¹³² Lebih dari itu,

Pendidikan Usia dini pada jalur pendidikan Formal berbentuk taman kanak-kanak (TK), Raudlotul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sedrajat

5. Pendidikan Keagamaan (Pasal 30)
 - a. Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh pemerintah dan atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan
 - b. Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai agamanya dan atau menjadi ahli agama.
 - c. Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, non formal dan informal
 - d. Pendidikan keagamaan dapat berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pabahaya, samena, dan bentuk lain yang sejenis
 - e. Ketentuan mengenai pendidikan keagamaan sebagi dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3). dan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

¹³¹ Makhsum Mukhtar, *Madrasah dan sejarah perkembangannya*, Cet. III, (Jakarta: Lagos, 2002), hal. 75.

¹³² Peraturan pemerintah no 28 tahun 1990. SK Mendikbud Nomor 0487/U/1992, dan Nomor 054/U/1993.

Majelis Taklim yang merupakan lembaga keagamaan khas Islam juga diakui dalam UU Sisdiknas 2003 sebagai satuan pendidikan nonformal.¹³³ Di banding dengan Madrasah, sebenarnya keislaman lebih kentara dalam Majelis Taklim karena ia adalah lembaga independen yang melakukan pengajaran dan kajian keislaman, dan terhadap ini diakui eksistensinya dalam UU Sisdiknas.

Pada Bagian Kesembilan dari Undang-Undang Sisdiknas ini ditampilkan dalam bentuk akomodasi terhadap Pendidikan Keagamaan sebagai komponen pendidikan nasional. Ada empat hal penting berkaitan dengan Pendidikan Keagamaan yang diatur dalam Pasal 30 dari UU Sisdiknas ini, yaitu kewenangan, fungsi, jalur, dan bentuk pendidikan keagamaan.¹³⁴ Tentang fungsi pendidikan keagamaan pasal ini menyebutkan tiga kompetensi yang harus dicapai peserta didik, yaitu 1) memahami nilai-nilai ajaran agama, 2) mengamalkan nilai-nilai ajaran agama, dan 3) menjadi ahli ilmu agama. Lembaga pendidikan Islam yang direpresentasikan untuk mengisi ruang ini adalah pendidikan diniyah dan pesantren. Inilah babak baru sistem pendidikan nasional di mana pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tertua di negeri ini disebutkan secara eksplisit dan diakui secara tegas sebagai komponen pendidikan nasional. Berkaitan dengan hal ini tidaklah berlebihan bila Maftuh Basyuni sebagai menteri agama melontar statemen, “sekarang negara harus menebus dosa

¹³³ UU Sisdiknas Pasal 26 ayat 4

¹³⁴ UU Sisdiknas Pasal 30

dengan menunjukkan pemihakan pada pemberdayaan pendidikan keagamaan.”¹³⁵.

Dalam Peraturan pemerintah No 55 tahun 2007 tentang Pendidikan agama dan Keagamaan, pendidikan keagamaan dirumuskan sebagai pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.¹³⁶ Definisi ini tidak berhasil membedakan pendidikan keagamaan dari pendidikan agama secara jelas terutama pada penggalan kalimat “peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama. Hal ini karena untuk dapat mengamalkan ajaran agama seperti dalam rumusan tentang pendidikan agama, tetap menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama. Namun dari penjelasan berikutnya dari Peraturan Pemerintah ini dapat ditelusuri bahwa maksud pendidikan keagamaan adalah pendidikan pada lembaga pendidikan dengan ciri khas agama tertentu. Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa pendidikan agama berorientasi pada mata pelajaran agama yang diajarkan di sekolah sedangkan pendidikan keagamaan berorientasi pada lembaga pendidikan keagamaan yang mengajarkan pemahaman agama lebih dari yang diberikan sekolah.

¹³⁵ Apit, “*Pendidikan Keagamaan Politik Pendidikan Penebus Dosa*”, Gatra, No 10 Th. 2008 (Edisi Kamis, 17 Januari 2008). hal. 18.

¹³⁶ PP No 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan

Peraturan Pemerintah N0 55 tahun 2007 memuat ketentuan pendidikan Keagamaan yang *pertama* ketentuan umum pendidikan Keagamaan (Pendidikan Agama sebagai lembaga) terdapat pada pasal (8) tentang fungsi dan tujuan pendidikan keagamaan pasal (9) tentang jenis pendidikan keagamaan pasal (10) tentang sumber ilmu yang diajarkan pasal (11) tentang peserta didik pasal (12) tentang peranan pemerintah terhadap pendidikan keagamaan pasal (13) tentang pendirian dan bentuk pendidikan keagamaan. Pasal yang langsung berhubungan dengan pendidikan Keagamaan Islam antara lain :

Pasal (14) Bentuk pendidikan keagamaan Islam, dalam pasal ini disebutkan bahwa bentuk pendidikan keagamaan Islam adalah diniyah dan pesantren tidak termasuk Madrasah dan sekolah Islam lembaga pendidikan Islam yang statusnya setara dan sedrajad dengan sekolah umum maka dalam PP ini lebih mengatur lembaga pendidikan Islam yang berbentuk diniyah yang diselenggarakan pada jalur formal informal maupun non formal dan pesantren yang mempunyai satuan atau beberapa program pendidikan pada jalur formal, informal maupun non formal.

2. Pendidikan Islam sebagai mata pelajaran dan nilai

Pembahasan pendidikan agama Islam sebagai mata pelajaran lebih banyak kepada eksistensi pendidikan Islam pada sekolah umum, pada lembaga Pondok Pesantren, Madrasah, Sekolah Islam pendidikan Islam menjadi ruh pendidikan pada lembaga-lembaga tersebut.

Pendidikan Islam pada masa Belanda tidak diajarkan pada sekolah – sekolah umum hanya di perguruan tinggi Fakultas-fakultas hokum ada mata kuliah Islamologi. Dosen-dosen yang memberi kuliahpun bukan orang Islam dengan literature buku yang dikarang para orientalis.tetapi para mubaligh berusaha memberikan pelajaran Pendidikan Islam pada sekolah umum diluar jam sekolah pada hari minggu atau jum'at¹³⁷

Pada masa jepang pendidikan Islam di sekolah-sekolah umum mulai ada kemajuan , di Sumatra Organisasi Islam yang tergabung dalam majlis tinggi mengajukan usul pada Pemerintah Jepang agar disekolah-sekolah pemerintah diajarkan pendidikan Islam sejak sekolah rakyat 3 tahun dan usulan itu diterima tapi hanya hanya berlaku di Sumatra dengan syarat tidak ada anggaran biaya untuk guru-guru Agama.¹³⁸

Sejak berdirinya kedaulatan RI pendidikan agama diajarkan disekolah umum sengguhpun peraturan itu hanya berlaku bagi sekolah negeri tidak menyangkut madrasah dan sekolah Islam.¹³⁹

Pada masa kabinet RI pertama tahun 45 mentri PP dan K memberikan surat edaran yang isinya pendidikan budi pekerti pada masa pemerintahan Jepang bolch diganti dengan pendidikan Agama, surat edaran ini hanya bersifat himbauan sehingga belum mempunyai dasar yang kuat maka pelaksanaannya hanya bersifat suka rela.

¹³⁷ Zuhairini, Abdul Ghofur, Slamet As.Yusuf. *Metodik Khusus Pendidikan Agama*. (Malang : Biro Ilmiah Fakultas Tarbiyah, 1981), hal. 14-15.

¹³⁸ Fak Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang. *Proses*, hal. 16.

¹³⁹ *Ibid.*, hal. x.

Surat keputusan bersama Menteri PP dan K No. 1285/K.7 tanggal 12-12-1946 dan Menteri Agama No. 1142 /BHG.A tanggal 12-12-1946 atas usulan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat menyatakan bahwa pendidikan agama diberikan disekolah-sekolah negeri dengan syarat diminta sekurang-kurangnya diminta 10 orang murid.¹⁴⁰

Praturan pemerintah yang pertama kali memuat keberadaan pendidikan Islam harus diajarkan disekolah adalah UU RI no 4 tahun 1950 menyebutkan bahwa : “Disekolah-sekolah negri diadakan pelajaran-pelajaran Agama orang tua murid menetapkan apakah anaknya akan mengikuti pelajaran tersebut ataukah tidak.”

Merujuk pada UU RI No 4 tahun 1950 dari sisi kurikulum pelajaran pendidikan agama disekolah hanyalah sebagai pelajaran pelengkap atau pilihan (*Elective*) yang tidak mempengaruhi kelulusan siswa atau sering disebut sebagai pelajaran *privacy* yaitu pelajaran yang menjadi pilihan pribadi dimana siswa atau orang tuanya akan mengikuti pelajaran tersebut atau tidak.

Pendidikan agama dilihat sebagai keyakinan yang sangat personal, kenyataan ini menunjukkan bahwa pengaruh penjajah Belanda begitu kuatnya sampai pada dunia pendidikan bila dilihat dari sejarahnya pendidikan Islam amampu meningkatkan harkat martabat manusia, sehingga menjadi api perjuangan namun dalam prodak undang undang

¹⁴⁰ Ibid., hal. 17.

pada waktu itu belum dijadikan elemen pokok dalam rangka membina membimbing dan mengawal moralitas bangsa.

Pendidikan agama Islam sebagai mata pelajaran di sekolah umum eksistensinya mulai kuat setelah ditetapkannya ketentuan MPRS No II/MPRS/1966 yang menyebutkan : Pendidikan Agama sebagai mata pelajaran wajib disekolah-sekolah Dasar sampai dengan Universitas negeri.¹⁴¹

UU No 2 tahun 1989 menempatkan mata pelajaran pendidikan agama termasuk didalamnya mata pelajaran PAI begitu penting, hal ini tercermin dalam Tujuan Pendidikan secara eksplisit menyebutkan bahwa tujuan pendidikan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya dengan syarat utama adalah manusia yang percaya kepada Tuhan YME.¹⁴² Dalam bab IX pasal 39 ayat (2) tentang kurikulum pendidikan disekolah menyebutkan bahwa setiap lembaga pendidikan manapun harus memuat pendidikan agama.¹⁴³ Dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) disebutkan bahwa pendidikan Pancasila mengarah pada pembentukan akhlaq mulia¹⁴⁴

¹⁴¹ *Ibid.*, hal. xiii.

¹⁴² UU No 2 Tahun 1989 Bab II pasal 4 tentang tujuan pendidikan yang berbunyi : "Pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan YME dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, sehat jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan"

¹⁴³ UU No 2 Tahun 1989 bab IX pasal 39 ayat (2) tentang kurikulum pendidikan disekolah "isi setiap kurikulum, setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan wajib memuat :

- a). Pendidikan Pancasila.
- b). Pendidikan Agama dan
- c). Pendidikan kewarganegaraan

¹⁴⁴ UU No 2 Tahun 1989 penjelasan pasal 39 ayat (2) "Pendidikan Pancasila mengarahkan pada moral yang diharapkan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu perilaku yang

Pendidikan agama berfungsi sebagai pembentuk iman dan ketaqwaan serta toleransi terhadap sesama pemeluk agama¹⁴⁵

Pendidikan Agama Islam sebagai mata pelajaran di sekolah atau Madrasah mulai kokoh kedudukannya dalam UU No 2 tahun 1989 tentang Sisdiknas, ada ketentuan hukum yang menjamin bahkan mewajibkan kepada setiap lembaga pendidikan baik negeri maupun swasta disetiap jenjang dan jenisnya harus mengajarkan pendidikan agama.

Dalam UU No 20 tahun 2003 keberadaan Pendidikan Islam sebagai mata pelajaran sesungguhnya telah dapat dilacak jejaknya dari UUD 1945 itu sendiri sebagai induk UU Sisdiknas sebagai berikut

1. Memposisikan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia sebagai tujuan pendidikan nasional.
2. Menempatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak sebagai dasar-dasar kecerdasan yang merupakan visi pendidikan nasional. Hal ini menunjukkan konsepsi kecerdasan yang diamanatkan adalah kecerdasan yang merambah pada wilayah spiritualitas dan karakter.
3. Tiga terminologi kunci tersebut sangat identik dengan domain agama,

memancarkan iman dan ketaqwaan terhadap Tuhan YME dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai golongan agama, perilaku yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, perilaku yang mendukung persatuan bangsa dalam masyarakat yang beraneka ragam kebudayaan dan beranekaragam kepentingan, perilaku yang mendukung pada kerakyatan dan kepentingan bersama diatas kepentingan perorangan dan golongan sehingga perbedaan pemikiran, pendapat, ataupun kepentingan diatasi dengan musyawarah dan mufakat, serta perilaku yang mendukung upaya mewujudkan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia”.

¹⁴⁵ UU No 2 tahun 1989 tentang fungsi pendidikan agama hal .91.

“Pendidikan Agama merupakan usaha untuk memperkuat iman dan ketaqwaan terhadap Tuhan YME sesuai dengan agama yang dianut oleh peserta didik yang bersangkutan dengan memperhatikan tuntutan untuk menghormati agama lain dalam hubungan kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat untuk mewujudkan persatuan nasional.

sehingga secara tidak langsung UUD 1945 ini mengamanatkan pentingnya pendidikan agama sebagai basis dan fondasi pendidikan nasional. Dengan sangat kontras hal ini berbeda dari UUD 1945 sebelum diamandemen yang hanya berhenti pada penyelenggaraan sistem pendidikan nasional tanpa penyebutan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia sebagai tujuan dan visi pendidikan nasional.¹⁴⁶

Eksistensi Pendidikan Agama Islam dalam UU Sisdiknas dapat ditemukan pijakan dan akarnya pertama kali dalam konsideran penyusunan UU Sisdiknas tersebut. Inti dari konsideran tersebut adalah perlunya membentuk Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.¹⁴⁷

Pada Bab I tentang Ketentuan Umum yang memaparkan penjelasan konsep sebagai gambaran paradigma yang dianut UU Sisdiknas ini kita bisa menemukan kembali jejak religiusitas tersebut. Item pertama dari ketentuan itu menegaskan bahwa yang dimaksud dengan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan,

¹⁴⁶ Situs Resmi MPR DPR, *Naskah-Naskah UUD 45 dan 4 Tahapan Amandemennya*, <http://www.MPR.go.id/artikel/accesed> 11 April 2008.

¹⁴⁷ Situs Resmi Departemen Dalam Negeri, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, <http://www.dcpdagri.com/-naskah/accesed> 10 April 2008

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.¹⁴⁸ Spiritual keagamaan dan akhlak mulia sebagai kompetensi yang harus dimiliki peserta didik merujuk kepada pendidikan agama. Pendidikan agama lah jalan paling memungkinkan –untuk tidak menyebut satunya– mengantarkan peserta didik memiliki spiritualitas keagamaan dan karakter positif yang terbingkai dalam rumusan akhlak mulia.

Rumusan pendidikan yang mengedepankan spiritualitas ini kemudian menentukan arah tujuan pendidikan nasional. Tentang hal ini dalam Pasal 3 dijelaskan bahwa pendidikan nasional bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Merujuk kepada pendapat pakar pendidikan Islam.

Muhamad Athiyah al-Abrasyi dan Mohamad al-Toumy al-Syaibany tentang tujuan umum yang fundamental bagi pendidikan Islam, dapat disimpulkan bahwa tujuan yang hendak dicapai oleh pendidikan nasional ini selaras dengan tujuan pendidikan Islam. Dengan demikian maka Pasal 3 ini pun memberikan angin segar bagi pendidikan agama dan keagamaan, utamanya Islam.

Dalam Bab X pasal 36 dan 37 disebutkan bahwa penyusunan kurikulum pada semua jalur dan jenjang pendidikan pertama adalah

¹⁴⁸ UU Sisdiknas Bab 1 pasal 1.

mempertimbangkan peningkatan Iman dan Taqwa yang secara spesifik hanya dapat dilakukan oleh pendidikan agama¹⁴⁹ Pendidikan agama dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusi yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang maha Esa serta berakhlaq mulia.¹⁵⁰

Dari rumusan diatas dapat diambil pengertian bahwa Pendidikan agama kembali mendapat perhatian besar bahkan dominan dalam pengaturan kurikulum ini. Perihal prinsip-prinsip penyusunan kurikulum, peningkatan iman dan takwa serta peningkatan akhlak mulia dan agama ditempatkan sebagai prinsip paling atas. Sebagai dimaklumi, iman, takwa, dan akhlak adalah istilah-istilah yang diadopsi dari bahasa agama dan karenanya ia sangat identik dengan pendidikan agama. Dengan demikian pasal ini pun dapat diartikan sebagai religiusitas yang mewarnai undang-undang ini, terlebih secara eksplisit pasal ini juga mengamanatkan agama sebagai hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan kurikulum.

Pendidikan agama kemudian menjadi semakin kuat eksistensinya dalam UU Sisdiknas ini dengan keharusan pendidikan agama masuk dalam muatan kurikulum semua jenjang pendidikan dari mulai dasar, menengah, sampai pendidikan tinggi. Namun demikian, pasal ini mengandung kelemahan konsep. Kelemahan atau kekeliruan konsep ini terletak pada penyamaan pendidikan dengan sekolah. Padahal sekolah hanya merupakan bagian kecil dari pendidikan. Adapun pendidikan itu sendiri mencakup

¹⁴⁹ UU No 20 tahun 2003 tentang sisdiknas Bab X Pasal 36 ayat 3

¹⁵⁰ UU No 20 tahun 2003, hal 75

keluarga, sekolah, dan masyarakat.¹⁵¹ Dari analisis ini dapat dikritisi bahwa maksud pendidikan agama sebagai muatan wajib kurikulum adalah mata pelajaran agama atau pengajaran agama. Karena pendidikan agama dalam arti yang sesungguhnya tidak mungkin dipikulkan tanggung jawabnya penuh pada sekolah.

Dalam Bab V Pasal 12 butir a. disebutkan pendidikan agama merupakan hak peserta didik, peserta didik harus diajarkan oleh guru agama yang seagama.¹⁵² Dalam penjelasan pasal 12, Penyediaan guru agama yang seagama dengan peserta didik difasilitasi dan disediakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah.¹⁵³ Pasal ini mengatur hak peserta didik yang wajib diberikan oleh satuan pendidikan, menegaskan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Pasal ini lah yang membuat UU Sisdiknas berkali-kali mengalami penundaan untuk ditandatangani dan disahkan. Point-point penting yang patut digaris bawahi dari pasal ini adalah 1) Pendidikan agama merupakan hak anak didik, 2) Pendidikan agama merupakan kewajiban yang harus dipenuhi satuan pendidikan, 3) Pendidikan agama

¹⁵¹ RUU Sisdiknas Sudah Dipolitisir, [http:// www.gatra.com/artikel/accesed](http://www.gatra.com/artikel/accesed) 13 Mei 2003, Sudarminta, *Pendidikan Moral di Sekolah Jalan Keluar Mengatasi Krisis Moral Bangsa?*, dalam Widiatono, *Pendidikan Manusia Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas. 2004), h. 107.

¹⁵² UU No 20 tahun 2003 pasal 12 ayat 1 (a)
Mendapat pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama

¹⁵³ UU No 20 tahun 2003 penjelasan pasal 12, Penyediaan guru agama yang seagama dengan peserta didik difasilitasi/disediakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah. sesuai dengan kebutuhan suatu satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam pasal 41 ayat 3.

harus diajarkan sesuai dengan agama anutan peserta didik, dan 4) Pendidikan agama harus diajarkan oleh pendidik yang seagama. Dengan kata lain pasal ini mengatur paradigma, materi, dan pendidik dalam pendidikan agama. Mengingat pasal ini memiliki implikasi yang sangat luas dan besar maka pasal ini mengamanatkan lahirnya sebuah peraturan pemerintah yang mengatur pelaksanaannya. Dari sini lah kemudian lahir Peraturan Pemerintah yang mengatur Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.

Eksistensi Pendidikan Agama sebagai mata pelajaran seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 55 tahun 2007 tentang pendidikan Agama dan keagamaan, pendidikan agama didefinisikan sebagai pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Kelebihan rumusan ini terletak pada jangkauan pendidikan agama terhadap ranah kognitif, afektif dan psikomotor yang justru selama ini terabaikan dari pendidikan agama. Pengabaian ini pula yang melahirkan kritik terhadap pendidikan agama yang hanya mengajarkan pengetahuan agama bukan cara beragama.

Rumusan pendidikan yang dianut Peraturan Pemerintah ini dengan demikian telah ada pada konsep yang benar tentang pendidikan. Sayangnya kelemahan konsep juga terkandung dalam rumusan ini.

Rumusan ini mengidentikan pendidikan dengan persekolahan sehingga untuk pelaksanaannya berorientasi pada mata pelajaran atau mata kuliah bukan pada kultur keagamaan (religius culture).¹⁵⁴

Peraturan Pemerintah ini selanjutnya mengatur tentang : fungsi pendidikan agama, tujuan pendidikan agama, pengelolaan pendidikan agama, hak peserta didik pendidikan agama, pendidik pendidikan agama, materi pendidikan agama, tempat pendidikan pendidikan agama, tempat beribadah pendidikan agama, kurikulum pendidikan agama, dan sanksi bagi satuan pendidikan yang melanggar ketentuan tentang pendidikan agama ini.

Keberpihakan yang besar terhadap pendidikan agama ternyata kurang didukung dengan konsep yang kuat tentang komponen-komponen pendidikan agama yang diaturnya. Dari sudut pandang ini terungkap beberapa point yang patut dikritisi dari Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 ini. Pertama, dalam hal pendidik tidak disebutkan secara jelas kualifikasi yang harus dimiliki. PP ini tidak jauh berbeda dari Undang-Undang yang hanya menyebutkan pendidik tersebut harus seagama dengan peserta didik. Pengaturan pendidik yang diangkat dalam PP ini hanya sekitar pengadaan tenaga pendidik. Dengan hanya merujuk PP ini, siapa pun boleh mengajarkan agama selama ia seagama dengan peserta didik yang diajarinya.

¹⁵⁴Masykuri, *Pengamalan Budaya (Religius Culture) di Sekolah Umum*, artikel didownload dari www.ditpais.net (situs resmi Direktorat Pendidikan Agama Islam)

Selebihnya, PP ini sarat dengan rumusan dan konsep yang ideal tentang pendidikan agama. Pada pasal 5 ayat 4 dapat ditemukan konsep yang sangat ideal yang menyebutkan bahwa pendidikan agama membangun sikap mental peserta didik untuk bersikap dan berperilaku jujur, amanah, disiplin, bekerja keras, mandiri, percaya diri, kompetitif, kooperatif, tulus, dan bertanggung jawab. Ayat ini menyebutkan sepuluh karakter unggulan yang di negara-negara lain ramai dikejar melalui pendidikan karakter. Tetapi sayangnya, di sini pulalah letak kelemahan pendidikan agama di Indonesia selama ini. Bahkan setelah UU Sisdiknas ini disahkan dan PP yang mengatur pendidikan agama lahir, pendidikan agama di sekolah-sekolah masih belum memiliki korelasi dengan pembentukan karakter (character building) seperti yang diamanatkan PP ini. Pendidikan agama masih berkutat sebagai pengajaran pengetahuan agama yang mengeram dalam ranah kognitif.

Pendekatan dan strategi pembelajaran juga dirumuskan secara ideal. Ayat 7 dari Pasal 5 menjelaskan, pendidikan agama diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, mendorong kreativitas dan kemandirian, serta menumbuhkan motivasi untuk hidup sukses.” Jauh panggang dari api, demikian barang kali ilustrasi tentang implementasi pendidikan agama yang sangat jauh dari strategi ideal yang diamanatkan

Eksistensi pendidikan agama dalam PP ini semakin menguat dan berani dengan adanya sanksi bagi satuan pendidikan yang menyalahi ketentuan

dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (2) sampai dengan ayat (7), dan Pasal 5 ayat (1). Sanksi yang diberikan berbentuk sanksi administratif berupa peringatan sampai dengan penutupan Pengaturan lebih lanjut tentang hal ini dilimpahkan kepada Menteri Agama. Hal ini dipahami sebagai tanggung jawab pemerintah untuk melindungi keyakinan warganya dari upaya-upaya mepropagandakan agama kepada orang yang telah beragama.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB IV

PENGEMBANGAN FUNGSI PENDIDIKAN ISLAM

BERDASAR UNDANG-UNDANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

Usaha meningkatkan mutu sumber daya manusia, mengejar ketertinggalan di segala aspek kehidupan dan menyesuaikan dengan perubahan global, bangsa Indonesia melalui DPR dan Presiden pada tanggal 11 Juni 2003 telah mengesahkan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 yang terdiri dari 22 Bab dan 77 pasal tersebut juga merupakan pengejawantahan dari salah satu tuntutan reformasi yang marak sejak tahun 1998.

Perubahan mendasar yang dicanangkan dalam Undang-undang Sisdiknas yang baru tersebut antara lain adalah demokratisasi dan desentralisasi pendidikan, peran serta masyarakat, tantangan globalisasi, kesetaraan dan keseimbangan, jalur dan jenjang pendidikan serta peserta didik. Pendidikan merupakan salah satu struktur institusional penting yang melengkapi keseluruhan sistem sosial. Masalah pendidikan sangat berbeda dengan masalah pemerintahan dan hukum yang ikut mengendalikan kekuasaan. Pendidikan Islam menjadi institusi penting dalam keseluruhan sistem pendidikan nasional, dapat dilihat dari keberadaan pendidikan Islam berpengaruh besar terhadap pertumbuhan masyarakat, maka keberadaan pendidikan Islam baik sebagai lembaga pendidikan maupun proses pendidikan

(mata pelajaran dan nilai) menjadi institusi penting dalam tatanan sosial masyarakat.

Lembaga pendidikan Islam merupakan institusi yang berfungsi menanamkan nilai-nilai Islam melalui proses pembelajaran yang terencana,¹⁵⁵ dalam konteks sosial *Emile Durkheim* mengatakan agama sumber kebudayaan yang sangat tinggi, maka lembaga pendidikan Islam merupakan lembaga yang bertujuan untuk melestarikan nilai-nilai Islam atau lembaga untuk melestarikan budaya¹⁵⁶ yang ada dalam masyarakat Islam.

Pendidikan adalah hubungan normatif antara individu dan nilai¹⁵⁷, pendidikan Islam berdasarkan nilai-nilai Islam melalui lembaga dan pelajaran agama Islam, maka perlu dikaji sejauh mana pendidikan Islam berfungsi terhadap sistem pendidikan nasional. Fungsi secara umum adalah fungsi dalam pembangunan karena pada dasarnya pembangunan sejati harus mengacu pada pemuliaan harkat

¹⁵⁵ Dalam teori fungsional, masyarakat dipandang sebagai suatu lembaga sosial yang berada dalam keseimbangan, yang memolakan kegiatan manusia berdasarkan norma-norma yang dianut bersama serta dianggap sah serta mengikat peran serta masyarakat itu sendiri Lembaga-lembaga sosial yang ada dalam masyarakat secara keseluruhan merupakan sistem sosial yang sedemikian rupa dimana setiap bagian (masing-masing unsur kelembagaan itu) saling tergantung dengan semua bagian yang lain, sehingga perubahan suatu bagian akan mempengaruhi bagian yang lain yang pada akhirnya akan mempengaruhi kondisi sistem secara keseluruhan.

¹⁵⁶ Teori fungsional melihat budaya sebagai pengetahuan yang kurang lebih agak terpadu, sebagai pengetahuan, kepercayaan dan nilai hal ini menentukan kondisi bertindak anggota suatu masyarakat. Pendidikan merupakan usaha melestarikan budaya maka pendidikan Islam menjadi pengetahuan, penanam kepercayaan dan nilai yang berpengaruh pada kondisi bertindak suatu masyarakat. Kebudayaan menyatu dengan sistem sosial dalam arti ia berada dalam batasan sarana dan tujuan, yang dibenarkan dan yang dilarang dengan menentukan peran dimana anggota masyarakat menghadapi harapan-harapan situasi sosial mereka yang telah mapan

¹⁵⁷ Joy A. Palmer, *Fifty Modern Thinkers on Education* (50 Pemikir Paling Berpengaruh Terhadap Pemikiran Dunia Pendidikan Modern), alih bahasa FaridAssifa, Cct. 1(Yogyakarta : IRCisoD, 2006), hal.75

dan martabat manusia yang diperankan oleh pendidikan agama.¹⁵⁸ Dengan kata lain sebagian dari keseluruhan sistem pendidikan nasional, pendidikan Islam sebagai lembaga maupun sebagai proses lewat mata pelajaran dan nilai mempunyai fungsi manifes dan laten.¹⁵⁹ Sehubungan dengan hal tersebut maka fungsi manifes dan laten pendidikan Islam adalah usaha untuk memelihara keseimbangan seluruh sistem pendidikan nasional.

Pendidikan Islam menjadi satu karakteristik dalam sistem pendidikan nasional, ketiadaan pendidikan Islam berdampak pada terganggunya jati diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang beragama dan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga sistem pendidikan nasional tidak akan berjalan dengan baik bila pendidikan Islam tidak berfungsi. Hal ini mengingat pendidikan Islam menjadi sub bagian integral dari sistem pendidikan nasional.

Eksistensi pendidikan Islam nampak pada pendidikan Islam sebagai Lembaga maupun pendidikan Islam sebagai proses pembelajaran (mata pelajaran dan nilai).

A. Pendidikan Islam Sebagai Lembaga

Lembaga Pendidikan (baik formal, non formal atau informal) adalah tempat transfer ilmu pengetahuan dan budaya (*peradaban*). Melalui praktik pendidikan, peserta didik diajak untuk memahami bagaimana sejarah atau pengalaman budaya dapat ditransformasi dalam zaman kehidupan yang akan

¹⁵⁸ M. Masyhur Amin (ED), *Moralitas pembangunan*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar 1994), hal. 8.

¹⁵⁹ Tomas E O'dea : *Sosiologi Agama Suatu Pengalaman Awal*, alih bahasa Yasogawa, (Jakarta : Raja grafindo persada, 1996), hal. 5.

mereka alami¹⁶⁰ serta mempersiapkan mereka dalam menghadapi tantangan dan tuntutan yang ada di dalamnya.

Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa lembaga pendidikan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap corak dan karakter masyarakat. Belajar dari sejarah perkembangannya lembaga pendidikan di Indonesia memiliki beragam corak dan tujuan yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi yang melingkupi, mulai dari zaman kerajaan dengan bentuknya yang sangat sederhana dan zaman penjajahan yang sebagian memiliki corak ala barat (gereja) dan corak ketimuran ala pesantren sebagai penyeimbang, serta model dan corak kelembagaan yang berkembang saat ini tentunya tidak terlepas dari kebutuhan dan tujuan-tujuan tersebut.¹⁶¹

Pendidikan secara hakiki diselenggarakan melalui dua bentuk yaitu pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan diselenggarakan oleh masyarakat pendidikan Islam lebih banyak diselenggarakan oleh masyarakat,¹⁶² maka pendidikan Islam termasuk masalah sosial, sehingga dalam kelembagaannya tidak terlepas dari masyarakat yang ada. Lembaga disebut juga institusi atau pranata, sedangkan lembaga pendidikan Islam adalah wadah atau tempat berlangsungnya proses pendidikan Islam yang bersamaan

¹⁶⁰ George Ritzer, *Sociology*, hal. 133.

Dalam teori fungsional tolcat person suatu sistem mempunyai fungsi *Latency* sistem harus memelihara pola, melengkapi dan memperbaiki pola kultur yang telah ada, mengendalikan siswa dengan seperangkat budaya yang ada sehingga memotivasi mereka untuk berindak

¹⁶¹ Khamudin al Habsy, *Lembaga Pendidikan Sebagai Agen Perubahan*, <http://kangsiyiking.wordpress.com/-artikel/accesed> 10 April 2008.

¹⁶² Isjoni, *Memajukan Bangsa Dengan Pendidikan*, (Yogyakarta:Pustaka pelajar 2008), hal. 17. UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyebutkan Penyelenggara pendidikan adalah pemerintah, pemerintah Daerah atau masyarakat

dengan proses pembudayaan. Dengan diberlakukannya UU No 20 Tahun 2003 tidak ada dikotomi antara sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat, termasuk dalam pemberian gaji kepada pendidik dan tenaga pendidikan¹⁶³

Fungsi Pendidikan Islam mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agama Islam/menjadi ahli agama Islam, nilai-nilai tersebut tersusun relatif tetap atas pola-pola tingkah laku¹⁶⁴, peranan-peranan dan relasi-relasi yang terarah dalam mengikat individu yang mempunyai otoritas formal dan sanksi hukum, guna tercapainya kebutuhan-kebutuhan sosial dasar. Sedangkan yang dimaksud dengan lembaga pendidikan Islam adalah wadah atau tempat berlangsungnya proses pendidikan Islam yang bersamaan dengan proses pembudayaan.

Persoalan pendidikan Islam sebagai lembaga antara lain mengenai struktur internal yang terdapat dalam tubuh Pendidikan Islam Indonesia. Dalam soal peningkatan sistem pendidikan formal, pendidikan Islam merupakan semacam "beban" yang harus diangkat oleh induknya, yaitu sistem pendidikan nasional pada umumnya. Sedangkan dalam soal pengembangan pendidikan nonformal, ia menjadi "pelopor" yang tak mudah diikuti. Artinya pendidikan Islam merupakan pelopor penyelenggara pendidikan nasional akan tetapi kondisi riil

¹⁶³ Ibid, hal, 18.

¹⁶⁴ Teori fungsional Tolcat person, sistem akan berfungsi manakala mempunyai unsur *latency* (pemeliharaan pola) sistem harus melengkapi, memelihara pola-pola kultur lainnya dengan sistem tindakan menjadi sistem kultur yaitu melaksanakan fungsinya memelihara pola dengan mengendalikan aktor dengan seperangkat norma yang memotifasi untuk bertindak

sekarang kurang berkembang dan tertinggal sehingga menjadi beban bagi pendidikan nasional sebagai induknya untuk meningkatkan kualitas pendidikan Islam.

Masuknya Lembaga Pendidikan Islam dalam sub sistem pendidikan nasional mempunyai konsekuensi terutama pola pembinaan yang harus mengacu pada sekolah-sekolah umum, madrasah, dan sekolah Islam tidak ketinggalan pesantren apabila ingin diakui secara legal formal kelulusannya harus mengikuti kurikulum nasional mengikuti ujian negara dan segala peraturan yang dikeluarkan oleh departemen pendidikan nasional. Namun demikian dengan diberlakukannya Undang-undang sistem pendidikan nasional telah melahirkan beberapa kendala dan anomali (*ketidaknormalan/ penyimpangan*) hal yang paling menyolok adalah adanya dualisme pembinaan antara Departemen Agama, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Departemen Dalam Negeri. Sampai saat inipun pemerintah belum mampu menganekatkan citra madrasah sama dengan sekolah umum yang dikelola oleh Departemen pendidikan nasional kecuali beberapa madrasah yang berkualitas tinggi

Dualisme struktur pengelolaan pendidikan secara umum merupakan persoalan yang selama ini dirasakan oleh lembaga pendidikan Islam, hal ini berdampak pada pelayanan, perhatian, pendanaan dan persoalan kebijakan lainnya. Ketidak normalan itu antara lain pada status guru yang berbeda, pada lembaga sekolah umum dan sekolah Islam guru agamanya kebanyakan diangkat oleh Depag dan secara struktural bertanggung jawab pada Depag

tetapi bekerja pada lingkungan dinas pendidikan daerah yang secara struktural dibina oleh Departemen Pendidikan Nasional. Demikian pula sebaliknya guru agama yang diangkat oleh Departemen Pendidikan Nasional dalam pembinaanya diserahkan kepada Departemen Agama, hal ini berdampak pada kinerja guru dan persoalan administratif yang ruwet, belum lagi ketika ada kebijakan pemerintah yang baru misalnya sertifikasi dapat dirasakan guru agama yang berada di dinas pendidikan daerah tetapi proses sertifikasinya melalui Departemen Agama tertinggal dengan yang lain.

Dualisme pengelolaan dan desentralisasi memicu terjadinya kesenjangan antara pendidikan Islam dengan pendidikan umum, tidak adanya koordinasi dan sinergi mengakibatkan pada terhambatnya arus informasi yang berdampak pada interpretasi kebijakan bahkan antara departemen Pendidikan Nasional dengan Departemen Agama ada semacam garis demarkasi pembagian wilayah yang tidak dapat dimasuki oleh siapapun. Kenyataan itu memperlambat dan mengganggu terlaksananya lembaga pendidikan Islam sebagai lembaga yang berada dalam sistem sosial dan mempunyai fungsi merubah masyarakat menuju perbaikan¹⁶⁵ sementara desentralisasi pada dasarnya ingin mempercepat pelayanan dan memotong arus birokrasi yang panjang. Maka wacana menggabungkan semua lembaga pendidikan dalam satu departemen yang khusus mengelola semua lembaga pendidikan di Indonesia perlu

¹⁶⁵ Sebagai sistem sosial, lembaga pendidikan harus memiliki fungsi dan peran dalam perubahan masyarakat menuju ke arah perbaikan dalam segala lini. Dalam hal ini lembaga pendidikan memiliki dua karakter secara umum. *Pertama*, melaksanakan peranan fungsi dan harapan untuk mencapai tujuan dari sebuah sistem. *Kedua* mengenali individu yang berbeda-beda dalam peserta didik yang memiliki kepribadian dan disposisi kebutuhan. Kemudian sebagai agen perubahan lembaga pendidikan berfungsi sebagai alat untuk: Pengembangan pribadi, Pengembangan warga, Pengembangan Budaya, Pengembangan bangsa

mendapatkan perhatian\, hal ini untuk mendorong pertumbuhan pendidikan yang efektif dan efisien, tanpa diskriminasi dan berkeadilan.

Arus reformasi yang mulai bergulir pada tahun 1989 berdampak pada keluarnya Undang-Undang No 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah dalam pasal 7 disebutkan bahwa bagian dari kewenangan pemerintah daerah diantaranya pengelolaan dalam bidang pendidikan¹⁶⁶. Maka sekolah-sekolah umum secara struktural pengelolaannya dibawah departemen Pendidikan Nasional diserahkan pengelolaannya pada Pemerintah Daerah sementara madrasah masih sentralistik dikelola oleh pemerintah pusat hal ini mengakibatkan ketimpangan karena secara garis besar desentralisasi pendidikan akan membawa konsekuensi dalam bidang pemerintahan, sosial budaya, pembelajaran, anggaran pendidikan.¹⁶⁷

Otonomi daerah memberikan tempat bagi terbentuknya kapital sosial yang diperlukan oleh daerah itu sendiri, Fransis Fakuyama dalam bukunya *The Great Disruption* mengemukakan betapa pentingnya kapital sosial yang dapat dikembangkan terutama di daerah.¹⁶⁸ Otonomi daerah dimaknai sebagai otonomi pendidikan dimana usaha menata kembali pendidikan yang sentralistik kepada pendidikan yang berbasis masyarakat, dan juga berarti untuk memperkuat dasar-dasar pendidikan pada tingkat *grass-root* untuk

¹⁶⁶ Fak Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, *Dinamika Pesantren dan Madrasah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2002), hal 263

Kewenangan Daerah Mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan kecuali, kewenangan dalam bidang : politik Luar negeri, Pertahanan keamanan, Peradilan, Moneter Fiskal, Agama dan kewenangan dalam bidang lain.

¹⁶⁷ Hasbullah, *Otonomi Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 41-49.

¹⁶⁸ HAR. Tilar, *Perubahan Sosial dan pendidikan*, (Jakarta : Gramedia 2002) hal.78.

membentuk masyarakat yang bersatu.¹⁶⁹ Dalam pendidikan Islam otonomi pendidikan bukan barang yang baru mengingat pendidikan Islam (Pesantren, Madrasah dan sekolah Islam) adalah lembaga pendidikan yang berbasis masyarakat.

Lembaga pendidikan Islam dalam penelitian ini antara lain :

1. Pesanten

Lembaga Pendidikan Agama Islam pertama didirikan di Indonesia dalam bentuk pesantren.¹⁷⁰ Pesantren sebagai Lembaga pendidikan Islam minimal mempunyai 3 unsur yaitu; *Kiyai*, *Syeh*, dan *usdaz* yang mendidik serta mengajar, Santri dengan asrama dan Masjid¹⁷¹. Zamakhsari Dhoefier menyebutkan ada 5 elemen pokok dalam pesantren yaitu; pondok, masjid, pengajaran kitab-kitab klasik dan kiyai.¹⁷²

Sesuai dengan latar belakang sejarah pesantren, dapat dilihat tujuan utama didirikannya pesantren adalah untuk mendalami ilmu-ilmu agama Islam¹⁷³, dengan karakternya yang khas "*religious oriented*", pesantren telah mampu meletakkan dasar-dasar pendidikan keagamaan yang kuat. Para santri tidak hanya dibekali pemahaman tentang ajaran Islam tetapi

¹⁶⁹ HAR. Tilar, *Pembenahan pendidikan Nasional*, (Jakarta: Rineke Cipta, 2002) hal 76

¹⁷⁰ Zamakhsyari Dhoefier, *Tradisi Pesantren* (Jakarta: LP3ES, 1982). dan M. Sarijo, *Sejarah Pondok Pesantren di Indonesia*, (Jakarta: Dharma Bakti, 1980), Hal. 6.

¹⁷¹ Ditpekapontren, *Pedoman pembinaan pondok pesantren*, (Jakarta: Depag RI Dirjen Bimbingan Islam, 2003), hlm. 8.

¹⁷² Zamakhsyari Dhoefier, *Tradisi*, hal. 44.

¹⁷³ Haidar Putra Dauli, *Historitas*, Hal. 9.

juga kemampuan untuk menyebarkan dan mempertahankan Islam ¹⁷⁴

Menyebarkan merupakan usaha mengubah lingkungan eksternal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam sedangkan mempertahankan adalah usaha mempertahankan pola perilaku yang diyakini untuk mencapai pada tujuan yang diinginkan.

Pesantren merupakan sebuah sub kultur yang mempunyai karakter khas. karakter itu terlihat pada integralnya system pendidikan dalam satu atap dan adanya elemen yang merupakan ciri khusus dari keberadaan pesantren ¹⁷⁵.

Menurut Abdurrahman Wahid, paling tidak ada tiga elemen penting dalam sebuah pesantren sebagai sub kultur yaitu :

- a) Pola kepemimpinan pondok pesantren yang mandiri tidak terkooptasi oleh negara. pola
- b) Kitab - kitab rujukan umum yang selalu dipergunakan dari berbagai abad.
- c) Sistem nilai (*value system*) yang digunakan adalah bagian dari masyarakat luas. ¹⁷⁶

Elemen pertama adalah Kepemimpinan kiai - ulama di pondok pesantren sebagai karakter khas, Kehasan itu karena mereka memakai

¹⁷⁴ Teori fungsional structural sistem harus adaptation yaitu sistem harus menyesuaikan diri dengan lingkungan untuk menjamin kelangsungan hidupnya dengan mengubah lingkungan eksternal.

¹⁷⁵ Fungsi Integrasi yaitu Sistem harus mengatur hubungan hubungan dan mengendalikan komponen yang ada sebagai usaha mengalihkan norma kedalam sistem sosial.

¹⁷⁶ Marzuki Wahid (Ed). *Pesantren*, hal.14.

kepemimpinan pra-moderen. Relasi kepemimpinan antara kiai dan santri dibangun atas landasan kepercayaan, bukan patron *klien* sebagaimana dilakukan masyarakat pada umumnya. Kiai memegang peranan atau otoritas penuh dalam kepemimpinan pondok pesantren. Sekalipun demikian banyak kiai yang telah melakukan perubahan dalam mengelola pondok pesantren. Perubahan itu terlihat dari banyaknya pondok pesantren yang telah mampu menjadi pioner dari masyarakat sekitar untuk melakukan modernisasi baik dalam hubungannya dengan pendidikan atau aktifitas kehidupan sehari - hari.¹⁷⁷

Elemen kedua adalah memelihara dan mentransfer literature - literature umum dari generasi ke generasi dalam berbagai abad, yang mengkonstruksi secara langsung konsep unik kepemimpinan kyai - ulama. Teks - teks kuno (Kitab Kuning) menyatakan kontinuitas tradisi yang benar (*right tradition*) memperhatikan ilmu - ilmu agama sebagaimana dipegangi oleh masyarakat muslim dan Imam - imam besar di masa lampau. Ini juga merupakan sebuah kemungkinan cara untuk mempertahankan standar ilmu - ilmu agama di masa depan hanya dengan jalan demikian masyarakat Indonesia dapat mempertahankan kemurnian pengajaran agama. Inilah konsep pendidikan Agama Islam di Pondok pesantren yang berorientasi pada *Ahl as Summah*. Kajian Kitab kuning dalam wacana Pesantren dipandang sebagai upaya untuk membekali para

¹⁷⁷HAR. Tilar, *Perubaha*, hal.11.

Perubahan yang terjadi dalam teori sosial disebut Perubahan secara diakronis, diantaranya dipengaruhi teori fungsional tolcott parsons melihat kenyataan sosial bukan sesuatu yang setatis tapi merupakan suatu proses.

santri dengan pemahaman warisan yurisprudensi masa lampau atau jalan kebenaran menuju kesadaran akan penghambaan diri kepada Allah (*l'hudiyah*), disamping itu juga dalam mengemban tugas - tugas masyarakat di masa depan.

Elemen yang ketiga adalah kekhasan sistem nilai, dalam kenyataannya system nilai tidak dapat dilepaskan dari kedua elemen lainnya yaitu kepemimpinan kiai dan literature yang dipakai. Sistem nilai itu memainkan peranan penting sebagai frame work yang diinginkan komunitas pondok pesantren demi kepentingan masyarakat pada umumnya. Misalnya, kesalehan adalah merupakan system nilai yang dijadikan kiai untuk mempromosikan solidaritas antar berbagai status. Framework system nilai pondok pesantren yang diderivasi dari doktrin - doktrin barokah merupakan pancaran dari kyai dan santri. Kepercayaan bahwa pengawasan kiai pada santri akan mempermudah penguasaan ilmu agama yang benar. Para santri juga harus merekonstruksi pengalaman hidup kiai dalam hal pembelajaran agama. Mereka dituntut untuk tirakat terutama dalam permulaan belajarnya.

Karakter khas itulah yang sampai saat ini ini merupakan landasan filosofi kelangsungan hidup sebuah pondok pesantren. Dalam kondisi dan situasi apapun ketiga elemen ini harus menjadi satu bagian yang integral. Ketika salah satu tidak ada maka eksistensi pondok pesantren akan

semakin pudar.¹⁷⁸

Kekuatan utama dari pondok pesantren sebagai lembaga penyelenggara pendidikan nonformal terletak pada kemampuannya untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada segenap golongan umur dan masyarakat. Di lain pihak, keterbatasan yang terdapat pada pondok pesantren sebagai pusat pendidikan non-formal ialah bahwa pelayanan pendidikan yang diberikannya kepada masyarakat terpusat pada soal keagamaan semata-mata. Padahal kebutuhan masyarakat luas akan pelayanan pendidikan di masa sekarang meliputi berbagai macam jenis, seperti kesehatan, pertanian, berbagai jenis teknologi, pengetahuan umum, dan sebagainya.

Sebagai lembaga pendidikan yang mandiri dan otonom mengelolaannya pesantren dalam sistem pendidikan dan pengejarannya berbeda antara yang satu dengan yang lain, masih juga ada pondok pesantren yang mempertahankan sistem pendidiknya dan pengajaran seperti masa sebelum abad 20. Namun demikian khakekatnya sama yaitu suatu lembaga pendidikan tempat mengkaji dan mendalami ajaran-ajaran keislaman. Fungsi pokok pesantren adalah pusat pengkajian ilmu-ilmu keagamaan Islam dan terbatas pada ruang lingkup ilmu agama sebagai upaya membedakan dengan ilmu-ilmu umum¹⁷⁹ dengan demikian pesantren sebagai lembaga pendidikan fokus pada tujuannya meskipun adaptasi terhadap lingkungan terus dilakukan, konsistensi pada tujuan itu yang

¹⁷⁸ Dalam teri fungsional Pesantren sebagai sitem pendidikan Islam harus dapat beradaptasi, berintegrasi dan memelihara pola sistem yang diyakininya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan hal ini dilakukan untuk menjaga agar pesantren dapat menjaga kelangsungan hidupnya

¹⁷⁹ Inam Mujiono, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, (diktat Kuliah 1994), Hal. 27.

melahirkan pola perilaku yang terintegrasi dalam masyarakat

Secara garis besar pesanten dapat dibagi menjadi tiga sesuai dengan sistem pengajarannya:

- a. Pondok pesantren dengan sistem pengajaran non klasikal dan para santri tinggal dalam pondok tersebut kiyai mengajarkan kitab-kitab dalam bahasa Arab yang ditulis para ulama besar
- b. Pondok pesantren dengan sistem pengajaran weton yaitu para santri datang kepada kiyai dalam waktu tertentu dan tidak menetap dalam pondok
- c. Pondok pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dengan mendirikan Madrasah bahkan sekolah umum pondok seperti ini dikenal dengan pondok modern

Sistem pengajaran pesantren yang bervariasi ini sebagai sebuah bukti bagaimana pesantren sangat memperhatikan kondisi sosial masyarakat, sebagai lembaga pendidikan pesantren menjadi lembaga pendidikan yang memang tumbuh dan berkembang berbasis pada masyarakat, pola pengajaran yang sangat fleksibel dan tidak terkesan kaku serta formal sehingga proses pembelajarannya dapat dilakukan dengan tanpa keterpaksaan dan memang berasal dari sebuah dorongan *lilahita'ala* menuntut ilmu, tidak ada kesan komersial sama sekali dan jauh dari kepentingan dunia sesaat serta hingar-bingar duniawi.

Pesantren juga mengalami perkembangan sebagai respon terhadap transformasi sosial dengan mengajarkan para santri disamping menguasai

ilmu-ilmu agama secara menyeluruh , secara khusus dia juga punya keahlian dalam mata pelajaran tertentu, pada lembaga pesantren terdapat spesialisasi penguasaan mata pelajaran tertentu. Maka sering terjadi seorang santri harus berpindah pada pesantren lain dalam rangka penguasaan spesialisasi ilmu yang ada pada pesantren tersebut.

Masuknya model pendidikan sekolah membawa dampak yang kurang menguntungkan bagi umat Islam saat itu, mengarah pada lahirnya dikotomi ilmu agama (Islam) dan ilmu sekuler (*ilmu umum dan ilmu sekuler Kristen*). Dualisme model pendidikan yang konfrontatif tersebut telah mengilhami munculnya gerakan reformasi dalam pendidikan pada awal abad dua puluh. Gerakan reformasi tersebut bertujuan mengakomodasi sistem pendidikan sekolah ke dalam lingkungan pesantren¹⁸⁰. Corak model pendidikan ini dengan cepat menyebar tidak hanya di pelosok pulau Jawa tetapi juga di luar pulau Jawa. Dari situlah embrio madrasah lahir.

Masuknya madrasah dan sekolah umum memberi nilai plus tersendiri bagi pesantren dengan kondisi seperti itu santri mendapatkan dua keuntungan yaitu mendapatkan ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum dan mendapatkan ijazah sebagai pengakuan formal tingkat pendidikan yang sudah ditempuh.

Secara garis besar, pesantren sekarang dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu

¹⁸⁰ Thoha, Chabib, dan Muth'i. *PBAI-P.11*, hal. 23.

a. Pesantren tradisional

Yaitu pesantren yang masih mempertahankan sistem pengajaran tradisional, dengan materi pengajaran kitab-kitab klasik yang sering disebut kitab kuning, meskipun dalam pesantren tersebut ada madrasah bahkan sekolah umum tetapi diwajibkan mengikuti pengajian kitab-kitab klasik dengan model sorogan maupun bandungan

b. Pesantren Modern

Yaitu pesantren yang berusaha mengintegrasikan secara penuh sistem klasikal dan sekolah kedalam pondok pesantren. Santri terbagi dalam tingkatan kelas, pengajian kitab diganti berubah menjadi mata pelajaran atau bidang studi dengan sistem pengajaran yang individual dan setadium general.¹⁸¹

Pesantren tradisional belum mampu memberikan peran aktif dalam rangka *sosial engineering* atau rekayasa soaial dan transformasi sosial hal ini dikarenakan ketertinggalan pesantren dalam mengembangkan dirinya, mengingat sejak masa pemerintah belanda mendirikan sekolah umum sebagai tandingan pesantren dalam rangka mempertahankan kekuasaan imperialisnya dengan misi misionaris di Indonesia.

Pesantren moderen pada saat ini sudah mengembangkan ciri diatas sehingga mempunyai posisi yang baik dalam masyarakat karena memberikan muatan pelajaran yang berorientasi pada ilmu agama dan ilmu umum, masyarakat berharap output yang dihasilkan menguasai ilmu

¹⁸¹ Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hal. 156-157.

pengetahuan yang didasarkan pada pemahaman agama yang kuat, menghasilkan lulusan berotak Jerman dan berhati Mekah (*slogan Habibi*). Kelemahamn dari pesantren moderen adalah penguasaan terhadap kitab-kitab klasik kurang maksimal karena paradikma yang digunakan adalah memberikan metode dengan tepat kepada para santris sedangkan materi dapat didalamnya sendiri, kedalaman materi tergantung pada inisiatif santri untuk mengembangkan materi yang seharusnya dikaji.

Persolan umum yang dihadapi pendidikan Islam adalah masalah mutu menejemen dan kurikulum, mutu pendidikan bertolak ukur pada mutu pendidikan modern output yang dihasilkan dituntut mempunyai kompetensi tertentu sehingga dapat menemukan sesuatu bukan hanya menghafal materi yang tidak ada konteksnya dengan kehidupan nyata sehingga tidak bermakna.

Menejemen pesantren yang dikelola oleh keluarga tidak mencerminkan menejemen pendidikan moderen, mempunyai visi dan misi yang jelas, perencanaan jangka panjang dan jangka pendek dan evaluasi pelaksanaan.

Diberlakukannya undang-undang No 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dan PP No 25 tentang pendidikan Agama dan keagamaan menempatkan Pesantren sebagai institusi pendidikan Islam yang secara *de yuri* diakui keberadannya meskipun pada akhirnya pesantren harus dapat beradaptasi dengan sistem pendidikan nasional dengan memasukkan mata pelajaran umum kedalam pesantren. Mata pelajaran umum itu tidak kemudian menggilas dan mengalahkan mata

pelajaran khas pesantren yang *“Relegius oriented”* tetapi sebagai pelengkap agar pesantren mempunyai wawasan pengetahuan umum dan untuk memperoleh ijazah sebagai pengakuan telah selesai pada tingkat atau jenjang sekolah tertentu akan tetapi banyak para santri yang tidak peduli dengan ijazah sebagai pengakuan legal formal bagi mereka menuntut ilmu adalah wajib dan tingkat keilmuan yang dimiliki tidak harus diformalkan dengan ijazah.

Perkembangan sistem pengajaran yang ada pada pesantren menandakan adanya adaptasi pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan dengan perkembangan dan perubahan masyarakat bahkan tuntutan perkembangan pendidikan itu sendiri, adaptasi yang sederhana adalah dengan sistem klasikal dan penjenjangan merupakan ciri sekolah umum dan yang paling nampak adalah pada pondok moderen bahkan dapat dikatakan mengadopsi sistem pendidikan barat dengan mendirikan sekolah umum dalam pondok pesantren.

Perubahan dan adaptasi tidak lepas dari pondok pesantren sebagai bagian sistem pendidikan nasional maka adaptasi yang dilakukanpun masih dalam batas koridor sistem pendidikan nasional yang pada akhirnya ingin mencapai pada satu tujuan sebagai lembaga pendidikan Islam menyiapkan peserta didik menjadi ahli agama dan keagamaan

Pesantren terbentuk berawal dari kebutuhan masyarakat. Masyarakat memerlukan pendidikan yang akan meningkatkan kualitas hidupnya maka masyarakat belajar kepada orang lain yang dianggap berilmu. Dari hal

sederhana inilah pesantren berkembang tidak saja sebagai sebuah lembaga pendidikan tetapi juga sebuah system dan komunitas.

Dilihat dari pembentukan dan karakteristiknya pesantren dapat dikatakan sebagai sebuah lembaga pendidikan yang berbasis masyarakat. Pesantren muncul karena adanya kebutuhan masyarakat akan pendidikan. Pesantren tidak akan ada apabila masyarakat sekitarnya tidak memiliki kesadaran akan perlunya pendidikan bagi mereka.

Sebuah lembaga pendidikan akan berfungsi dengan baik apabila mampu memelihara keterpaduan antara kehidupan dalam lembaga pendidikan dengan masyarakat. Lembaga pendidikan harus terbuka, kreatif dan dinamis di tengah-tengah kehidupan masyarakat¹⁸². Dengan menjadi lembaga pendidikan yang terbuka dan fleksibel, akan lebih mudah memebentuk sebuah pusat kegiatan pendidikan yang yang menyediakan kesempatan dan pengalaman kepada peserta didik sehingga siap menghadapi berbagai masalah kehidupan. Pesantren telah memenuhi persyaratan ini. Pesantren menggunakan sistem pendidikan yang fleksibel dan dekat dengan lingkungannya. Hal ini menjadikan pesantren sebagai lembaga pendidikan yang efisien dan fungsional.

Kedekatan Pesantren dengan masyarakat dan lingkungan sekitarnya membuat pesantren memiliki kepekaan yang lebih tinggi terhadap lingkungan sekitarnya. Apalagi dengan dipertahankannya lokalitas pesantren. Pesantren menjadi bagian penting dalam masyarakat dan dapat

¹⁸² Winarno Surakhmad, *"Kependidikan Alternatif dalam Peta Kependidikan Nasional"*, *Survei* No. 1, Vol. II (Januari, 1958), hal. 2.

segera tanggap terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini membuat pesantren memiliki sifat institusional responsive. Segala macam ilmu yang dibutuhkan masyarakat dapat diakomodir oleh pesantren dengan memanfaatkan potensi masyarakat. Bahkan di masa lalu pesantren mengajarkan cara bercocok tanam.

Perubagan sistem sentralisasi menjadi desentralisasi (*otonomi daerah*) maupun desentralisasi pendidikan tidak membawa pengaruh yang kuat dalam pesantren karena pesantren tidak tergantung terhadap sistem pemerintahan. Hakekat dari otonomi Daerah itu adalah pelimpahan wewenang yang disertai keleluasaan daerah dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan sehingga pelayanan kepada masyarakat akan menjadi lebih baik dan pembangunan daerah lebih terarah dan optimal, menurut Mulyasa desentralisasi pendidikan adalah memberikan kewenangan yang lebih besar diberikan kepada kabupaten dan kota untuk mengelola pendidikan sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerahnya, perubahan ini untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan efesiensi dan efektifitas dalam perencanaan pada unut-unit kerja daerah.¹⁸³ Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang paling mandiri dari dan untuk masyarakat, interfensi pemerintah dalam pengelolaan maupun pembiayaan sangatlah minim, apabila terjadi perubahan kebijakan pemerintah tidak serta merta menjadikan pesantren kehilangan pegangan, hal ini dikarenakan pesantren merupakan lembaga yang otonom dan mandiri.

¹⁸³ Mulyasa, *Menajemen Berbasis Kompetensi, Setrategi dan Implementasi*, (Bandung: PT Al Ma'arif, 2003), hal. 23

Fenomena menarik dalam dunia pendidikan di Indonesia yakni munculnya sekolah-sekolah terpadu (mulai tingkat dasar hingga menengah); dan penyelenggaraan sekolah bermutu yang sering disebut dengan *boarding school*. Nama lain dari istilah boarding school adalah sekolah berasrama. Para murid mengikuti pendidikan reguler dari pagi hingga siang di sekolah, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan agama atau pendidikan nilai-nilai khusus di malam hari. Selama 24 jam anak didik berada di bawah didikan dan pengawasan para guru pembimbing.

Di lingkungan sekolah ini mereka dipacu untuk menguasai ilmu dan teknologi secara intensif. Selama di lingkungan asrama mereka ditempa untuk menerapkan ajaran agama atau nilai-nilai khusus tadi, tak lupa mengekspresikan rasa seni dan ketrampilan hidup di hari libur. Hari-hari mereka adalah hari-hari berinteraksi dengan teman sebaya dan para guru. Rutinitas kegiatan dari pagi hari hingga malam sampai ketemu pagi lagi, mereka menghadapi makhluk hidup yang sama, orang yang sama, lingkungan yang sama, dinamika dan romantika yang seperti itu pula. Dalam khazanah pendidikan kita, sekolah berasrama adalah model pendidikan yang cukup tua.

Sekolah berasrama dapat ditemui dalam dinamika kehidupan pesantren, pendidikan gereja, bahkan di bangsal-bangsal tentara. Pendidikan berasrama telah banyak melahirkan tokoh besar dan mengukir sejarah kehidupan umat manusia. Keberadaannya adalah suatu konsekuensi logis

dari perubahan lingkungan sosial dan keadaan ekonomi serta cara pandang religiusitas masyarakat.

- b. Perubahan lingkungan sosial terutama dikota-kota besar, Sebagian besar penduduk tidak lagi tinggal dalam suasana masyarakat yang homogen, kebiasaan lama bertempat tinggal dengan keluarga besar satu klan atau marga telah lama bergeser kearah masyarakat yang heterogen, majemuk, dan plural. Hal ini berimbas pada pola perilaku masyarakat yang berbeda karena berada dalam pengaruh nilai-nilai yang berbeda pula. Oleh karena itu sebagian besar masyarakat yang terdidik dengan baik menganggap bahwa lingkungan sosial seperti itu sudah tidak lagi kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan intelektual dan moralitas anak.
- c. Perbaikan kondisi ekonomi mendorong pemenuhan kebutuhan di atas kebutuhan dasar seperti kesehatan dan pendidikan. Bagi kalangan menengah-atas yang baru muncul akibat tingkat pendidikan mereka yang cukup tinggi sehingga mendapatkan posisi-posisi yang baik dalam lapangan pekerjaan berimplikasi pada tingginya penghasilan mereka. Hal ini mendorong niat dan tekad untuk memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak-anak melebihi pendidikan yang telah diterima orang tuanya.
- d. Perubahan cara pandang masyarakat tentang agama, kecenderungan terbaru masyarakat perkotaan sedang bergerak kearah yang semakin religius. Indikatornya adalah semakin diminati dan semaraknya

kajian dan berbagai kegiatan keagamaan. Modernitas membawa implikasi negatif dengan adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan ruhani dan jasmani. Untuk itu masyarakat tidak ingin hal yang sama akan menimpa anak-anak mereka. Intinya, ada keinginan untuk melahirkan generasi yang lebih agamis atau memiliki nilai-nilai hidup yang baik mendorong orang tua mencari sistem pendidikan alternatif.

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa pesantren menjadi lembaga alternatif dalam masyarakat, dari segi sosial, sistem boarding school mengisolasi anak didik dari lingkungan sosial yang heterogen yang cenderung buruk. Di lingkungan sekolah dan asrama dikonstruksi suatu lingkungan sosial yang relatif homogen yakni teman sebaya dan para guru pembimbing Homogen dalam tujuan yakni menuntut ilmu sebagai sarana mengejar cita-cita.

Dari perspektif ekonomi, *boarding school* memberikan layanan yang paripurna sehingga menuntut biaya yang cukup tinggi. Oleh karena itu anak didik akan benar-benar terlayani dengan baik melalui berbagai layanan dan fasilitas. Terakhir dari segi semangat religiusitas, boarding school menjanjikan pendidikan yang seimbang antara kebutuhan jasmani dan ruhani, intelektual dan spiritual. Diharapkan akan lahir peserta didik yang tangguh secara duniawi dengan ilmu dan teknologi, serta siap secara iman dan amal soleh.

2. Madrasah

Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam di Indonesia relatif lebih muda dibanding pesantren. Madrasah dalam wacana kehidupan manusia Indonesia merupakan fenomena budaya yang telah berusia satu abad lebih. Bahkan bukan suatu yang berlebihan madrasah menjadi salah satu entitas budaya Indonesia yang dengan sendirinya menjalani proses sosialisasi yang relative intensif. Indikasinya adalah wujud entitas budaya ini telah diakui dan diterima kehadirannya.¹⁸⁴

Meskipun demikian madrasah bukan sesuatu yang *indigenious* (pribumi) dalam peta pendidikan di Indonesia. Madrasah berasal dari budaya Islam yang embrionya sudah ada pada zaman Rosul, yang berupa halqoh.¹⁸⁵ Perjalanan panjang Lembaga pendidikan Islam ini, merupakan sebuah potret pergulatan untuk menemukan format ideal bagi konsep lembaga pendidikan.

Madrasah berdiri atas inisiatif dan realisasi dari pembaharuan sistem pendidikan Islam yang telah ada (*pesantren*),¹⁸⁶ sistem dan isi madrasah adalah penggabungan antara pesantren dengan sekolah yaitu perpaduan antara sistem pondok yang mengajarkan agama dengan sistem sekolah

¹⁸⁴ Departemen Agama RI. *Sejarah Madrasah, Pertumbuhan, Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*. (Jakarta: Dirljen Bagais Depag RI, 2004), hal. 3.

¹⁸⁵ Hanum Asrohah, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta: Logos, 1999), hal. 15.

¹⁸⁶ Pembaruan sistem pendidikan Islam ini menurut *Person* dikatakan sebagai usaha *adaptasi* yaitu sistem harus menyesuaikan diri dengan lingkungan. Untuk menjamin kelangsungan hidup sistem pendidikan islam maka diperlukan penyesuaian terhadap lingkungan sosissil dalam rangka menjamin kelangsungan hidup sitem yang ada.

yang mengajarkan ilmu pengetahuan umum antara sistem pendidikan Islam dengan sistem pendidikan barat.¹⁸⁷

Pembaharuan tersebut menurut Karel Stembrink, meliputi tiga hal, yaitu:

- a. Usaha menyempumakan sistem pendidikan pesantren,
- b. Penyesuaian dengan sistem pendidikan Barat
- c. Upaya menjembatani antara sistem pendidikan tradisional pesantren dan sistem pendidikan Barat.¹⁸⁸

Madrasah yang pembinaannya menjadi kewenangan Depag menjadi sebuah Lembaga Pendidikan Islam yang tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi di dalamnya telah diajarkan berbagai disiplin ilmu umum. Meskipun terdapat keanekaragaman penggabungan mata pelajaran yang ada madrasah tetap sebagai lembaga pendidikan Islam yang menjadikan mata pelajaran agama sebagai mata pelajaran pokok atau dasar, maksud mata pelajaran dasar adalah mata pelajaran yang menentukan dalam pemberian penilaian terhadap status seseorang siswa. Secara kelembagaan madrasah dalam bahasa pendidikan sudah menjadi sekolah umum yang berciri khas Islam dan telah menjadi bagian integral dari System Pendidikan Nasional.

¹⁸⁷ Vembriarto, *Pengantar Perencanaan Pendidikan*, Yogyakarta : Andi Offset, 1988.

Transformasi sosial budaya berarti modifikasi dalam setiap aspek proses sosial budaya, pola sosial budaya, bentuk-bentuk sosial budaya. Perubahan ini bersifat progresif dan regresif, berencana atau tidak, permanen atau sementara, unidirectional atau multidirectional, menguntungkan atau merugikan. Menurut Gillin, perubahan sosial adalah perubahan bentuk-bentuk kehidupan yang telah ada yang terjadi karena kondisi geografis, alat-alat atau perlengkapan hidup manusia, komposisi pendidik dan ideologi. Evolusi organik (organic evolution), perubahan untuk mempertahankan diri dari kebutuhannya dalam lingkungan yang berkembang.

¹⁸⁸ Karel A. Steenbrink, *Pesantren, Madrasah dan Sekolah*, (Jakarta: LP3ES, 1986), hal. 98.

Madrasah di Indonesia mempunyai tiga model yaitu;

- a. Madrasah Diniyyah yaitu madrasah dengan proses pelaksanaan pembelajarannya dilakukan pada waktu sore hari dengan materi khusus agama
- b. Madrasah SKB 3 Menteri yaitu lembaga pendidikan Madrasah yang proses pembelajarannya dilakukan disekolah pada pagi hari seperti pada sekolah umum dengan muatan pelajaran agama 30% dan mata pelajaran umum 70%.
- c. Madrasah Pesantren. Adalah madrasah yang didirikan di dalam pesantren kebanyakan dari siswanya adalah para santri, dalam pelaksanaannya proses pembelajaran seperti sekolah dipagi hari sedangkan sore dan malam hari digunakan khusus untuk mengkaji ilmu-ilmu agama.

Ketiganya merupakan produk budaya dan peradaban Islam yang secara empiric telah mampu menjadi sebuah wahana penanaman nilai - nilai keagamaan dan kemasyarakatan serta pengetahuan yang senantiasa dikembangkan oleh umat Islam sebagai bagian untuk meneruskan dan melestarikan eksistensi kebudayaan dan peradabannya.

Madrasah SKB tiga menteri (Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri dalam Negeri) menandakan bahwa eksistensi madrasah sudah cukup kuat beriringan dengan sekolah umum. Di samping itu, munculnya SKB tiga menteri tersebut juga dinilai sebagai langkah positif bag. peningkatan mutu madrasah baik dari status, nilai ijazah

maupun kurikulumnya. Di dalam salah satu diktum pertimbangan SKB tersebut disebutkan perlunya diambil langkah-langkah untuk meningkatkan mutu pendidikan pada madrasah agar lulusan dari madrasah dapat melanjutkan atau pindah ke sekolah-sekolah umum dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi.

Sejak terbitnya SKB 3 menteri madrasah dituntut mengikuti berbagai perkembangan sosial lebih jauh lagi dan beradaptasi dengan pola hidup masyarakat, SKB 3 menteri merupakan bentuk legalisasi dari tuntutan tersebut, maka mulailah madrasah menstandarkan kurikulumnya dengan sekolah dan madrasah negeri. Pendidikan di madrasah mulai berimplikasi pada kebutuhan hidup murid dengan status sosial masa yang akan datang. Materi yang semula menjadi identitas keberadaan madrasah menjadi hambar dengan mengubah posisi madrasah menjadi tidak jelas akhirnya madrasah kurang mendapat perhatian dan hanya dipandang sebagai tempat pelajaran atau lembaga kelas dua, hal ini mengindikasikan pemahaman terhadap madrasah :

- a Madrasah telah kehilangan akar sejarahnya
Keberadaan madrasah bukan merupakan kelanjutan pesantren meskipun diakui bahwa pesantren merupakan bentuk lembaga pendidikan Islam pertama di Indonesia.
- b Terdapat dualisme pemaknaan terhadap madrasah.
Di satu sisi madrasah identikkan dengan sekolah karena memiliki muatan secara kurikulum yang relatif sama dengan sekolah umum. Di

sisi lain, madrasah dianggap sebagai pesantren dengan sistem klasikal yang kemudian dikenal dengan madrasah diniyah. Dengan demikian, sebagai sub sistem pendidikan nasional, madrasah belum memiliki jati diri yang dapat dibedakan dari lembaga pendidikan lainnya. Efek pensejajaran madrasah dengan sekolah umum yang berakibat berkurangnya proporsi pendidikan agama dari 60% agama dan 40% umum menjadi 30% agama dan 70% umum dirasa sebagai tantangan yang melemahkan eksistensi pendidikan Islam.

Kondisi diatas membawa dampak persoalan baru yang muncul kemudian, antara lain:

- a Berkurangnya muatan materi pendidikan agama terutama dalam madrasah SKB 3 Mentri, dilihat sebagai upaya pendangkalan pemahaman agama, karena muatan kurikulum agama sebelum SKB dirasa belum mampu mencetak muslim sejati, apalagi kemudian dikurangi
- b Tamatan Madrasah serba tanggung. Pengetahuan agamanya tidak mendalam sedangkan pengetahuan umumnya juga rendah. Diakui bahwa model pendidikan madrasah didalam perundang-undangan negara, memunculkan dualisme sistem Pendidikan di Indonesia.

Penyamaan Aliyah dengan SMU menimbulkan masalah baru yakni output yang serba tanggung, baik dalam penguasaan pengetahuan agama terlebih umum, disisi lain ada fakta menarik bahwa anak-anak Madrasah pada kenyataannya tetap masih belum mampu bersaing dengan anak-anak

sekolah umum dalam memasuki perguruan tinggi umum (PTU) dan lapangan kerja, bahkan kemampuannya lebih menurun ketika mereka memasuki IAIN. Beliau mencontohkan di IAIN Jakarta dalam penerimaan mahasiswa baru tahun 1995 yang lalu mensyaratkan bahwa nilai test bahasa Arab minimal 6 dari 10; sedang untuk pengetahuan agama diinginkan lebih tinggi lagi. Hasilnya hanya lebih kurang lima anak yang memperoleh nilai test bahasa Arab 7-9, tiga belas anak memperoleh nilai antara 5-7, dari lebih kurang hampir 5.000 calon yang mayoritas adalah anak-anak Madrasah. Kenyataan tersebut ternyata tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi di IAIN dari daerah lain dan perguruan tinggi agama Islam.¹⁸⁹

Dualisme pengelolaan pendidikan di Indonesia telah menjadi dilema yang belum dapat diselesaikan hingga sekarang. Dualisme ini tidak hanya berkenaan dengan sistem pengajarannya tetapi juga menjurus pada keilmuannya. Pola pikir yang sempit cenderung membuka gap antara ilmu-ilmu agama Islam dan ilmu-ilmu umum. Seakan-akan muncul ilmu Islam dan ilmu bukan Islam (kafir). Padahal dikhotomi keilmuan ini justru menjadi garapan bagi para pakar pendidikan Islam untuk berusaha menyatukan keduanya. Dualisme juga muncul dalam bidang manajerialnya, khususnya di lembaga swasta. Lembaga swasta umumnya memiliki dua top manager yaitu kepala madrasah dan ketua yayasan (atau

¹⁸⁹ Mastuhu, *Potret Buram Madrasah*, <http://elmuttaqie.wordpress.com/-artikel/accesed/1> 20 januari 2009.

pengurus) Meskipun telah ada garis kewenangan yang memisahkan kedua top manager tersebut, yakni kepala madrasah memegang kendali akademik sedangkan ketua yayasan (pengurus) membidangi penyediaan sarana dan prasarana. sering di dalam praktik terjadi overlapping. Masalah ini biasanya lebih buruk jika di antara pengurus yayasan tersebut ada yang menjadi staf pengajar.

Dualisme pengelolaan pendidikan juga terjadi pada pembinaan yang dilakukan oleh departemen yaitu Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) dan Departemen Agama (Depag). Pembinaan Madrasah di bawah naungan Depag berhadapan dengan Sekolah umum di bawah pembinaan Depdiknas sering menimbulkan kecemburuan sejak di tingkat (SD dan MI) hingga perguruan tinggi. Dari alokasi dana, perhatian, pembinaan manajerial, bantuan buku dan media pembelajaran, serta penempatan guru, hingga pemberian beasiswa pendidikan lanjut sering tidak sama antara yang diterima oleh sekolah umum (Depdiknas) dengan madrasah (Depag).¹⁹⁰

Kesenjangan antara madrasah swasta dan madrasah negeri pun tampaknya juga menjadi masalah yang belum tuntas diselesaikan. Gap tersebut meliputi beberapa hal seperti pandangan guru, sarana dan prasarana, kualitas input siswa dan sebagainya yang kesemuanya itu berpengaruh baik langsung maupun tidak langsung kepada mutu pendidikan. Yang demikian ini karena munculnya SKB tiga menteri

¹⁹⁰ Agus sholeh editor Suwito, *Sejarah sosial pendidikan Islam* (Jakarta: Prenada media 2005), hal. 225.

tersebut belum diimbangi penyediaan guru, buku-buku dan peralatan lain dari departemen terkait¹⁹¹

Pendidikan sering dijadikan kambing hitam dari keterbelakangan suatu bangsa, maka keterbelakangan bangsa ini tidak lepas dari kurangnya mutu pendidikan termasuk didalamnya Madrasah¹⁹², persoalan yang mendasar bagi madrasah adalah persoalan mutu, manajemen dan dikotomi ilmu pengetahuan, dalam menghadapi standarisasi pendidikan nasional¹⁹³ Madrasah harus berbenah diri, Dirjen Kelembagaan Agama Islam (Bagais) Depag HA Qodri Azizy mengakui, hingga saat ini masih terdapat problem serius terhadap konsep standarisasi madrasah, padahal di lembaga pendidikan itu dilakukan proses peningkatan kualitas pendidikan anak. "Karenanya, perlu dicanangkan proses standarisasi madrasah yang baku," katanya pada seminar eksekutif bertema "Desain Pengembangan Madrasah: Visi 2006" di Jakarta kemarin. Menurut dia, standarisasi itu tidak hanya menyangkut metode pengajaran agama yang harus sama sekali diperbaiki, tetapi juga evaluasi tentang pendidikan agama dan buku-buku pendidikan agama. Khusus tentang buku pendidikan anak, ia mengingatkan perlunya dipikirkan format baru buku pendidikan agama atau umum bagi anak didik madrasah yang menyentuh atau berkesesuaian

¹⁹¹ Malik Fadjar, *Madrasah dan Tantangan Modernitas*, (Bandung: Mizan, 1998), hal. 8.

¹⁹² H.A.R Tilar, *Standarisasi pendidikan Nasional* (Jakarta : Rineka cipta 2006), hal. 11.

¹⁹³ Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 *Tentang standar Nasional Pendidikan* (standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, standar penilaian pendidikan)

dengan tingkat nalar dan emosional anak.¹⁹⁴

Pandangan dan penilaian masyarakat terhadap madrasah dalam dua dekade terakhir, dapat kita bedakan ke dalam tiga kelompok sebagai berikut :

- a. Menganggap dan mempertahankan madrasah sebagai lembaga *tafaqqahu fiddien* murni. sebagai lembaga *tafaqqahu fiddien* madrasah diharapkan tetap dapat berfungsi sebagai tempat menyiapkan kader-kader Islam yang mampu dan terampil sebagai pembimbing dan “praktisi” keagamaan dalam masyarakat. alasan utama pihak orang tua untuk mengirim atau memasukkan anak-anak mereka ke madrasah adalah untuk belajar dan mendalami agama.

Jaminan masa depan dan lapangan kerja bagi anak-anak tidak begitu dipermasalahkan. Apapun langkah yang diambil dalam pembaharuan pendidikan madrasah seperti pembaharuan sistem pengajaran dan kurikulum, hendaklah tidak menggeser atau menghilangkan peran dan fungsi pokok madrasah sebagai lembaga *tafaqqahu fiddien*.

Apabila isi kurikulum madrasah sudah mengacu pada pendidikan sekuler dan aspek ‘salaf’nya hilang dan dengan demikian madrasah tidak mampu lagi mengantarkan anak-anak kepada penguasaan ilmu agama, maka mustahil bagi mereka untuk bersedia memasukkan anak-anak mereka ke Madrasah. Kalau ingin belajar dan mendalami

¹⁹⁴ Jakarta: Pelita <http://www.pelita.or.id/baca.php?id=12123>

pengetahuan umum mengapa tidak memilih sekolah umum saja yang kualitas dan fasilitas belajarnya relatif lebih baik dari madrasah.

Dari sisi lain, secara historis Madrasah adalah “identitas umat Islam Indonesia” (baca : kelompok santri). Tatkala Indonesia ditindas selama berabad-abad oleh kaum penjajah, melalui lembaga pendidikan bernama pesantren dan madrasah, umat Islam Indonesia telah membuktikan diri mampu mempertahankan harga diri, martabat dan aqidahnya. Lahirnya MAPK (Madrasah Program Khusus) sebuah “pilot project” Departemen Agama yang memberikan pelajaran 70 % agama dan 30 % umum. Program ini bertujuan untuk mencetak orang-orang yang memiliki spesialisasi keahlian di bidang agama yang berkaitan dengan dimensi ukhrowiyah atau dengan kata lain bertujuan untuk mencetak bibit ulama unggulan. Lulusan program ini diharapkan memenuhi target fungsi tradisional madrasah di masa lalu.

- b. Keberadaan Madrasah telah menyebabkan terjadinya dualisme pendidikan dan dikotomis antara pengetahuan “umum” dan “agama” di Indonesia. Kelompok ini juga berpendapat madrasah cenderung mencetak warga negara yang eksklusif. Oleh karena itu, keberadaan dan sistem pendidikan madrasah perlu dipertanyakan kembali.

Pada dasarnya Madrasah tidak jauh berbeda dengan pandangan kaum penjajah kolonial penuh prasangka dan diskriminatif. Madrasah sebagai faktor dominan dalam melestarikan dualisme pendidikan di Indonesia tanpa mau memahami latar belakang dan aspek historis dari

keberadaan madrasah.

- c. Madrasah sebagai lembaga alternatif bagi umat Islam. Dengan fungsinya sebagai lembaga *tafaqqahu fiddien* atau suatu bentuk pendidikan yang berkarakteristik Islam, madrasah tetap diperlukan oleh masyarakat Indonesia. Kondisi Madrasah yang masih memprihatinkan terutama ketenagaan baik kuantitas maupun kualitas di bawah standar.

Sarana dan prasarana serta sumber belajar lain pada umumnya masih jauh dari memadai, terutama bagi madrasah-madrasah swasta. Dengan ketenagaan yang substandar dan dengan sarana yang kurang memadai itu, sulit diharapkan diperoleh mutu pendidikan yang benar-benar berkualitas pada madrasah. Selain itu, masalah yang lebih fundamental lagi; isi pendidikan madrasah cenderung menjadi sekolah umum. Menghadapi kenyataan tersebut, kelompok ini sering dihadapkan dengan langkah yang dilematis.

Seiring dengan dinamika dan kemajuan zaman yang semakin mengglobal, madrasah sudah seharusnya lebih memantapkan identitas khas kelembagaannya, di samping tidak boleh menghindarkan diri dari kecenderungan mengisolasi diri dan mengeksklusifkan diri tanpa mau merespon perkembangan yang tengah terjadi di luar. Ini mengisyaratkan perlunya pembenahan yang bersifat menyeluruh dalam diri madrasah secara kelembagaan. Karena siapa tahu di masa mendatang, madrasah lah

yang menjadi sekolah pertama dan utama yang akan dituju oleh umat karena bagaimanapun umat Islam adalah umat mayoritas dinegeri ini.

Disisi yang lain ada fenomena menarik terhadap Madrasah Di saat ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat, di saat filsafat hidup manusia modern mengalami krisis keagamaan¹⁹⁵ dan di saat perdagangan bebas dunia makin mendekati pintu gerbangnya, keberadaan madrasah tampak makin dibutuhkan orang. Terlepas dari berbagai problema yang dihadapi, baik yang berasal dari dalam sistem seperti masalah manajemen, kualitas input dan kondisi sarana prasarannya, maupun dari luar sistem seperti persyaratan akreditasi yang kaku dan aturan-aturan lain yang menimbulkan kesan madrasah sebagai 'sapi perah', madrasah yang memiliki karakteristik khas yang tidak dimiliki oleh model pendidikan lainnya itu menjadi salah satu tumpuan harapan bagi manusia modern untuk mengatasi keringnya hati dari nuansa keagamaan dan menghindarkan diri dari fenomena demoralisasi dan dehumanisasi yang semakin merajalela seiring dengan kemajuan peradaban teknologi dan materi.

Sebagai jembatan antara model pendidikan pesantren dan model pendidikan sekolah, madrasah menjadi sangat fleksibel diakomodasikan dalam berbagai lingkungan. Di lingkungan pesantren, madrasah bukanlah barang yang asing, karena memang lahirnya madrasah merupakan inovasi model pendidikan pesantren.

¹⁹⁵ Haidar Nashir, *Agama dan Krisis Kemanusiaan Modern*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hal. 61.

Dengan kurikulum yang disusun rapi, para santri lebih mudah mengetahui sampai di mana tingkat penguasaan materi yang dipelajari. Dengan metode pengajaran modern yang disertai audio visual aids, kesan kumuh, jorok, ortodok, dan exclusive yang selama itu melekat pada pesantren sedikit demi sedikit terkikis. Masyarakat metropolit makin tidak malu mendatangi dan bahkan memasukkan putra-putrinya ke pesantren dengan model pendidikan madrasah. Baik mereka yang sekedar berniat menempatkan putra-putrinya pada lingkungan yang baik (agamis) hingga yang benar-benar menguasai ilmu yang dikembangkan di pesantren tersebut, orang makin berebut untuk mendapatkan fasilitas di sana.

Meskipun banyak madrasah yang berkembang di luar lingkungan pesantren, budaya agamanya, moral dan etika agamanya tetap menjadi ciri khas sebuah lembaga pendidikan Islam. Etika pergaulan, perilaku dan performance pakaian para santrinya menjadi daya tarik tersendiri, yang menjanjikan kebahagiaan hidup dunia akhirat sebagaimana tujuan pendidikan Islam¹⁹⁶. Realitas menunjukkan bahwa praktek pendidikan nasional dengan kurikulum yang dibuat dan disusun sedemikian rupa bahkan telah disempurnakan berkali-kali, tidak hanya gagal menampilkan sosok manusia Indonesia dengan kepribadian utuh, bahkan membayangkan realisasinya saja terasa sulit. Pendidikan umum (non madrasah) yang menjadi anak emas pemerintah, di bawah naungan Depdiknas, telah gagal menunjukkan kemuliaan jati irinya selama lebih

¹⁹⁶ Jalaluddin dan Said, U. *Filsafat Pendidikan Islam: Konsep dan Perkembangan*, (Jakarta: Grafindo Persada, 1998.), hal. 17. dan Moh. Athiyah Al-Abrasyi. *Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970) , hal. 36.

dari tiga dekade. Misi pendidikan yang ingin melahirkan manusia-manusia cerdas yang menguasai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan kekuatan iman dan taqwa plus budi pekerti luhur, masih tetap berada pada tataran ideal yang tertulis dalam susunan cita-cita (*perundang undangan*). Tampaknya hal ini merupakan salah satu indikator dimana pemerintah kemudian mengakui keberadaan madrasah sebagian dari sistem pendidikan nasional.

Munculnya kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi dalam bidang pendidikan yang bertujuan untuk memberi peluang kepada peserta didik untuk memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat, tidak mengagetkan para pengelola madrasah.

Madrasah juga lebih survive dalam kondisi perubahan kurikulum yang sangat cepat, karena kehidupan madrasah tidak taklid kepada kurikulum nasional. Manajemen desentralisasi memberikan kewenangan kepada sekolah untuk melaksanakan PBM sesuai dengan kebutuhan yang dikondisikan untuk kebutuhan lokal. Dengan demikian, maka madrasah mendapatkan angin segar untuk bisa lebih exist dalam mengatur kegiatannya tanpa intervensi pemerintah pusat dalam upaya mencapai peningkatan mutu pendidikannya.

Melalui proses belajar mengajar yang didasari dengan kebutuhan lokal, kurikulum tidak terbebani dengan materi lain yang sesungguhnya belum atau bahkan tidak relevan bagi peningkatan pengetahuan dan keterampilan

peserta didik pada jenjang tersebut. Efektivitas proses belajar mengajar diharapkan bisa tercapai sehingga menghasilkan prestasi belajar yang lebih tinggi. Adapun meningkatnya keterlibatan pemerintah dalam pendidikan menyebabkan para pengelola madrasah memfokuskan pada program-program tambahan sebagai sarana meningkatkan kualitas pendidikan.

Sebagai lembaga pendidikan yang lahir dari masyarakat, madrasah lebih mudah mengintegrasikan lingkungan eksternal ke dalam organisasi pendidikan, sehingga dapat menciptakan suasana kebersamaan dan kepemilikan yang tinggi dengan keterlibatan yang tinggi dari masyarakat. Keterlibatan masyarakat bukan lagi terbatas seperti peranan orang tua siswa yang hanya melibatkan diri di tempat anaknya sekolah. Melainkan keterlibatan yang didasarkan kepada kepemilikan lingkungan. Sesuai dengan jiwa desentralisasi yang menyerap aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan, masyarakat dituntut untuk memiliki kepedulian yang tinggi memperhatikan lembaga pendidikan yang berada di lingkungan setempat.

Hal ini dapat menumbuhkan sikap kepemilikan yang tinggi dengan memberikan kontribusi baik dalam bidang material, kontrol manajemen, pembinaan, serta bentuk partisipasi lain dalam rangka meningkatkan eksistensi madrasah yang selanjutnya menjadi kebanggaan lingkungan setempat.

Persepsi masyarakat terhadap madrasah di era modern belakangan semakin menjadikan madrasah sebagai lembaga pendidikan yang unik. Di

saat ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat, di saat filsafat hidup manusia modern mengalami krisis keagamaan.¹⁹⁷ Di saat perdagangan bebas dunia makin mendekati pintu gerbangnya, keberadaan madrasah tampak makin dibutuhkan orang. Namun demikian menurut M.Atho Mudzhar masih ada keunggulan madrasah bila dibanding dengan sekolah umum yaitu komitmen nilai yang lebih tinggi dan kemampuan siswa madrasah untuk berhubungan dalam masyarakat, penelitian di Amerika Serikat orang melayani suatu pekerjaan ternyata hanya 20% saja diperlukan keahlian yang 80% adalah unsur *human relation*, jadi lembaga pendidikan Islam hanya tertinggal yang 20% saja.¹⁹⁸

Terlepas dari berbagai problema yang dihadapi, baik yang berasal dari dalam sistem seperti masalah manajemen, kualitas input dan kondisi sarana prasarannya, maupun dari luar sistem seperti persyaratan akreditasi yang kaku dan aturan-aturan lain yang menimbulkan kesan madrasah sebagai 'sapi perah', madrasah yang memiliki karakteristik khas yang tidak dimiliki oleh model pendidikan lainnya itu menjadi salah satu tumpuan harapan bagi manusia modern untuk mengatasi keringnya hati dari nuansa keagamaan dan menghindarkan diri dari fenomena demoralisasi dan dehumanisasi yang semakin merajalela seiring dengan kemajuan peradaban teknologi dan materi. Sebagai jembatan antara model pendidikan pesantren dan model pendidikan sekolah, madrasah menjadi

¹⁹⁷ Haidar Nasir, *Agama*, hal. 40.

¹⁹⁸ M.Atho Mudzhar, *Masyarakat Tidak Obyektif Menilai Pendidikan Islam*, Jurnal Pendidikan Islam Vol.3. (1997), hal.88.

sangat fleksibel diakomodasikan dalam berbagai lingkungan. Di lingkungan pesantren, madrasah bukanlah barang yang asing, karena memang lahirnya madrasah merupakan inovasi model pendidikan pesantren. Dengan kurikulum yang disusun rapi, para santri lebih mudah mengetahui sampai di mana tingkat penguasaan materi yang dipelajari. Dengan metode pengajaran modern yang disertai audio visual aids, kesan kumuh, jorok, ortodok, dan exclusive yang selama itu melekat pada pesantren sedikit demi sedikit terkikis.

Melihat kenyataan seperti itu posisi madrasah dirasa cukup penting mengingat madrasah di pesantren yang pada umumnya lebih menekankan dan berorientasi pada pembentukan keimanan dan akhlak siswa terutama madrasah yang berada dalam pesantren menjadikan madrasah dan pesantren yang masih diharapkan masyarakat dalam menanggulangi kebobrokan moral bangsa.

Dualisme pengelolaan pendidikan menempatkan madrasah pada posisi termarginalkan dari perhatian pemerintah bila dibanding dengan sekolah umum, hal ini dikarenakan mayoritas madrasah adalah madrasah swasta, maka realitas yang terjadi kurangnya sentuhan tangan pemerintah bagi madrasah swasta dan sering terjadi ketidak seimbangan antara program pemerintah dan kekuatan madrasah.. Tetapi bila dilihat dari daya tahan madrasah terhadap tantangan pendidikan secara umum menempatkan madrasah pada posisi yang cukup kuat, hal ini karena keberadaan

madrasah memang betul-betul representasi kehendak masyarakat dan dibutuhkan masyarakat bukan karena kehendak otoritas penguasa.

3. Sekolah Islam

Sekolah Islam secara kelembagaan merupakan sekolah swasta (*bukan sekolah milik pemerintah*) yang didirikan oleh organisasi kemasyarakatan seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Al Irsyad atau yayasan Islam yang bergerak dalam dunia Pendidikan. Sekolah Islam sekarang meniru sekolah negeri yang dibawah pengawasan Departemen Pendidikan Nasional dengan penjenjangan sama dengan sekolah negeri, Berlakunya Undang-Undang sistem pendidikan Nasional berdampak pada keharusan mengikuti sistem sekolah negeri, maka sekolah islam mengambil sepenuhnya kurikulum yang dikeluarkan oleh Departemen pendidikan nasional, sehingga tidak ada perbedaan antara sekolah islam dengan sekolah umum.¹⁹⁹

Tujuan didirikannya sekolah Islam adalah untuk mendidik generasi Islam agar mempunyai pengetahuan umum yang kuat berdasarkan nilai-nilai agama, ahli dalam disiplin ilmu tertentu dengan dasar agama yang tercermin dalam ketauhidannya dan tingkahlakunya. Namun demikian tidaklah mudah untuk mewujudkannya, pengaruh budaya barat yang sangat kuat berimplikasi positif terhadap perkembangan sekolah Islam pada umumnya.

Pelajaran agama Islam tidak menjadi materi pokok dalam sekolah

¹⁹⁹ Azumardi Azra, *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi menuju Milenium baru*, (Jakarta: Rineke cipta 1997), hal. 71.

Islam, hal ini dapat dilihat dari jumlah jam yang sangat minim (20%) dan menempatkan pelajaran agama bukan pada posisi yang kuat untuk menentukan kelulusan anak. Kelulusan anak ditentukan oleh mata pelajaran yang wajib diunaskan seperti pada sekolah umum.

Dalam perspektif pendidikan Islam seharusnya yang menjadi pusat perhatian adalah bagaimana membangun generasi yang memiliki dasar pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*) yang dijiwai dengan nilai-nilai Quraniyah. Tujuan akhirnya, sang anak kelak mampu menjalankan tugas kemanusiaan sebagai khalifah dan semua aktivitas hidupnya diorientasikan pada pengabdian kepada Allah.

Perkembangannya sekolah Islam sebagai lembaga pendidikan belum merata kualitasnya, hal ini dikarenakan bukan karena akses informasi saja yang tidak merata tetapi sekolah Islam adalah lembaga pendidikan yang berbasis masyarakat, maka perkembangannya sangat tergantung keberpihakan masyarakat terhadap sekolah tersebut. Sekolah Islam yang notabene sekolah suwasta harus aktif mencari informasi dan kreatif mencitrakan dirinya sehingga mendapat kepercayaan dari masyarakat menjadi lembaga pendidikan bagi putra-putrinya. Out put dari lembaga itulah yang menjadi tolak ukur disamping tentunya proses pembelajaran.

Kepercayaan dari masyarakat inilah yang menjadi kunci eksis dan tidaknya sekolah suwasta, ketika kepercayaan itu telah didapat maka orang tua dengan sukarela menitipkan anaknya dengan biaya yang besar sekalipun

Seiring meningkatnya kesadaran religi di kalangan umat Islam, banyak orangtua menyekolahkan anaknya ke sekolah-sekolah atau lembaga pendidikan yang memadukan kurikulum umum (ilmu umum) dengan ilmu keislaman. Artinya, orangtua sadar pentingnya pendidikan agama bagi anak, sepenting penguasaan mereka akan ilmu-ilmu umum (keduniaan). Muncul juga pandangan bahwa anak-anak mereka dapat terhindar dari pengaruh negatif lingkungan yang tidak Islami dan dapat lebih mengental warna keislamannya dengan cara bersekolah di sekolah Islam terpadu atau pesantren.

Sekolah-sekolah Islam selain mengutamakan mata pelajaran umum yang sesuai dengan kurikulum Diknas, juga ditambah dengan mata pelajaran agama (Islam). Lebih khusus lagi, adalah pada penanaman moral atau pendidikan akhlak Islami. Bahkan, tidak sedikit lembaga pendidikan Islam yang telah meningkatkan kualitasnya dengan mengadopsi beberapa model atau kurikulum dari negara-negara maju, seperti Australia, Jepang, Amerika Serikat, dan lainnya.

Dengan demikian, banyak sekolah Islam kini sudah sejajar mutunya dengan sekolah unggulan lain. Namun sayangnya, umumnya sekolah Islam unggulan biayanya relatif mahal. Mungkin, itulah harga sebuah kualitas unggulan. Untuk masuk sebuah TK saja, orangtua harus mengeluarkan biaya jutaan rupiah, belum biaya bulanan yang ratusan ribu rupiah. Demikian juga untuk tingkat SD, SLTP, dan SLTA. Orangtua harus menyalurkan uang jutaan rupiah untuk biaya masuk (DSP, Dana

Sumbangan Pendidikan), plus biaya bulanan ratusan ribu rupiah.²⁰⁰

Sekolah Islam bermutu tadi tidak terjangkau oleh anak-anak dari kalangan keluarga ekonomi lemah. Akibat lainnya, banyak sekolah Islam unggulan itu jadi terkesan “*elitis*” dan eksklusif. Bahkan tidak jarang orientasi bisnisnya lebih kental ketimbang orientasi “sosial” demi kemajuan pendidikan umat Islam.

Selain sekolah Islam unggulan, masih banyak bentuk dan jenis pendidikan Islam lain, seperti Pondok Pesantren, Madrasah, Sekolah Umum bercirikan Islam, Taman Pendidikan Al-Qur'an, atau sekolah berbasis masjid. Biayanya pun relatif murah, dengan risiko kualitas tidak sebaik sekolah Islam unggulan.

Dari keterangan diatas tentang pendidikan Islam sebagai lembaga, maka perlu pemikiran kembali tujuan dan fungsi lembaga-lembaga pendidikan Islam yang ada. Memang diakui bahwa penyesuaian lembaga-lembaga pendidikan akhir-akhir ini cukup menggembirakan, artinya lembaga-lembaga pendidikan memenuhi keinginan untuk menjadikan lembaga-lembaga tersebut sebagai tempat untuk mempelajari ilmu umum dan ilmu agama serta keterampilan. Tetapi pada kenyataannya penyesuaian tersebut lebih merupakan peniruan dengan tambal sulam atau dengan kata lain mengadopsi model yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pendidikan umum, artinya ada perasaan harga diri bahwa apa yang bisa dilakukan oleh lembaga-lembaga pendidikan umum dapat juga dilakukan oleh lembaga-lembaga pendidikan agama, sehingga

²⁰⁰ <http://www.sdu-nurhidayah.net/?pilih=lihat&id=40> didonlod pada tanggal 20 januari

akibatnya beban kurikulum yang terlalu banyak dan cukup berat dan terjadi tumpang tindih.

Lembaga-lembaga pendidikan Islam mengambil secara utuh semua kurikulum (non-agama) dari kurikulum sekolah umum, kemudian tetap mempertahankan sejumlah program pendidikan agama, sehingga banyak bahan pelajaran yang tidak bisa dicerna oleh peserta didik secara baik, sehingga produk (hasil) serba setengah-tengah atau tidak maksimal baik pada ilmu umum maupun pada ilmu agama. Untuk itu, lembaga-lembaga pendidikan Islam sebenarnya mulai memikirkan kembali desain program pendidikan untuk menuju masyarakat madani, dengan memperhatikan relevansinya dengan bentuk atau kondisi serta ciri masyarakat madani. Maka untuk menuju “masyarakat madani”, lembaga-lembaga pendidikan Islam harus memilih satu di antara dua fungsi yaitu apakah mendesain model pendidikan umum Islami yang handal dan mampu bersaing secara kompetitif dengan lembaga pendidikan umum atau mengkhususkan pada desain pendidikan keagamaan yang handal dan mampu bersaing secara kompetitif, misalnya mempersiapkan ulama-ulama dan mujtahid-mujtahid yang berkaliber nasional dan dunia.

Integrasi kurikulum menjadi keharusan dalam dunia pendidikan Islam integrasi dalam pengertian bukan mengambil begitu saja pengetahuan umum seperti yang keterangan diatas tetapi menggagas kembali dan menautkan materi yang ada dari kajian kitab suci al qur'an dan sunahnya. Hal ini untuk menghilangkan dikotomi ilmu pengetahuan yang memisahkan pengetahuan

umum dengan pengetahuan agama yang seharusnya bukan menjadi tren merk pengetahuan Islam, pengetahuan adalah milik Allah dan manusia dituntut untuk mencapainya dengan dasar firman-firmanNya. Bukan pengetahuan yang bebas dari nilai tetapi pengetahuan yang mendorong kepada pemantapan rasa ketauhidan, rasa kemanusiaan dan rasa kebersamaan sebagai makhluk Allah.

B. Pendidikan Islam Sebagai Mata Pelajaran Dan Nilai

Pendidikan Islam sebagai mata pelajaran dan pendidikan Islam sebagai nilai adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, mata pelajaran pendidikan agama Islam memuat materi keislaman yang mempunyai nilai-nilai Islam artinya terjadi transfer *knowaldge* dan transfer *viliue* dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dan bukan hanya transfer pengetahuan.

Dikotomi ilmu pengetahuan masih sangat terasa, dapat dilihat minimnya keterlibatab guru non agama dalam ikut mendukung guru agama dalam membentuk moral anak, sikap guru yang cenderung mengajar sesuai dengan bidang keilmuannya tanpa mengkaitkan dengan agama sudah tidak relevan untuk dipertahankan. Secara sosiologi fungsi pendidikan yang utama adalah menanamkan kreatifitas subyek serta menanamkan nilai-nilai kebaikan, lebih jauh dapat dilihat pada analisa dibawah ini tentang pendidikan Islam sebagai mata pelajaran dan nilai pada lembaga pendidikan Islam²⁰¹.

1. Mata pelajaran pendidikan agama Islam di Pesantren

Mata pelajaran Pendidikan Islam dan nilai di pesantren sudah tidak dapat

²⁰¹ Zubaidi, Pendidikan Berbasis Masyarakat, (Yogyakarta: Pustaka pelajar 2007) hal 37-38

diragukan lagi keberadaannya mengingat pesantren dengan patron *"Reteqms oriented"*. materi utama yang diberikan pada pesantren adalah materi pelajaran agama Islam secara keseluruhan, meskipun ada pesantren yang memberikan pendalaman bidang materi tertentu tetapi secara umum muatan pelajaran dasar diberikan, sedangkan materi pelajaran umum hanya sebagai pelengkap dan sebagai syarat apabila seorang siswa ingin mendapatkan pengakuan yang berupa ijazah maka harus lulus ujian mata pelajaran umum dan disetarakan dengan sekolah umum. Sesuai dengan fungsi pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan Islam yang berfungsi untuk mencetak dan mendidik ahli-ahli agama. Namun demikian dalam perkembangannya banyak pesantren yang mendirikan madrasah atau sekolah umum. Sebagai konsekuensi perkembangan sistem pendidikan yang berlaku dan perubahan sosial yang terjadi.

Kurikulum pesantren "salaf" yang statusnya sebagai lembaga pendidikan non formal hanya mempelajari kitab-kitab klasik yang meliputi : Tauhid, Tafsir, hadist, Fiqih, Ushul Fiqih, Tasawuf, Bahasa Arab(nahwu ,sorof, Balaghoh, dan Tajwid), Mantik, Akhlak pelaksanaan kurikulum pendidikan pesantren berdasarkan kemudahan dan kompleksitas ilmu atau masalah yang dibahas dalam kitab.²⁰² Kurikulum pesantren ini belum memberikan pengetahuan umum namun memberikan beberapa jenis ketrampilan (Live skill) sebagai bekal para santri dalam mempersiapkan hidupnya.

²⁰² Fak Tarbiyah IAIN Walisongo, *Dinamika*, hal. 88.

Kurikulum Pesantren Modern sudah diadaptasikan dengan kurikulum pendidikan Islam yang disponsori oleh departemen agama dalam sekolah formal (Madrasah), kurikulum pesantren dialokasikan dalam muatan lokal. Pembagian waktu belajar pada pagi hari sesuai dengan kurikulum sekolah selebihnya waktu yang ada untuk mengkaji keilmuan khas pesantren²⁰³

Prinsip nilai pendidikan Pesantren adalah *theocentric* (Berorientasi pada masalah ketuhanan), prinsip *theocentric* ini dapat dijabarkan menjadi nilai ibadah, kebijaksanaan, kesederhanaan, kemandirian hubungan kolektif dan kebebasan yang terjamin²⁰⁴, maka tujuan pembentukan pribadi yang bertauhid, beribadah, bermuamalah dan rohmatanlil alamin dapat terpenuhi sesuai dengan pendidikan Islam sebagai nilai. Menurut Tilar disamping aspek intelektualisme, inovatif dan kesenian juga kehidupan kembali nilai-nilai moral dan agama.²⁰⁵ Tujuan ini pada akhirnya bermuara pada fungsi pesantren sebagai lembaga pendidikan yang mempersiapkan dan mencukupi ahli-ahli agama dalam komunitas Islam sehingga akan menjamin proses Islamisasi dalam setiap tahap perjalanan ruang dan waktu.²⁰⁶

²⁰³ Fak Tarbiyah IAIN Walisongo, *Dinamika*, hal. 89

Seperti dalam teori fungsional sebuah sistem akan dapat berfungsi ketika dapat beradaptasi dengan lingkungannya

²⁰⁴ Mastuhu, *Prinsip Pendidikan Pesantren* (Jakarta: Reneka cipta TTH). 278-288.

²⁰⁵ HAR. Tilar, *Pendidikan dalam pembangunan nasional menyongsong abad XXI*, (Jakarta: Balai Pustaka 1990), hlm. 267.

²⁰⁶ Hiroko Horikashi, *Kyai dan Perubahan Sosial*, alih bahasa Umar Busailimi dan andi Muarly Sunrawa. Cet 1 (Jakarta : P3M), hlm. 125.

2. Mata pelajaran pendidikan agama Islam di Madrasah.

Muatan pelajaran umum lebih banyak prosentasenya dari pada mata pelajaran agama Islam, dilihat dari jumlah jam dan jenis mata pelajarannya, meskipun pelajaran agama Islam dibagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan disiplin ilmunya atau mata pelajaran ²⁰⁷, mata pelajaran agama menjadi pelajaran pokok yang menentukan dalam memberi penilaian terhadap status seorang siswa, baik pada saat penentuan kenaikan kelas maupun pada penentuan kelulusan ujian akhir. Artinya seorang siswa akan naik kelas atau lulus dalam ujian bila mata pelajaran agama Islam berhasil dengan baik.

Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 1990 kemudian ditindak lanjuti dengan SKB 3 Menteri seperti tersebut diatas membawa konsekuensi bobot pendidikan umum pada madrasah harus sama dengan sekolah umum dengan tidak mengurangi pendidikan agama sebagai ciri khususnya²⁰⁸. Menurut Zamachsyari ciri khas agama Islam dikembangkan melalui tiga bentuk:

- a. Penjabaran mata pelajaran menjadi 5 mata pelajaran; Akidah, Akhlaq, Fiqih, al qur'an- hadist, Sejarah islam dan Bahasa arab.

²⁰⁷ Haidar, *Historisitas*, hal. 86-87.

Mata pelajaran agama di Madrasah antara lain:

1. Al Qur'an Hadist
2. Aqidah Akhlaq
3. Fiqih
4. Sejarah Islam
5. Bahasa Arab

²⁰⁸ Zamachsari Dlofir, *Kebijakan Departemen Agama dari Masa ke Masa dalam Kurun Setengah Abad*(Jakarta : Balitbang Depad RI 1996) hal 64.

- b Penciptaan Suasana keagamaan antara lain melalui: suasana kehidupan madrasah yang agamis, Adanya sarana Ibadah, Penggunaan metode pendekatan agama pada mata pelajaran yang memungkinkan,
- c Kualifikasi guru madrasah harus beragama Islam dan berakhlak mulia²⁰⁹

Struktur kurikulum berdasarkan lampiran Permendiknas Nomor 22 tahun 2006 tanggal 23 mei 2006 tentang Standar Isi.²¹⁰

Tabel 4.1 : Struktur Kurikulum SD/MI

KOMPONEN	Kelas dan Alokasi Waktu			
	I	II	III	IV, V, dan VI
A. Mata Pelajaran				
1. Pendidikan Agama				3
2. Pendidikan Kewarganegaraan				2
3. Bahasa Indonesia				5
4. Matematika				5
5. Ilmu Pengetahuan Alam				4
6. Ilmu Pengetahuan Sosial				3
7. Seni Budaya dan Keterampilan				4
8. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan				4
B. Muatan Lokal				2
C. Pengembangan Diri				2*)
Jumlah	26	27	28	32

²⁰⁹ Zamachsari Dlofir, *Perkembangan Pemikiran Islam di Indonesia pada seperempat terakhir Abad ke 20* (Semarang : Walisongo Press 2007) hal 24.

²¹⁰ Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2006 tanggal 23 mei 2006 tentang Standar Isi

*) Ekuivalen 2 jam pembelajaran

Tabel 4.2 : Mata pelajaran agama pada MI

NO	BIDANG STUDI	JUMLAH JAM DAN KELAS						JUMLAH
		I	II	III	IV	V	VI	
1	AL-Qur'an- Hadist	2	2	2	2	2	2	12
2	Aqidah ahlaq	2	2	2	2	2	2	12
3	Fiqih	2	2	3	3	3	3	18
4	Sejarah Islam	-	-	1	1	1	1	4
5	Bahasa arab	-	-	4	4	4	4	16
								60

Mata Pelajaran Agama mulai kelas I – IV 60 jam perminggu dari 228 jam berarti

mata pelajaran agama sekitar 26 %

Tabel 4.3 : Struktur Kurikulum SMP/MTs

Komponen	Kelas Dan Alokasi Waktu		
	VII	VIII	IX
A. Mata Pelajaran			
1. Pendidikan Agama	2	2	2
2. Pendidikan Kewarganegaraan	2	2	2
3. Bahasa Indonesia	4	4	4
4. Bahasa Inggris	4	4	4
5. Matematika	4	4	4
6. Ilmu Pengetahuan Alam	4	4	4
7. Ilmu Pengetahuan Sosial	4	4	4
8. Seni Budaya	2	2	2
9. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	2	2	2

10. Keterampilan / T I K	2	2	2
B. Muatan Lokal	2	2	2
C. Pengembangan Diri	2*)	2*)	2*)
Jumlah	32	32	32

2*) Ekuivalen 2 jam pembelajaran

Tabel 4.4 : Mata pelajaran agama pada MTs

JENIS PROGRAM	BIDANG STUDI	KELAS / SEMESTER						JMLH
		I		II		III		
		1	2	3	4	5	6	
PENDIDIK AN DASAR UMUM	AL-Qur'an- Hadist	2	2	2	2	2	2	12
	Aqidah ahlaq	2	2	2	2	2	2	12
	Fiqih	3	3	2	2	2	2	14
JENIS PROGRAM	BIDANG STUDI	KELAS / SEMESTER						JMLH
		I		II		III		
		1	2	3	4	5	6	
PENDIDIK AN DASAR UMUM	Sejarah Islam Dan Kebudayaan Islam	-	-	2	2	2	1	7
	Bahasa Arab	4	4	4	4	4	4	24
								69

Kelompok mata pelajaran agama terdiri dari dua program, pendidikan dasar umum dan pendidikan dasar akademik jumlah keseluruhannya 69 jam pelajaran perminggu, dari kelas I - III jumlah prosentasenya adalah : $89 \div 248 \times 100 = 28\%$

Tabel 4.5 : Struktur Kurikulum SMA/MA Kelas X

KOMPONEN	ALOKASI WAKTU	
	Semester 1	Semester 2
A. Mata Pelajaran		
1. Pendidikan Agama	2	2
2. Pendidikan Kewarganegaraan	2	2
3. Bahasa Indonesia	4	4
4. Bahasa Inggris	4	4
5. Matematika	4	4
6. Fisika	2	2
7. Biologi	2	2
8. Kimia	2	2
9. Sejarah	1	1
10. Geografi	1	1
11. Ekonomi	2	2
12. Sosiologi	2	2
13. Seni Budaya	2	2
13. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	2	2
14. Teknologi Informasi dan Komunikasi	2	2
15. Keterampilan /Bahasa Asing	2	2
B. Muatan Lokal	2	2
C. Pengembangan Diri	2*)	2*)
Jumlah	38	38

2*) Ekuivalen 2 jam pembelajaran

Tabel 4.6 : Mata pelajaran agama pada MA

JENIS PROGRAM	BIDANG STUDI PENDIDIKAN AGAMA	KELAS / SEMESTER						JMLH
		I		II		III		
		1	2	3	4	5	6	
PROGRAM INTI	AL-Qur'an- Hadist	2	2	2	2	2	2	12
	Aqidah ahlaq	2	2	2	2	2	2	12
	Fiqih	2	2	2	2	2	2	12
	Sejarah Islam Dan Peradaban Islam	-	-	-	-	2	2	4
	Bahasa arab	3	3	3	3	3	3	16
								59

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa prosentase pelajaran Agama Islam pada Madrasah sekitar 25%-30% dengan muatan mata pelajaran Aqidah, Akhlak, Fiqih, Tarih dan bahasa Arab artinya penanaman nilai-nilai keislaman dapat dilaksanakan dalam setiap mata pelajaran tersebut. Tetapi penampakan identitas ciri keislaman belum dapat ditonjolkan sebagai ciri khusus dengan menanamkan budaya keislaman dalam madrasah hal itu juga dapat diterapkan dalam sekolah umum, maka menjadi dilematis bagi madrasah untuk tetap eksis menonjolkan ciri khusus dengan muatan pelajaran keagamaannya atau mensejajarkan dengan sekolah umum tetapi kehilangan ciri khususnya.

3. Mata pelajaran pendidikan agama Islam di sekolah Islam

Pada sekolah Islam mata pelajaran pendidikan agama Islam bila dilihat dari Jenisnya sama dengan madrasah tetapi jumlah jamnya lebih sedikit

(20% pelajaran agama Islam 80% mata pelajaran umum), pelajaran agama Islam kedudukannya tidak sekuat pada madrasah, pada sekolah Islam faktor penentu kenaikan dan kelulusan seperti dalam sekolah umum yaitu mata pelajaran yang diunaskan.

Pada sekolah umum pendidikan agama tidak dipecah sesuai dengan disiplin ilmu tetapi jadi satu dengan nama mata pelajaran agama Islam. Dalam setruktur kurikulum menempatkan mata pelajaran agama pada posisi paling diutamakan akan tetapi secara praktis mata pelajaran agama belum menjadi penentu indikator tingkat keberhasilan proses pendidikan, dapat dilihat jumlah jam yang minim yaitu dua jam pelajaran perminggu dengan beban materi yang tidak seimbang dengan jam yang diberikan, disisi yang lain mata pelajaran agama Islam mempunyai karakteristik yang berbeda dengan mata pelajaran yang lain maka sesungguhnya menjadi keharusan bila mata pelajaran agama menjadi mata pelajaran dasar dari semua mata pelajaran. Mata pelajaran agama disekolah secara praktis belum menjadi penentu indikator tingkat keberhasilan proses pendidikan. Penentu tingkat keberhasilan pendidikan adalah mata pelajaran yang diunaskan. maka fenomena yang berkembang adalah apabila nilai unasnya bagus meskipun anak tersebut tidak mempunyai komitmen keagamaan yang ditunjukkan dengan ibadah dan prilakunya anak tersebut dengan mulus dikatakan berhasil.

Memang secara eksplisit disebutkan dalam kriteria kelulusan siswa akan lulus bila pelajaran agama dan akhlaq mulia mendapatkan nilai baik

(secara kuantitatif disamakan dengan minimal nilai 70, (dari skala nilai 0 sampai dengan 100)²¹¹ tetapi pada prakteknya ketentuan itu tidak dapat difungsikan karena setiap sekolah mempunyai target kuantitas kelulusan yang tinggi tanpa mempertimbangkan tingkat kualitasnya, pendidikan agama dan akhlak mulia tidak mempunyai indikator kuantitas yang pasti dan tidak diunaskan dengan sistem penilaian tanpa manipulatif maka setiap sekolah berusaha menaikkan tingkat kelulusan dengan memanipulasi angka penilaian mata pelajaran yang tidak diunaskan dan itu termasuk pendidikan agama.

Dikotomi pengetahuan dalam sekolah umum semakin terbuka, pendidikan Islam sebagai mata pelajaran tidak dapat memenuhi fungsinya seperti yang disampaikan Wan Muhammad Wan Daud Ibrahim bahwa pendidikan Islam menginternalisasi serta menyelaraskan fungsi-fungsi yang lain, sehingga berdampak pada tidak rubahnya lingkungan apalagi memelihara nilai-nilai dan pola prilakunya.

Pada masa pemerintahan presiden Habibie ada muatan intak dan iptek dengan realisasi nyata disekolah adanya keterkaitan dan pemberian dasar mata pelajaran agama dalam mata pelajaran umum misalnya matematika, ilmu pendidikan alam dan ilmu pendidikan sosial dengan mengutip beberapa ayat alquran yang berkaitan dengan materi yang disampaikan.

Meskipun pendidikan agama menjadi topik yang hangat dibicarakan menjelang disahkannya Rancangan Undang- Undang Sistem Pendidikan

²¹¹ Pedoman Oprasional sekolah, hal. 7

Nasional (RUU Sisdiknas), Pendidikan agama di sekolah dianggap penting dan harus diberikan sesuai dengan anak didiknya, baik agama maupun gurunya. tetapi bila dilihat pada realitas pendidikan agama Islam yang diberikan di sekolah, ternyata masih bersifat doktrinal, monolog, dan dipenuhi muatan formalitas normatif yang kurang dapat menanamkan budaya dan nilai keagamaan kepada anak didiknya. Selain itu, penilaiannya cenderung bias, karena tolok ukurnya yang tidak jelas apakah pada penguasaan formal ajaran keislaman sebagai sebuah doktrin, atau lebih dalam lagi pada realitas kesalehan sosial sebagai manifestasi dari iman seseorang yang beragama Islam

- a. Pendidikan Islam sebagai mata pelajaran dan nilai belum mampu memberikan pemahaman dasar yang menghasilkan sikap laten sehingga dapat berfikir, bersikap dan berperilaku sesuai nilai-nilai Tauhid, kemanusiaan. Keseimbangan dan nilai rahmatil lil alamin belum dapat ditanamkan dalam kepribadian siswa. Kegagalan inilah yang kemudian para pakar mengatakan terjadinya kebobrokan dan rusaknya mental bangsa. Kondisi ini cermin dari gagalnya dunia pendidikan dalam menanamkan nilai-nilai lebih husus lagi kegagalan dunia pendidikan agama
- b. Pendidikan agama Islam belum mampu memahamkan kepada keimanan yang khakiki, keimanan itu bukan hanya terrefleksi dalam bentuk *ibadah mahdloh* dan kesalehan sosial tetapi nampak pada aksi-aksi solidaritas sosial masyarakat Islam, tetapi justru aksi solidaritas itu dikebiri

dikarenakan dianggap membahayakan. Contoh persoalan jihad sebagai materi penanaman nilai Islam tidak diberikan di madrasah dan sekolah.

- c. Lemahnya penguasaan metodologi dalam pendidikan Islam hal ini mengakibatkan mata pelajaran agama Islam dilakukan dengan monoton dan berbasis ceramah maka diperlukan pendekatan lain seperti CTL membangun makna yang berkualitas danb menghubungkan antara pemahaman konsep dengan mata pelajaran yang lain dan realitas personalk siswa.²¹²
- d. Diperlukan penanaman budaya Islam dalam institusi pendidikan bukan hanya pengetahuan Islam, hal ini dikarenakan nilai-nilai Islam adalah nilai aplikatif bukan nilai-nilai yang bersifat teoritis.
- e. Terjadinya dikotomi ilmu yang berakibat pada terpasungnya wawasan keislaman yang sesungguhnya *rohmatan lil alamin*. Persoalan-persoalan keimanan dengan kolaborasi pendekatan filsafat sains akan jauh memberikan pemahaman kepada siswa yang lebih riil dan rasional maka integrasi kurikulum dalam pendidikan Islam menjadi penting.

Otonomi Daerah dan desentralisasi pendidikan berdampak pada beraneka ragamnya kebijakan terutama terhadap mata pelajaran pendidikan Islam disekolah umum, bila stik holder disekolah tersebut mempunyai keberpihakan terhadap pengembangan agama Islam maka dengan sendirinya kebijakan yang diambil akan menguntungkan bagi mata pelajaran agama

²¹² Elaine B. Johnson, PH.D, *Contekstual Teaching and Learning*, alih bahasa. Ibnu Setiawan, Cetakan . V (Bandung : MLC, 2007), Hal. 20.

Islam tetapi bila tidak faham maka akan merugikan dalam pengembangan mata pelajaran pendidikan agama Islam.

Penciptaan nuansa keagamaan di sekolah merupakan kebijakann institusi bukan kebijakan umum yang terlepas dari penguasaan materi tetapi lebih kepada penanaman nilai-nilai keIslaman kepada para siswa, berperan besar dalam mengembangkan dan penguatan perilaku-perilaku Rahmatan lil ‘Alamin, universal yang pada gilirannya akan mampu menciptakan peradaban atau kebudayaan yang disebut oleh al Qur’an sebagai *baladatum thoyyibatun wa robbun ghofur*.

Out put pendidikan Islam belum menghasilkan individu yang memiliki integritas tinggi, yang bisa bersyukur dan menyatu dengan kehendak Tuhannya, menyatukan dirinya (*tidak terjadi split personality*), menyatu dengan masyarakat (*tidak ada disintegrasi sosial*) dan menyatu dengan alam (*tidak membuat kersakan*). Untuk mencapai ke sana, menurut Usman Abu Bakar sekurang-kurangnya out put pendidikan Islam harus mengarah kepada profil individu yang mempunyai: (1) spiritualitas yang tinggi, (2) ketinggian dan kedalaman ilmu, (3) komitmen kepada profesionalisme dan, (4) komitmen kepada akhlakul karimah.²¹³

Spiritualitas yang tinggi berarti pendidikan Islam sebagai suatu pendidikan yang melatih perasaan terdidik dengan cara begitu rupa sehingga dalam sikap hidup, tindakan, keputusan dan pendekatan mereka terhadap

²¹³ Usman Abu Bakar dan Surohim, *Fungsi Ganda Lembaga pendidikan Islam* (Yogyakarta: Safiria Insania pres), hal. 39.

segala jenis pengetahuan, dipengaruhi sekali oleh nilai spiritual mentalnya menjadi begitu berdisiplin. Sehingga mendapatkan pengetahuan bukan semata-mata untuk memuaskan rasa ingin tahu intelektual, atau hanya memperoleh keuntungan material saja, melainkan untuk berkembang sebagai intelektual rasional yang berbudi luhur dan melahirkan kesejahteraan, spiritual, moral dan fisik bagi keluarga, bangsa dan seluruh umat manusia.

Sikap-sikap di atas, menurut *Ali Ashraf* berasal dari keyakinan yang mendalam terhadap Allah SWT dan penerimaan seluruh hati atas ketentuan moral yang diberikan oleh-Nya²¹⁴. Keabadian kepentingan dan makna dari ketentuan semacam itu, menurut Ashraf, untuk perkembangan wajar dari seorang manusia rasional dan spiritual dijalani dan dipahami melalui prinsip-prinsip itu dalam alam dan masyarakat, dalam perspektif ini, maka seseorang yang menerima pendidikan Islam tumbuh menjadi pribadi pecinta kedamaian, selaras, mantap dan berbudi luhur dengan keyakinan dan kepercayaan pada belas kasih Allah yang tidak habisnya dan keadilan-Nya yang tak ada tandingannya, serta hidup rukun dan tidak bertentangan dengan alam.

Pendidikan agama Islam di sekolah, seharusnya dikembalikan pada pendidikan iman sebagai proses pendakian spiritualitas yang menyatu dalam tahap-tahap praktik kesalehan sosial. Jika pendidikan agama di sekolah masih diajarkan dengan semangat antirealitas, maka pendidikan agama akan

²¹⁴Ali Asraf, *Horison*, hal 4.

menjadi proses pendangkalan iman, merobek keindonesiaan dan mengukuhkan paradoks dalam kehidupan masyarakat. Di mana dalam masyarakat yang dikenal taat beragama, tetapi justru merebak konflik kekerasan, tindak kejahatan, dan korupsi.

Pendidikan Islam sebagai mata pelajaran belum mampu mengikat komitmen kepada keimanan dan akhlaqul karimah, bahwa orang yang berakhlak mulia memiliki kesadaran sejarah yang tinggi, yakni asal kejadiannya sejarah perkembangan hidupnya, dan kemudahan serta kesukaran yang pernah diperolehnya, orang berakhlak berarti orang yang memiliki kesadaran ilahiyah yang tinggi, ini juga memunculkan rasa pengabdian yang tinggi dan rasa tanggungjawab terhadap peningkatan kualitas hidupnya sebagai makhluk mulia, berarti orang yang berakhlak merupakan orang memiliki kesadaran terhadap posisinya sebagai makhluk Allah, melahirkan sifat kebersamaan dan kesadaran sosial yang tinggi.

Undang-Undang Sisdiknas seharusnya menjauhkan diri dari pendidikan agama yang menekankan pada kulitnya saja tetapi melupakan isinya. Jika tidak, sebaiknya pendidikan agama ditarik mundur dari pendidikan di sekolah kita.

A. Pendidikan Islam Masa Depan

Pendidikan Islam di Indonesia berada pada persimpangan jalan antara mempertahankan tradisi lama atau mengadopsi perkembangan baru,

pendidikan Islam bukan hanya menjadi “cagar budaya” tetapi menjadi *agent of change*, maka orientasi pendidikan Islam pada mutu dengan mengadakan penyempurnaan tanpa kehilangan jati diri keIslamannya.²¹⁵ Dikan hanya menjadi manusia yang sholeh tetapi juga produktif. Malik Fajar merumuskan pendidikan Islam harus memenuhi 4 syarat antara lain :

1. Kejelasan cita-cita dan langkah yang operasional
2. Memberdayakan lembaga dengan penataan kembali sistemnya
3. Meningkatkan dan memperbaiki manajemen
4. Peningkatan mutu Sumber daya manusia.²¹⁶

Tuntutan masyarakat terhadap Lembaga pendidikan yang dipandang ideal adalah lembaga pendidikan yang mampu mengembangkan berbagai potensi siswa secara utuh, yaitu potensi spiritual, akhlak, intelektual yang biasanya diukur dari perolehan UN dan potensi sosial maupun ketrampilan anak didiknya. Dengan kata lain seimbang antara nilai dan sikap, pengetahuan, kecerdasan, ketrampilan, kemampuan komunikasi, dan kesadaran ekologi dan lingkungan berarti seimbang antara IMTAQ yang meliputi IQ (*Intellectual Quotient*) EQ (*Emotional Quotient*) dan SQ (*Spiritual Quotient*).²¹⁷

Menurut Piaget nilai-nilai intelektual selama belajar di sekolah sama maknanya dengan nilai moral selama hidup, penanaman nilai untuk satu generasi diteruskan generasi berikutnya, mengajar dan belajar adalah tindakan yang bersifat normatif bukan hanya bersifat kausal bahwa pendidikan adalah

²¹⁵ Suwito (ed), *Sejarah Sosial Pendidikan Islam* (Jakarta : Pranada media 2005), hal. 227.

²¹⁶ Malik Fajar, *Uraian Pembaharuan pendidikan Islam* (Jakarta: Fajar Dunia 1989), hal 150-151.

²¹⁷ Ridhwan Nasir, *Menemukan Format Pendidikan Islam Ideal* (Yogyakarta : pustaka pelajar 2005).

pertukaran yang sarat nilai yang keberhasilannya tergantung pada transmini dan transformasi²¹⁸

Tidak kalah pentingnya adalah pada proses belajar dan mengajar, penggunaan metode yang tepat mengarahkan pada kebutuhan kehidupan anak (kontekstual) sehingga berdampak pada pendidikan yang bermakna dan menarik bagi anak, melalui pendekatan individu karena setiap anak mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. A.S. Nil berpendapat bahwa hanya belajar yang dilaksanakan secara sukarelah yang bernilai dan anak akan mengenal dirinya sendiri setelah belajar.²¹⁹

Lembaga pendidikan yang berkualitas jika para lulusannya meraih kedewasaan pribadi secara utuh, yaitu dewasa spiritual dan akhlak, dewasa intelektual, dewasa sosial, dan memiliki kecakapan hidup. Rumusan ini mungkin masih debatable, akan tetapi untuk mewujudkannya memerlukan energi lebih, niat yang ikhlas, integritas dan usaha sungguh-sungguh, serta pengorbanan yang tinggi

Lembaga pendidikan Islam hendaknya mempunyai paradikma baru mengalihkan paradigma yang berorientasi ke masa lalu (abad pertengahan) ke paradigma yang berorientasi ke masa depan, yaitu mengalihkan dari paradigma pendidikan yang hanya mengawetkan kemajuan, ke paradigma pendidikan yang merintis kemajuan, mengalihkan paradigma dari yang

²¹⁸ Joy A. Palmer, Fifty, hal. 76.

²¹⁹ Joy A. Palmer: Fifty, hal.3.

berwatak feodal ke paradigma pendidikan berjiwa demokrasi²²⁰. Mengalihkan paradigma dari pendidikan sentralisasi ke paradigma pendidikan desentralisasi, sehingga menjadi pendidikan Islam yang kaya dalam keberagaman, dengan titik berat pada peran masyarakat dan peserta didik. Proses pendidikan perlu dilakukan “kesetaraan perlakuan sektor pendidikan dengan sektor lain, pendidikan berorientasi rekonstruksi sosial, pendidikan dalam rangka pemberdayaan umat dan bangsa, pemberdayaan infrastruktur sosial untuk kemajuan pendidikan. Pembentukan kemandirian dan keberdayaan untuk mencapai keunggulan, penciptaan iklim yang kondusif untuk tumbuhnya toleransi dan konsensus dalam kemajemukan. Dari pandangan ini, berarti diperlukan perencanaan terpadu secara horizontal antarsektor dan vertikal antar jenjang – bottom-up dan top-down planning, pendidikan harus berorientasi pada peserta didik dan pendidikan harus bersifat multikultural serta pendidikan dengan perspektif global,

Berangkat dari keterangan diatas maka format lembaga Islam masa depan adalah :

1. Format Pesantren

Pesantren di masa yang akan datang dituntut berbenah, menata diri dalam menghadapi persaingan global. Perubahan dan pembenahan yang dimaksud hanya sebatas menejemen dan bukan coraknya apalagi berganti baju dari salafiyah ke *mi'asyir* (*moderen*), karena hal itu hanya akan menghancurkan nilai-nilai positif pesantren seperti yang terjadi sekarang

²²⁰Winarno Surakhmad, From: [http://www. Bpk_penabur.or.id / kps-jkt/berita/200006/artikel2.htm](http://www.Bpk_penabur.or.id/kps-jkt/berita/200006/artikel2.htm), 27 Mei 2002].

mi. Pesantren tidak harus kehilangan kepribadiannya sebagai tempat pendidikan keagamaan bahkan tradisi-tradisi keagamaan sebenarnya merupakan ciri khusus yang harus dipertahankan, karena disinal letak kelebihanannya.²²¹

Maka, idealnya pesantren ke depan harus bisa mengimbangi tuntutan zaman dengan mempertahankan tradisi dan nilai-nilai kesalafannya. Pertahankan pendidikan formal Pesantren khususnya kitab kuning dari Ibtidaiyah sampai Aliyah sebagai KBM wajib santri dan mengimbangnya dengan pengajian tambahan, kegiatan extra seperti kursus computer, bahasa inggris, skill lainnya dan program paket A, B dan C untuk mendapatkan Ijazah formalnya. Atau dengan menjalin kerjasama dengan sekolah lain untuk mengikuti persamaan. Jika hal ini terjadi, akan lahir lah ustad-ustad, ulama dan *fuqoha* yang mumpuni.

Rekayasa sosial dapat terwujud manakala ciri pembaharuan ada pada pesantren, meskipun demikian ciri lama pesantren yang masih relevan harus dipertahankan, ada tiga ciri khas pesantren yang menurut hemat penulis harus dipertahankan oleh pesantren tradisional apabila ingin mengambil peran yang bermakna dalam rekayasa sosial dan memberikan arah pada transformasi sosial kondisi pendidikan yang diharapkan dalam pesantren, antara lain dimensi kultural, educatif dan sosial, kondisi pendidikan yang diharapkan dalam pesantren

a. Dimensi kultural kemandian pesantren sebagai lembaga pendidikan

²²¹Nurcholis Majid, *Bilik-Bilik Pesantren Sebuah potret perjalanan* (jakarta: Paramadina, 1997),Cet.I. hal.3.

Islam harus dipertahankan, kemandirian mengeleminir intervensi dari pihak luar, meskipun jangan sampai mengunci diri, atau isolasi. Oleh karena itu solidaritas seponan perlu ditingkatkan menjadi solidaritas yang terorganisir.²²² Kedalam hubungan akademis yang fungsional antar pesantren. Kesederhanaan perlu dipertahankan sebagai modal dalam mengembangkan diri dan pemeliharaan pola.pola hubungan yang tidak berimbang dirubah dalam pola hubungan yang demokratis, fleksibel dan inofatif meskipun tidak egaliter. Membuka diri mengambil wawasan baru yang telah disaring dalam bentuk pemahaman yang baru dan baku.

- b. *Dimensi Edukatif*, Pada dimensi edukatif ini output pesantren adalah ahli dalam bidang keagamaan atau pimpinan keagamaan (*relegius leader*), disisi yang lain tuntutan spesialisasi dan deferensiasi dalam masyarakat memberikan peran yang lebih besar kepada pesantren untuk mengembangkan dirinya sesuai dengan tuntutan masyarakat, maka akan menjadi lebih bermakna bila pesantren dapat menjawab tuntutan masyarakat.
- c. *Dimensi sosial* pensantren dapat dikembangkan sebagai pusat kegiatan masyarakat (Comunity learning Center) yang berfungsi menyampaikan informasi dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan memberikan pelayanan sosial keagamaan, disisi yang

²²² Zaenudin Maliki, *Sosiologi*, hal. 44.

Dalam Istilah Durhem tentang teori fungsional Solidaritas organik adalah solidaritas yang moderen terorganisir dan solidaritas mekanik tradisional yang tidak terorganisir

lain masyarakat juga menjadi “*laboraturium sosial*” bagi pesantren dimana pesantren melaksanakan eksperimen pengembangan masyarakat sehingga terjadi hubungan timbal balik antara pesantren dengan masyarakat²²³

Boarding school menjadi alternatif pilihan sebagai model pengembangan pesantren yang akan datang. Pemerintah diharapkan semakin serius dalam mendukung dan mengembangkan konsep pendidikan seperti ini. Sehingga, pesantren menjadi lembaga pendidikan yang maju dan bersaing dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang berbasis pada nilai-nilai spiritual yang handal.

2. Format Madrasah

Madrasah masa datang adalah Madrasah terpadu dengan mengembangkan visi dan misinya secara terpadu, manajemen terpadu, kurikulum terpadu, maupun sarana dan prasarana secara terpadu. Lebih dari itu, diharapkan para siswa menikmati keberlanjutan pendidikan yang sistematis mulai dari tingkat dasar di MI, M.Ts, dan MA. Para siswa tidak perlu pindah ke lembaga pendidikan lain, ketika mereka telah menyelesaikan satu tingkat pendidikan, seperti yang dialami kebanyakan madrasah yang tidak menganut sistem integratif.

Madrasah Integratif bertujuan mewujudkan integrasi antara pengembangan spiritual, akhlak, pengembangan intelektual, pengembangan sosial, dan kecakapan lainnya Madrasah terpadu selama ini

²²³ Fak Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, *Dinamika*, hal.63-65.

dimaknai sebagai keterpaduan di antara beberapa jenjang yang berbeda SD/MI, SLTP/M.Ts dan SMU/MA tetapi juga yang harus diperhatikan adalah ciri khas lembaga pendidikan integratif itu. Yang dimaksudkan integrasi itu adalah pengembangan keterpaduan secara nyata antara nilai-nilai Islam dengan ilmu pengetahuan umum, maka suasana pendidikan, kultur akademik, kurikulum, sarana dan prasarana dan yang tidak kalah pentingnya adalah profil guru yang harus dipenuhi untuk mewujudkan konsep pendidikan integratif seperti yang dimaksudkan. Integrasi tidak hanya bersifat formal, yang hanya mencakup persoalan-persoalan sepele dan artifisial, tetapi integrasi dalam kualitas berbagai komponen sistem penyelenggaraan pendidikan, yang semuanya itu berujung pada terwujudnya kepribadian siswa yang integratif, yang sekaligus menunjukkan adanya tingkat keunggulan tertentu dibandingkan dengan yang lain.

Jika pendidikan integratif dipandang sebagai model yang lebih baik, maka dari sekolah ini semestinya lahir berbagai bentuk keunggulan (*excellencies*) terkait dengan berbagai komponen sistem pendidikannya. Institusi pendidikannya haruslah lebih unggul, demikian juga keunggulan itu juga tampak pada kualitas guru, sistem akademik, sosio-kultural sekolah, manajemen, sarana dan fasilitas, termasuk sumber-sumber belajar lainnya, serta keunggulan menyangkut profil siswa atau kelulusannya.

3. Format sekolah Islam

Sekolah Islam harus memperhatikan perkembangan globalisasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan dan peristiwa yang terjadi di tengah masyarakat serta harapan tentang masyarakat dunia masa depan. Pendidikan yang berkualitas harus memperhatikan azas-azas psikologi, psikometri dan pedagogi. Semua aktivitas belajar selayaknya berlandaskan kepada pencapaian tugas-tugas perkembangan dan prinsip-prinsip belajar yang meliputi hal-hal yang terkait dengan kerja kognitif, individual differences, motivasi, bakat dan kecenderungan, serta tata hubungan antar individu. Semua itu kemudian akan mempengaruhi pola dan model instruksional, class management, class assessment, media belajar dan sebagainya.

Sekolah yang menjanjikan perbaikan masa depan adalah sekolah yang memiliki paradigma pendidikan yang maju dan visioner. Pendidikan haruslah mampu menumbuhkan dan mengembangkan potensi fitrah peserta didik yang memiliki sederet keunggulan kompetitif guna menghadapi segala tantangan ke depan. Pendidikan harus mampu melahirkan lulusan-lulusan yang memiliki karakter dan kemampuan sebagai berikut:

- a. Memiliki pemahaman yang benar terhadap ajaran Islam dan landasan keimanan dan ketaqwaan yang kokoh sebagai wujud dari ketahanan tersebut
- b. Kemampuan riset dan teknologi yang tepat
- c. Penguasaan bahasa internasional yang cakap
- d. Motivasi berprestasi dan Keterampilan belajar yang tinggi

- e. Kepemimpinan yang kuat
- f. Kesehatan yang prima
- g. Keterampilan hidup (*life skill*)
- h. Memiliki etos kerja dan disiplin yang tinggi
- i. Kepedulian terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”
- j. Rasa percaya diri yang kuat, dan kebanggaan terhadap sejarah kepemimpinan Islam.

Sekolah Islam seharusnya mampu memadukan secara harmonis dan seimbang antara apa yang disebut sebagai “ayatul qauliyah” berupa ajaran Al Qur’an dan Hadis Nabi yang suci sebagai petunjuk dan pedoman hidup (*minhajul hayah*) dan “ayatul kauniyah” berupa segala fenomena alam yang merupakan sunnatul kaun yang menjadi sarana dan fasilitas kehidupan (*wasailul hayah*). Dengan perpaduan yang harmonis dan seimbang maka sekolah Islam telah membebaskan dirinya dari keterjebakan arus “sekulerisasi kurikulum”, ataupun kejumudan dalam arus “sakralisasi kurikulum”.

Sekolah Islam yang ideal adalah sekolah yang melibatkan peran serta guru, orangtua dan masyarakat sesuai dengan proporsinya. Artinya, sekolah yang merupakan lembaga melahirkan generasi yang berkualitas menjadi tanggung jawab bersama antara negara, sekolah, orangtua dan masyarakat. Pengelolaan sekolah yang efektif mestinya melibatkan peran serta keempat pihak tersebut, sesuai dengan peran dan fungsinya. Negara, dalam hal ini pemerintah memberi dukungan, kemudahan dan perlindungan bagi terselenggaranya sekolah, Orangtua dapat memberi masukan, membantu memperkaya proses belajar, menjadi nara-sumber

dan fasilitator dalam berbagai kegiatan sekolah. Masyarakat dapat membantu menyediakan sumber dan fasilitas belajar tambahan yang ada di luar sekolah.

Lingkungan yang baik (*biah solihah*) merupakan salah satu kriteria penting bagi sekolah Islam. Lingkungan yang bersih, rapih, sehat dan nyaman merupakan syarat mutlak bagi sekolah Islam. Mampu menciptakan suasana pergaulan dan interaksi yang Islami: santun, saling menyayangi dan menghormati, saling melindungi dan saling berbagi. Cerminkan sekolah Islam yang baik juga ditunjukkan oleh warganya yang tertib, disiplin dan rapih.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian dan analisa dengan menggunakan pendekatan historis sosiologis dalam pembahasan tentang “Eksistensi dan fungsi pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional “, maka dapat disimpulkan sebagai berikut

1. Pendidikan Islam dalam perspektif undang-undang No 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional mempunyai kedudukan yang sangat kuat, dapat dilihat dalam 12 point dari Undang-Undang tersebut yaitu pada; 1) konsideran “menimbang”, 2) Bab I tentang Ketentuan Umum, 3) Pasal 3 tentang fungsi pendidikan nasional, 4) Pasal 12 ayat 1 a tentang hak peserta didik, 5) Pasal 17 ayat 2 tentang bentuk Pendidikan Dasar, 6) Pasal 18 ayat 3 tentang bentuk Pendidikan Menengah, 7) Pasal 26 ayat 4 tentang bentuk satuan pendidikan nonformal, Pasal 30 tentang Pendidikan Keagamaan, 9) Pasal 36 ayat 3 tentang aspek kurikulum, 10) Pasal 37 ayat 1 tentang kurikulum pendidikan dasar, 11) Pasal 37 ayat 2 tentang kurikulum pendidikan tinggi, dan 12) Pasal 38 ayat 2 tentang koordinasi dan supervisi Departemen Agama.²²⁴ dan Peraturan Pemerintah No 25 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan keagamaan Pada pasal 5 ayat 4 misalnya dapat ditemukan konsep yang sangat ideal yang menyebutkan

²²⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

bahwa pendidikan agama membangun sikap mental peserta didik untuk bersikap dan berperilaku jujur, amanah, disiplin, bekerja keras, mandiri, percaya diri, kompetitif, kooperatif, tulus, dan bertanggung jawab. Ayat ini menyebutkan sepuluh karakter unggulan yang di negara-negara lain ramai dikejar melalui pendidikan karakter. Tetapi sayangnya, di sini pulalah letak kelemahan pendidikan agama di Indonesia selama ini. bahkan setelah UU Sisdiknas ini disahkan dan PP yang mengatur pendidikan agama lahir, pendidikan agama di sekolah-sekolah masih belum memiliki korelasi dengan pembentukan karakter (character building) seperti yang diamanatkan PP ini. Pendidikan agama masih berkutat sebagai pengajaran pengetahuan agama yang mengeram dalam ranah kognitif.

2. Fungsi pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional dapat dilihat dalam dua hal antara lain :
 - a. Pendidikan Islam sebagai lembaga

Lembaga pendidikan Islam yang dimaksud adalah pesantren, Madrasah dan Sekolah Islam, terjadi dualisme dalam pengelolaan lembaga pendidikan Islam, dualisme ini menimbulkan ketimpangan dalam pengelolaan Departemen Agama sebagai instansi vertikal dari pusat sementara Departemen Pendidikan Nasional sudah otonomi daerah pengelolaan diserahkan pada Pemerintah Daerah.

- 1). Pesantren sampai pada masa sekarang menjadi Lembaga Pendidikan Islam yang berfungsi mencetak ahli-ahli agama dengan kurikulum "*Religious oriented*" hal ini sesuai dengan fungsi

pendidikan keagamaan yang tertuang dalam PP No 25 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan keagamaan.

- 2). Madrasah menjadi lembaga pendidikan Islam yang kehilangan jati dirinya out put madrasah serba tanggung tidak menguasai mata pelajaran agama dan tidak menguasai mata pelajaran umum kecuali madrasah yang ada dalam pesantren penguasaan ilmu agama lebih baik. Dualisme pengelolaan pendidikan menempatkan madrasah pada posisi termarginalkan dari perhatian pemerintah bila dibanding dengan sekolah umum dikarenakan mayoritas madrasah adalah madrasah swasta, maka realitas yang terjadi kurangnya sentuhan tangan pemerintah bagi madrasah swasta dan sering terjadi ketidak seimbangan antara program pemerintah dan sumberdaya madrasah. Tetapi bila dilihat dari daya tahan madrasah terhadap tantangan pendidikan secara umum madrasah cukup kuat, karena keberadaan madrasah memang betul-betul representasi kehendak masyarakat dan dibutuhkan masyarakat bukan karena kehendak otoritas penguasa.
- 3). Sekolah Islam pada dasarnya sama dengan sekolah umum, mata pelajaran umum menjadi mata pelajaran pokok hal ini dapat dilihat lulus dan tidaknya siswa tergantung dari hasil ujian nasional mata pelajaran umum. Ciri khas keislamannya cenderung tidak terlihat pada kompetensi siswa yang lebih nampak hanya atribut Islam yang menempelnya.

b. Pendidikan Islam sebagai mata pelajaran dan nilai

Mata pelajaran agama Islam di Pesanten menjadi mata pelajaran pokok, materi yang harus diselesaikan oleh para santri untuk menentukan kenaikan tingkat dan kelulusan, mata pelajaran umum hanya untuk mendapatkan pengakuan secara legal formal berupa ijazah

Mata pelajaran agama di madrasah tidak lagi menjadi mata pelajaran pokok karena standar kelulusan seorang siswa adalah mata pelajaran yang diunaskan sehingga secara kelembagaan madrasah kehilangan jatidirinya.

Mata pelajaran pendidikan Islam pada sekolah umum menang di yuridis formal tapi kalah dalam praktis artinya secara praktis materi pokok yang dapat menentukan siswa lulus adalah mata pelajaran yang diunaskan, hal ini berdampak pada sikap siswa, dan orang tua terhadap mata pelajaran agama (*Islam*) dipandang sebagai mata pelajaran pelengkap

B. Saran

1. Bagi pembuat kebijakan (*desesion maker*) Pendidikan agama (*Islam*) hendaknya secara praktis eksis seperti eksisnya pendidikan agama (*Islam*) dalam undang-undang, dengan memberikan sekala prioritas kepada pendidikan agama mengingat pendidikan agama menjadi landasan dasar moralitas bangsa. Beban materi yang terlalu banyak tidak cukup hanya diberikan dalam dua jam dan menjadikan lembaga pendidikan yang

mempunyai nuansa agama yang kuat, dengan menanamkan budaya keagamaan dalam setiap lembaga pendidikan

2. Bagi praktisi pendidikan, Pendidikan Islam dilihat dari dua hal

a. Pendidikan Islam sebagai lembaga

- 1) Pesantren untuk lebih diperhatikan keberadaannya (kebijakan, sarana dan prasarana, sumber dana) oleh pemerintah mengingat pesantren menjadi embrio lembaga pendidikan pada umumnya dan mempunyai peran yang cukup besar dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa
- 2) Madrasah sebagai lembaga pendidikan untuk lebih menata diri mulai dari dalam hal menejerial, sumberdaya manusia dan berorientasi pada mutu
- 3) Sekolah Islam hendaknya dikembalikan pada dasar Islam seperti halnya pada madrasah dengan mengintegrasikan kurikulum dan tidak menjadikan mata pelajaran umum sebagai mata pelajaran pokok. Tetapi menjadikn ilmu sebagai satu kesatuan yang berasal dari Allah .

b. Pendidikan Islam sebagai mata pelajaran dan nilai

- 1) Pengembangan pemikiran Islam kontemporer dengan merespon perkembangan Ilmu dan teknologi, penguasaan baghasa asing (*inggris*) dan pemberian pelajaran *live skil*.
- 2) Diperlukan integrasi kurikulum bukan hanya memberikan mata pelajaran agama dan umum secara terpisah-pisah. tetapi dengan

kurikulum yang terintegrasi, menghilangkan dikotomi ilmu pengetahuan

- 3) Sekolah Islam hendaknya dikembalikan pada dasar Islam seperti halnya pada Madrasah dengan mengintegrasikan kurikulum mata pelajaran umum dengan dasar Qur'an dan Sunah. sehingga menjadikan ilmu sebagai satu kesatuan yang berasal dari Allah.

C. Penutup

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas segala rahaman dan rahimNya, taufiq dan hdayahNya, sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan. Dan tidak lupa penulis banyak mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu studi dan dan selesainya tesis ini.

Penulis mohon maaf apabila ada pihak yang merasa terganggu dalam membantu pelaksanaan studi dan penyelesaian tesis ini, semoga bantuan baik yang berupa moril maupun materiil dapat menjadi amal ibadah serta mendapat balasan yang berlipat dari Allah SWT, Amin.

Disadari banyak kekurangan dan jauh dari harapan dalam penulisan tesis ini, maka saran dan kritik yang membangun dari para pembaca sangat diharapkan sehingga tesis ini dapat diperbaiki sampai pada drajad yang lebih memuaskan dan bermanfaat khususnya bagi penulis dan pembaca.

Semoga Allah SWT selalu menunjukkan dan membimbing ke jalan yang lurus dan diridloiNya sehingga kita dapat menjadi habaNya yang senantiasa mensyukuri nikmatNya, Amin.

AFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. 2007. *Meaningful in Learning*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Abu bakar, Usman dan Surohim. 2005. *Fungsi ganda Lembaga pendidikan Islam*, Yogyakarta: Safira Insania press.
- Ahmadi. 2007. *Idiologi Pendidikan Islam*; Yogyakarta : Pustaka pelajar
- Amin, M. Masykur (Ed). 1994. *Moralitas pembangunan*, Yogyakarta :Pustaka pelajar
- Amir Faisal, Jusuf. 1995. *Reformasi Pendidikan Islam* , Jakarta : Gema Insani Press.
- Ali, M. Samsi. <http://id.shovong.com/humanities/1668274> diterbitkan 11 september 2007 downlod tanggal 31 Mei 2008-06-06
- Apit. 2008. *Pendidikan Keagamaan: Politik pendidikan penebus Dosa* Gatra Nomor 10 Edisi Kamis, 17 Januari 2008 .Jakarta
- Asraf, Ali. 1984. *Horison Baru pendidikan Islam* Jakarta : Pustaka Firdaus.
- Asrohah, Hanum. 1999. *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta :Logos.
- Assegaf, Abdurrahman. 2005. *Politik Pendidikan Nasional Yogyakarta* : Kurnia Kalam.
- Atikson, I Rita, dan Richard C. Atiksen dkk. t.t. *Introducton of psikology (Pengantar Psikologi)* Jilid 1, alih bahasa Wijaya kusuma. Batam: Ineraksara
- Athiyah Al-Abrasyi, Moh. 1970. *Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam*, Jakarta : Bulan Bintang.
- Azra, Azumardi. 1997. *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi menuju Melenium baru*, Jakarta: Rineke cipta .
- Azwar, Saifudin. 1998. *Sikap manusia;Teori dan pengukurannya*, Yogyakarta ; Pustaka Pelajar.
- Baharudin. 2007. *Paradigma psikologi Islam*. Jogjakarta : Pustaka pelajar.
- Barnadib, Imam. 1994. *Filsafat pendidikan, Sistem dan Metode*, Yogyakarta : Andi Offset.

- Barnadib, Imam. 2003. *Paradigma Pendidikan Islam* Yogyakarta : Safiria Insan Press.
- Bill Guerin, Indonesia behind the learning curve, artikel didownload pada tanggal 10 April 2008 dari http://www.atimes.com/atimes/Southeast_Asia
- Darojat, Zakiah. 2006. *Ilmu Pendidikan Islam* Jakarta : Bumi aksara.
- Darojat, Zakiyah. 1979. *Ilmu Jiwa Agama*, Jakarta : Bulan Bintang.
- Danim, Sudarwan. 2006 , *Agenda Pembaharuan Sistem Pendidikan*, Yogyakarta :Pustaka pelajar.
- Darwis, Jamaludin. 2006. *Dinamika Pendidikan Islam* Jakarta : Rasail.
- Departemen Agama RI, 2004. *Sejarah Madrasah, pertumbuhan, dinamika dan perkembangannya di Indonesia*, Jakarta : Dirtjen Bagais Depag RI.
- Departemen Agama RI, 2004 *Pedoman pembinaan pondok pesantren* (Jakarta) depag RI Dirjen Bimbingan Islam
- Dhofier, Zamahsari. 1982. *Tradisi Pesantren*, Jakarta: LP3ES
- Dhofier, Zamachsari. 1996. *Kebijakan Departemen Agama dari Masa ke Masa dalam Kurun Setengah Abad*, Jakarta : Balitbang Depad RI.
- Dhofier, Zamachsari. 1997. *Perkembangan Pemikiran Islam di Indonesia pada seperempat terakhir Abad ke 20*, Semarang : Walisongo Pres.
- Echilis, M Jhon dan Hasan Shadily. 2000. *Kamus Inggris Indonesia cetakan ke 24*, Jakarta : Gramedia.
- Fadjar, Malik. 1998. *Madrasah dan Tantangan Modernitas*. Bandung: Mizan.
- Fajar, Malik. 1988. *Reorientasi pendidikan Islam*, Jakarta: Fajar Dunia.
- Fajar, Malik. 1989. *Visi Pembaharuan pendidikan Islam*, Jakarta: Fajar Dunia.
- Fajrie Alatas, Ismail. 2006. *Risalah Konsep Ilmu dalam Islam*, Jakarta: Diwan.
- Fak Tarbiyah IAIN Walisongo. 2001. *Paradikma pendidikan Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Fak Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang. 2002 *Dinamika Pesantren dan Madrasah*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar

- Fatah, Nanang. 2004. *Landasan Manajemen Pendidikan*, cet. VII. Bandung: Remaja Roddakarya.
- Hasbullah : *Otonomi Pendidikan* (Jakarta ; Raja Grafindo persada 2006)
- Hadzik, Abdullah. 2005. *Rekonsiliasi Psikologi Sufistik dan Humanistik*, Semarang : Rasail
- Isjoni, 2008 *Memajukan Bangsa Dengan Pendidikan*, Yogyakarta:Pustaka pelajar.
- Jauhari, Muchtar Hery.2005. *Fiqih Pendidikan*, Bandung : Remaja Rosda Karya.
- Jalaluddin dan Said, U; *Filsafat Pendidikan Islam: Konsep dan Perkembangan*. 1996 Jakarta: Grafindo Persada
- Johnson, B. Elaine. 2007. *Contekstual Teaching and Learning*, alih bahasa, Ibnu Setiawan, Cetakan ke V Bandung : MLC.
- Karto, Kartini. 1977. *Tinjauan Politik Mengenai Sistem Pendidikan Nasional* , Jakarta: Pradnya Pramita.
- Khamid Fathoni, Muhamad. 2005 *Pendidikan Islam dan Pendidikan Nasional (Paradigma Baru)*, Jakarta : Dirjen Kelembagaan Agama Islam Depag RI.
- Kuntowijoyo. 2003. *Metedologi Sejarah*, Yogyakarta : Tiara wacana.
- Kuzman, Carles. 2001. *Wacana pemikiran Liberal* Jakarta : Paramadina.
- LD Crow, A Introduction to Education, dicetak bersama,
- M. Syamsi Ali, *Arti dan Fungsi Penddidikan*
<http://id.shovong.com/humanities> accessed 11 September 2007
- Majid, Nurcholis. 1997. *Bilik-Bilik Pesantren Sebuah potret perjalanan*, jakarta: Paramadina. Cet.1.
- Majid, Nurcholis. 2000. *Islam Dokterin dan Peradaban* Jakarta : Paramadina
- Majidi, Busyairi. 1997. *Konesp Pendidikan Menurut para Filosof Muslim*,Yogyakarta : Al Amin Pres.
- Malik,Imam. *Al Muwatho'* Juz 2, Libanon: Dar al fikrit t.t.
- Maliki, Zaenudin. 2007. *Sosiologi Pendidikan*, Yogyakarta :Gajah Mada Pers.
- Masykuri, *Pengamalam Budaya (Religiuns Culture) di Sekolah Umum*), artikel

didownload dari www.ditpais.net (situs resmi Direktorat Pendidikan Agama Islam)

Mastuhu, <http://elmuttaqie.wordpress.com/2008/09/06/potret-buram-madrasah> didonlod tanggal 20 januari 2009

Mastuhu.t.t. *Prinsip Pendidikan Pesantren* Jakarta : Rineka cipta

Mudzhar ,M. Atho. 1997. *Masyarakat Tidak Obyektif Menilai Pendidikan Islam* , Jurnal pendidikan Islam Vol.3

Muhaimin. 2002. *Paradigma Pendidikan Islam: Upaya mengefektifkan Pendidikan Sekolah*, cet. II, Bandung: Remaja Rosdakarya

Mujiono, Imam. 1994. *Sejarah pendidikan Islam di Indonesia*, diktat Kuliah.

Mukhtar, Makhsum. 2002. *Madrasah dan sejarah perkembangannya* Jakarta :Lagos. Cet. III.

Mulyasa. 2003. *Menejemen berbasis kompetensi , setrategi dan implementasi*, Bandung : PT Al Ma'arif.

Musnamar, Tohari .1985. *Bimbingan dan Wawanwuruk ebagai suatu system*, Yogyakarta : Cendia Sarana Informatik...

Muthohari,Murtadha. 1992. *Perspektif Manusi dalam Al Quran tentang manusia dan Hewan*, Bandung : Mizan

Nashir, Haidar. 1999. *Agama dan Krisis Kemanusiaan Modern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Nasir, Rildwan. 2005. *Mencari format pendidikan Islam Idial*, Yogyakarta : pustaka Pelajar.

Nuquib al Attas, Sayed. 1990. *The Nature of Man an the Psikologi af the Umen Soul*, Kuala Lumpur : Istac.

O'dea, E. Tomas.1996. *Sosiologi agama suatu pengalaman awal* alih bahasa oleh tim penerjemah Yasogawa, Jakarta : Raja grafindo persada.

Palmer, A Joy. 2006. *Fifty Modern Thinkers on Education (50 Pemikir Paling Berpengaruh Terhadap Pemikiran Dunia Pendidikan Modern)*, alih bahasa Farid Assifa, Cet. 1, Yogyakarta : IRCisoD.

PDI-P:Revisi RUU Sisdiknas, artikel didownload pada tanggal 10 April 2008 dari www.suarapembaruan.com (situs resmi harian Suara Pembaruan)

Peraturan pemerintah no 28 tahun 1990. SK Mendikbud Nomor 0487/U/1992, dan Nomor 054/U/1993.

PP No 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan

Putra Dauly Haidar. 2001. *Historitas dan eksistensi pesantren, madrasah dan sekolah*, Yogyakarta : Tiara Wacana Yogyakarta.

Putra Dauly Haidar. 2007. *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional*, Yogyakarta : Kencana Prenada Grup.

Rais, Amin .1998. *Cakrawala Islam*, Yogyakarta ; Pustaka pelajar

Raji Al Faruqi, Ismail. 1988. *Tauhid*, Bandung: Pustaka

Ritzer Georgr dan Duglas J. Goodman. 2004. *Teori sosiologi Modern edisi 6 diterjemahkan oleh Alimanudin*, Jakarta : Kencana Pradana Media Grup .

Saefudin, A.M. 1985. *Konsep pendidikan agama : Sebuah pendekatan Integratif Inofatif* , Jakarta : Harian Umum Pelita.

Saleh, Abdurrahman. 2005. *Pendidikan Agama dan Pembentukan Watak Bangsa*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Sanaki, Hujair. 2003. *Paradikma pendidikan Islam (membangun masyarakat Indonesia Madani*, Jogjakarta : Pustaka pelajar

Sanapiah Faisal : *Sosiologi pendidikan* (Surabaya : Usaha Nasional)

Sarijo, M.1980 . *Sejarah Pondok Pesantren di Indonesia*, Jakarta: Dharma Bakti

Scharf, R Betty. 2004. *The Sociological study or Relegion (Sosiologi Agama)*, alih bahasa Machnun Husain, Jakarta : Pranada Media 2004.

Sihab,M. Qurays.1993. *Tafsir al Amanah bagian 4*, Amanah no. 31 th. 1987 dikutip oleh Muhaimin dan Abdul Majid, *Pemikiran Pendidikan Islam kajian Filosofis dan Kerangka Dasar Operasionalnya*, Bandung : Trigendakarya.

Situs Resmi MPR/DPR, *Naskah-Naskah UUD 45 dan 4 Tahapan Amandemennya*, <http://www.MPR.go.id/artikel/acessed> 11 April 2008.

Situs resmi Departemen Dalam Negeri, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, <http://www.depdagri.com/artikel/acessed> 10 April 2008

- Soedijono. 2008. *Landasan dan Arah Pendidikan Nasional*, Jakarta : Kompas.
- Sternbrink. K.A. (1986). *Pesantren, Madrasah dan Sekolah*. Jakarta: LP3ES.
- Sudardja Adiwikara. 1988. *Sosiologi Pendidikan, Isu dan hipotesis antara pendidikan dalam hubungannya dengan masyarakat*, Jakarta : Depdikbud.
- Sudarminta, *Pendidikan Moral di Sekolah Jalan Keluar Mengatasi Krisis Moral Bangsa?* [http:// www.gatra.com/artikel/acessed](http://www.gatra.com/artikel/acessed) 10 April 2008
- Sunarwan. 2001. *Pendekatan system dalam pendidikan*, Surakarta; Sebelas Maret University Pers.
- Surachmad, Winarno. 1971. *Peper skripsi, Tesis dan Disertasi : Cara memecahkan, cara menulis dan cara meneliti* , Bandung: Tarsito
- Surachmad, Winarno. 1981. *Kependidikan Alternatif dalam Peta Kependidikan Nasional*, Pesantren, I/Vol II/ 1958, Jakarta
- Surachmad, Winarno From: [http://www. Bpk penabur.or.id / kps-jkt/berita/200006/ artikel2.htm](http://www.Bpk.penabur.or.id/kps-jkt/berita/200006/artikel2.htm), 27 Mei 2002
- Surohim. 2004. *Reformulasi konsep Pendidikan Islam* (Tesia), Yogyakarta: MSI UII.
- Sutrisno. 2006. *Fazlur Rahman (Kajian terhadap metode, epistemology dan Sistem Pendidikan)*, Jogja : Pustaka pelajar.
- Suwito (ed). 2005. *Sejarah Sosial Pendidikan Islam*, Jakarta : Pranada media
- Suyata dan Darmiyati Zuchdi, 2007. *Pidato pemberian gelar DR HC kepada Ary Ginanjar Agustian*, Yogya karta : UNY
- Tilar, HAR.. 2002. *Pembenahan pendidikan Nasional*, Jakarta: Rineke Cipta
- Tilar, HAR. 1990. *Pendidikan dalam pembangunan nasional menyongsong abad XXI*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Tilar, HAR.. 2002 . *Perubahan Sosial dan pendidikan*, Jakarta : Gramedia.
- Tilar, H.A.R . 2006. *Staandarisasi pendidikan Nasional* (Jakarta : Rineka cipta.
- Toha Habib dan Abdul Mu'ti. 1998. *Proses belajar mengajar PAI di Sekolah*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Trisno sutanto, *Dilema RUU Sisdiknas*, [http://www.Politik Indonesia.net/-](http://www.PolitikIndonesia.net/)

artikel/accesed 10 April 2008.

Usa, Muslih. 1997. *Lembaga pendidikan Islam dan tantangan Masyarakat muslim dalam era globa* , Jurnal pendidikan Islam Vol.3.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasiona

Wan Daud Wan M Ibrahim , www.Angelfire.Com/in/elcom/98/falsafah.htm.
didonlod pada tanggal 31 mei 2008

Wan Daud, Wan Muhammad. 2003. *Filsafat dan Praktek Pendidikan Islam Syed Nukaib al Atas*, terj, Hamid Fahmi dkk, Bandung: Mizan.

Widiatono. 2004. *Pendidikan Manusia Indonesia*, Jakarta: Kompas.

Yunus, Muhammad.1979. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta :
Hidakarya Agung.

Zaenudin,. 2008. *Reformasi Pendidikan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Zubaidi. 2007. *Pendidikan Berbasis Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka pelajar

Zuhairini, Abdul Ghofur dkk. 1981. *Metodik khusus pendidikan agama*, Malang :
Biro Ilmiah Fakultas Tarbiyah

Zuhairini dkk. 2006. *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta : Bina aksara.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

LAMPIRAN

Ayat-Ayat al Qur'an

1. Q.S Az Dzariyat 56

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

56. Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.

2. Q.S Al Anam 162

إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

62. Sesungguhnya Ini adalah kisah yang benar, dan tak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Allah; dan Sesungguhnya Allah, dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana

3. Qs al Baqoroh : 265

وَمَثَلِ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ
كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَفَاتَتْ أَكْطُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِيبْهَا وَابِلٌ
فَطَلَّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٦٥﴾

265. Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya Karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran Tinggi yang disiram oleh hujan lebat, Maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat. jika hujan lebat tidak menyiraminya, Maka hujan gerimis (pun memadai). dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat.

4. Q.S ar Rum ;30

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ
اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

30. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang Telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui[1168],

[1168] fitrah Allah: maksudnya ciptaan Allah. manusia diciptakan Allah mempunyai naluri beragama yaitu agama tauhid. kalau ada manusia tidak beragama tauhid, Maka hal itu tidaklah wajar. mereka tidak beragama tauhid itu hanyalah lantaran pengaruh lingkungan.

5. Q.S al Hujuraat ; 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ
أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

13. Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

6. Q.S al Mulk ;30

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ ﴿٣٠﴾

30 Katakanlah "Terangkanlah kepadaku jika sumber air kamu menjadi kering; Maka siapakah yang akan mendatangkan air yang mengalir bagimu?".

7. Q.S. al Anbiya;107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٧﴾

107. Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.

8. Qs at Tahrir ayat ;6

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًى أَنفُسُهُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

6. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

9. Q.S al Alaq ;1-5

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿١﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿٢﴾ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ﴿٣﴾ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴿٤﴾ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴿٥﴾

1. Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan,
2. Dia Telah menciptakan manusia dari segumpal darah.
3. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah,
4. Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam[1589],
5. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.

[1589] Maksudnya: Allah mengajar manusia dengan perantaraan tulis baca.

10. Q.S. al Baqoroh ;151

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ ءَايَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿١٥١﴾

151. Sebagaimana (Kami Telah menyempurnakan nikmat kami kepadamu) kami Telah mengutus kepadamu Rasul diantara kamu yang membacakan ayat-ayat kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Al Kitab dan Al-Hikmah, serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui.

11. Q.S ar Rum ;30

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَٰلِكِ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِن أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

30. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang Telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui[1168],

[1168] fitrah Allah: maksudnya ciptaan Allah. manusia diciptakan Allah mempunyai naluri beragama yaitu agama tauhid. kalau ada manusia tidak beragama tauhid, Maka hal itu tidaklah wajar. mereka tidak beragama tauhid itu hanyalah lantaran pengaruh lingkungan.

BIODATA

Nama : HERRY SETYOWIBOWO S.Ag

Tempat tanggal lahir : Temanggung, 27 Agustus 1971

Orang Tua

Ayah : Drs.H. Saridjo

Ibu : Hj. Sarimah

Alamat Rumah : Perumahan Candi Asri Rt 02 Rw 05 Candimulyo,
Kedu Temanggung Jawa Tengah

Pendidikan : MIN (1983) Kalibanger, Jumo, Temanggung
MTsN (1986) Parakan, Temanggung
MAN 1 (1989) Yogyakarta
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas
Tarbiyah Jurusan PAI

Riwayat Pekerjaan : Guru PAI SMP Negeri 2 Kandangan Temanggung
Guru PAI SMP Negeri 1 Gemawang Temanggung
Guru MTs Al Mu'min Tembarak Temanggung